



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA



2024

PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran, Kelurahan Wanggudu – Kecamatan Asera

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (IAKIP) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Wanggudu, 30 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA

AMRUN, SP., M.M
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19690911 200804 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan puji dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Sebagai bagian dari SAKIP, laporan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan pelayanan publik, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, laporan ini menjadi wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi secara berorientasi pada hasil (*output* maupun *outcome*).

Di sisi lain, laporan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan kinerja, menguraikan permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, laporan ini memungkinkan kita untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja sama yang telah diberikan.

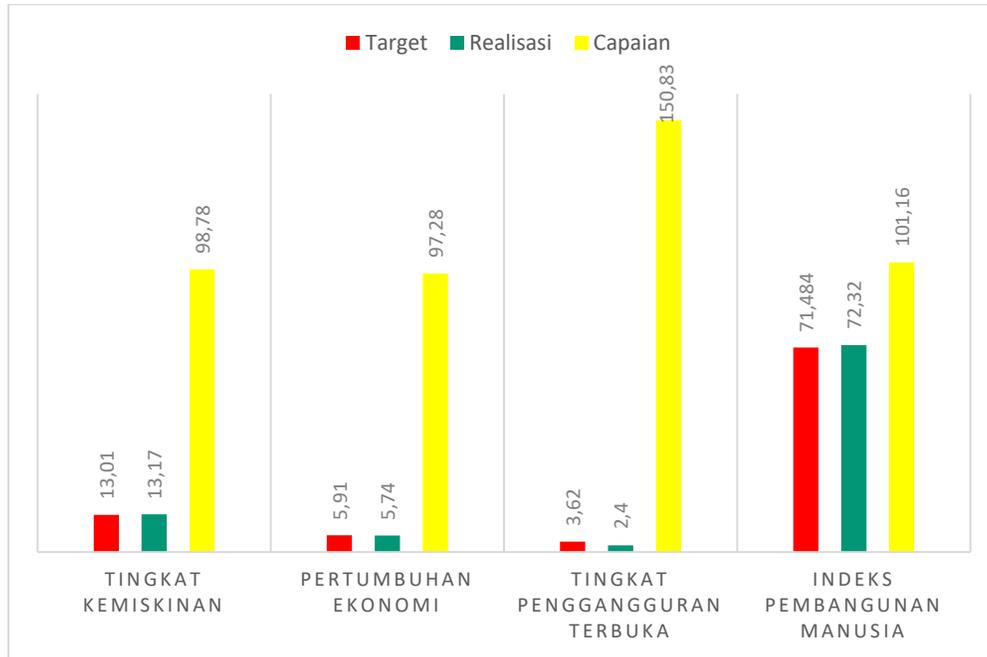
Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai capaian program dan kegiatan. Selain itu, tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sesuai target pembangunan daerah yang telah direncanakan

Wanggudu, 10 Februari 2025
Bupati Konawe Utara, *[Signature]*

K S A M I N

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2024



Indiaktor	Target	Realisasi	Capaian
Tigkat Kemiskinan	13,01	13,17	98,78
Pertumbuhan Ekonomi	5,91	5,74	97,28
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	2,4	150,83
Indeks Pembangunan Manusia	71,484	72,32	101,16

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

VISI

“Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

MISI

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan permukiman
3. Mewujudkan keadilan social dan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan Bencana
6. Membangun Peradaban masyarakat yang tertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

AGENDA

1. Konut Cerdas dan Sehat
2. Konut Infrastruktur Merata
3. Konut Lapangan Kerja Untuk Rakyat
4. Konut Melayani
5. Konut Tangguh
6. Konut Harmonis dan Berbudaya



Misi 1: Meningkatkan Kualitas Daya Saing dan Sumber Daya Manusia

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,484	72,32	101,16
			Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,986	9,61	96,23
			Harpan Lama Sekolah	Tahun	13,774	13,13	95,32
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	71,84	69,75	97,13
		Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembanguna Gender (IPG)	Indeks	87,14	87,24	100,11
			Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Pratama	Pratama
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,24	78,17	108,21
		Meningktanya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,56	80,2	95,98
		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	10,89	9,58	98,60

Misi 2: Meningkatkan Keterdesesaian Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektifitas Wilayah	Persen	87,91	87,91	100
			Proporsi Panjang Jalan dan Jemabatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	87,13	87,13	100
			Persentase Daerah Irigasi (DI) yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	69,47	69,47	100
		Terpenuhinya Sarana prasaranan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persentase	90,99	90,99	100
			Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	63,88	63,88	100
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	58,96	58,96	100
			Cakupan Layanan Persampahan	Persen	28,38	14,83	52,25

Misi 3: Mewujudkan keadilan Sosial dan Nilai tambah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam guna meningkatkan Daya Saing Ekonomi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,914	5,74	97,28
			PDRB Perkapita	Rp Juta/Jiwa/Tahun	62,169	5707,11	91,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,618	2,4	150,83
			Indeks Gini	Indeks	0,372	0,330	88,7
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,01	13,17	98,78
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Persen	40,302	39,7	98,51
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,44	22,87	106,66
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	11,868	8,9	74,97
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,162	1,15	99,13
			Presnetase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,07	0,07	100
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Rb Ribu	850,223	897,000	105,50
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	18,372	15,56

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Prima

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Inkdeks	50,73	51,24	101
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	B	B
			OPINI BPK	Kategoriu	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, Serta pelayanan public yang terpercaya	Indeks Maturitas kelembagaan	Level	3	3	100
			Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,62	2,85	175,92
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,62	3,61	100
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks	222	225	101

		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6218	0,6218	100
--	--	--	-----------------------	--------	--------	--------	-----

Misi 5: Meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup dan ketahanan bencana							
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,16	63,09	101,49
		Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan terhadap perencanaan tata ruang	Persen	81,96	81,96	100
		Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks kualitas air dan Udara	Indeks	95,53	96,58	101,49
		Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	165,64	172,75	104,31

Misi 6: Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai keagamaan dan kebudayaan local

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Melestarikan seni dan budaya lokal		Persentase kapasitas Lembaga ada yang dibina	Persen	100	100	100
		Meningkatkan Inventasi event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Nilai	4	4	100
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai nilai kerukunan beragama		Indeks kerukunan beragama	Indeks	75,4	74,2	98,4
		Meningkatnya Pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100

REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA 2024

NO	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
1	2.291.863.342.325,00	2.106.854.521.312,00	92,68

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasional	Rp. 1.205.367.891.707,63	Rp. 1.086.467.642.565,00	90,14%
2	Belanja Modal	Rp. 837.415.380.888,37	Rp. 776.507.589.224,00	92,73%
3	Belanja Tak Terduga	Rp. 23.000.000.000,00	Rp. 20.352.802.942,00	88,49%
4	Belanja Transfer	Rp. 226.080.069.729,00	Rp. 224.673.422.364,00	99,38%

INOVASI UNGGULAN DAERAH

1

INOVASI BIDANG BPKSDM

APLIKASI SEKRETARIAT BKPSDM

APLIKASI

Online Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Pegawai

TUJUAN

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepegawaian serta meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian



2

INOVASI BIDANG PARIWISATA

APLIKASI BIDANG PARIWISATA

APLIKASI

Wonua Oheo

TUJUAN

Memberikan informasi dan bantuan kepada pengguna dalam merencanakan, mengatur dan mengoptimalkan perjalanan wisata.



3

INOVASI BIDANG PERBENDAHARAAN

APLIKASI BIDANG PERBENDAHARAAN

APLIKASI

SimpelSP2D (Sistem informasi Manajemen Pelayanan SP2D)

TUJUAN

Terciptanya pengarsipan keuangan yang lebih baik, tersusunnya prosedur dan alur data proses setiap pengurusan SP2D, terwujudnya system yang dapat membantu pelayanan SP2D secara mudah, dan meningkatkan kinerja bidang keuangan baik secara internal dan eksternal.



POTENSI STRATEGIS



Beberapa potensi strategis di Kabupaten Konawe Utara:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara
2. Daya Saing Ekonomi Daerah
3. Infrastruktur Wilayah dan Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman
4. Perbaikan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Kualitas Lingkungan Hidup dan Migitasi Bencana Alam
6. Pembangunan Keagamaan Masyarakat

PERMASALAHAN STRATEGIS

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Masih Rendah dan Tidak Berkualitas
3. Belum Terpenuhinya Pelayanan Infrastruktur Wilayah dan Sarana Kawasan Pemukiman
4. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Belum Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dan Migitasi Bencana Alam
6. Belum Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan



PENGHARAGAN YANG DITERIMA PEMDA KONAWE UTARA

1

Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian 7 Kali Berturut-turut dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tanggal 22 Mei 2024



2

Penghargaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 di Mataram;

3

Penghargaan Juara 1 Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024



4

Penghargaan Daerah yang Peduli Layak Anak tanggal 12 September 2024 di Jakarta

Penghargaan Indonesia Visionary Leadership Awards 2024 Top 100 Leader Choice kategori Platinum Award “The Most Honorable Figure Ind Dedication Performance dan Visionary Leadership of The Year tanggal 13 September 2024 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

5



6

Inovasi public servisis sektor pendidikan (Konasara) dan Pertanian tanggal 20 September 2024



7

Penghargaan Juara 1 Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2024



8

Penghargaan Predikat Tinggi Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman tanggal 15 November 2024

9

Penghargaan Peringkat 1 Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Desa Wisata Labengki pada tanggal 17 November 2024 yangdi serahkan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	76
BAB IV PENUTUP	191

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan pemerintahan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui SAKIP, pemerintah daerah memiliki landasan yang kokoh untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dalam konteks ini, SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran strategis.

Sebagai produk akhir dari implementasi SAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan lainnya atas pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan LAKIP didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur. Laporan ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menganalisis penyebab keberhasilan serta kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, LAKIP menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan,

dan pariwisata, memerlukan pendekatan pengelolaan yang terencana dan terukur. Dalam hal ini, LAKIP Tahun 2024 berfungsi sebagai cerminan sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2024 juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menegaskan pentingnya setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan yang mengintegrasikan aspek keuangan dan kinerja secara simultan. Dalam konteks otonomi daerah, LAKIP berperan sebagai alat ukur efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui LAKIP Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ingin menunjukkan keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi juga menjadi alat refleksi untuk terus mendorong perbaikan kinerja organisasi. Dengan demikian, LAKIP akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penyusunan LAKIP Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Mengomunikasikan capaian kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Memberikan masukan untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
4. Meningkatkan kesadaran seluruh elemen pemerintahan akan pentingnya akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya LAKIP, diharapkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat semakin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

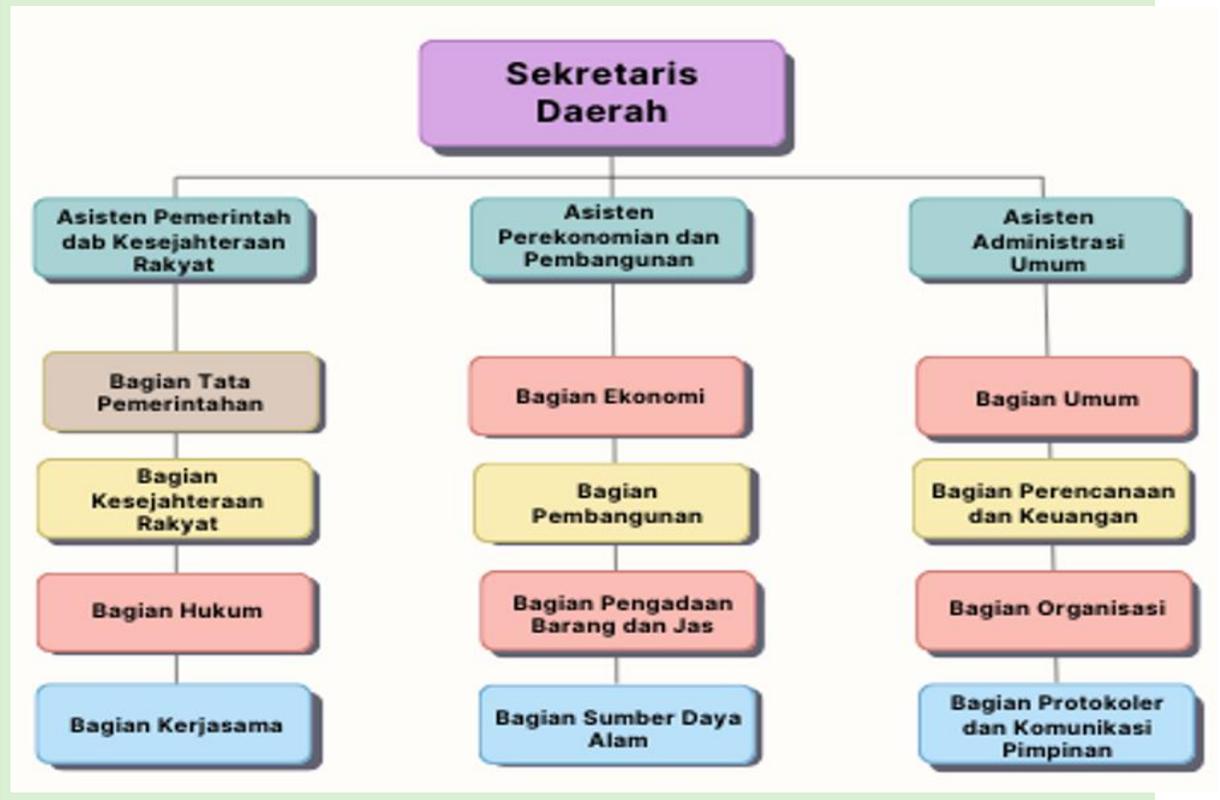
1.2.1 Organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Dibentuk berdasarkan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembentukan dan pengaturan organisasi perangkat daerah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang efisien, transparan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Beberapa peraturan yang menjadi landasan organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

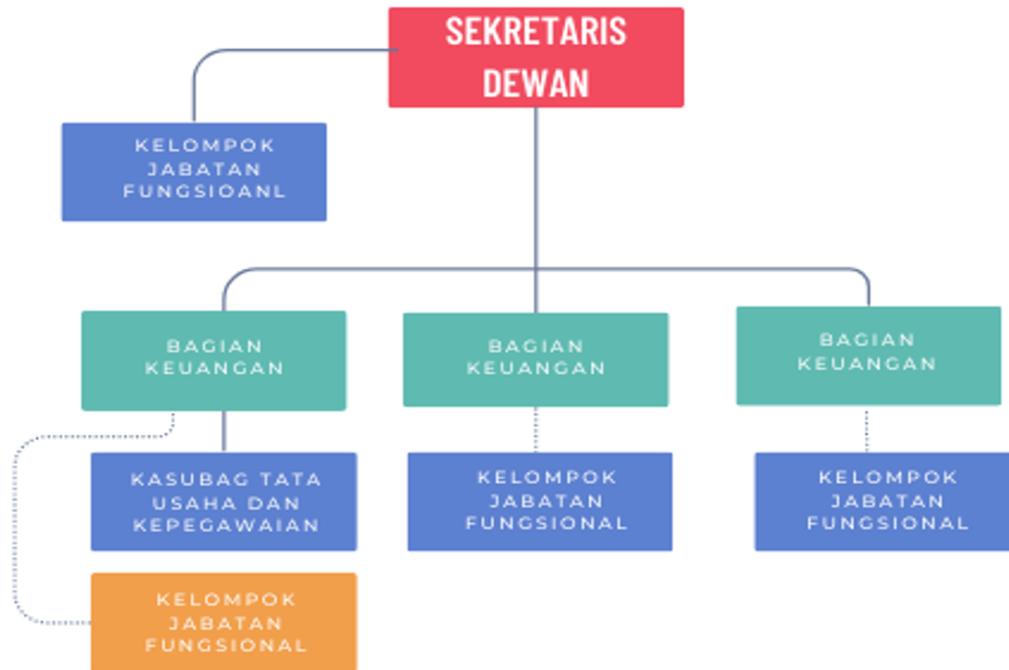
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Konawe. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur kewenangan dan tugas Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Keberadaan Kabupaten Konawe Utara sebagai daerah otonom memberikan kesempatan bagi daerah ini untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Undang-Undang ini juga mencakup pengaturan mengenai struktur pemerintahan, pembagian tugas, serta pengelolaan sumber daya daerah. Undang-Undang ini tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Perubahan kedua atas peraturan daerah ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi pemerintahan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang ada. Peraturan ini mencakup pembentukan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), yang memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara. Organisasi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik, lebih terorganisir, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara terdiri dari berbagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan, baik dalam bidang administrasi umum, pembangunan, ekonomi, pendidikan,

kesehatan, dan sektor lainnya. Perangkat daerah ini diatur dalam peraturan daerah yang telah disahkan dan merupakan bagian dari struktur organisasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Konawe Utara antara lain:

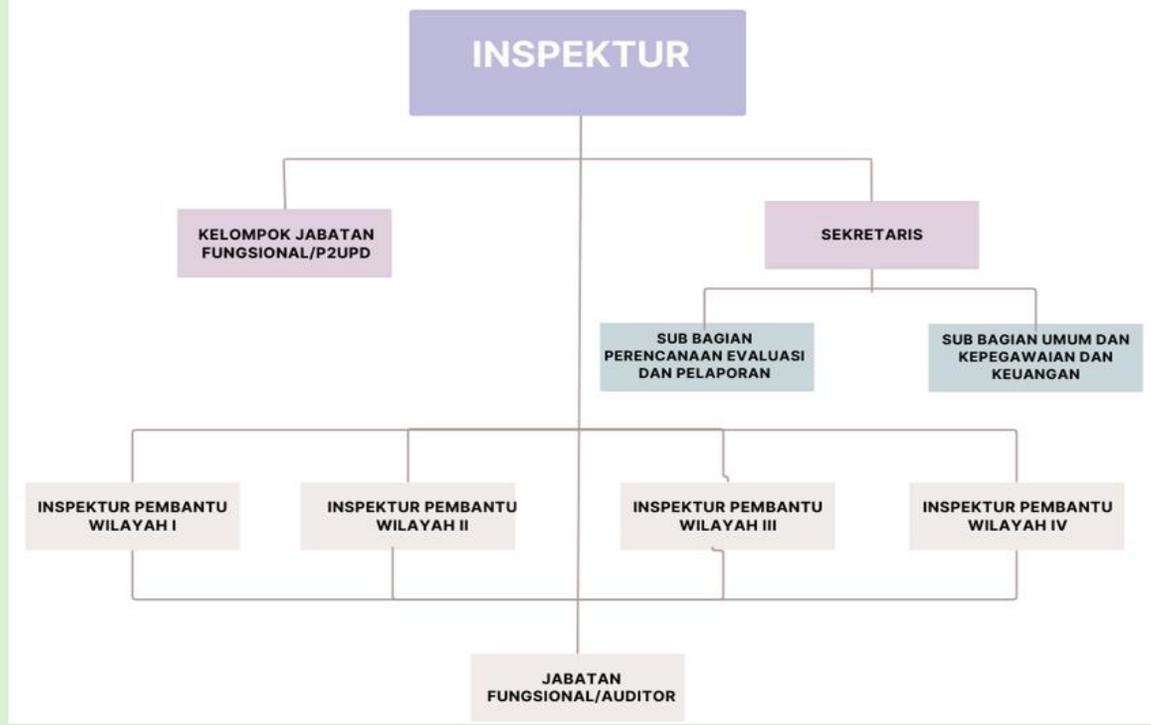
SEKRETARIAT DAERAH



SEKRETARIAT DPRD



INSPEKTORAT DAERAH



DINAS

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PU dan Penataan Ruang
4. Dinas Sosial
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6. Dinas PP dan PA
7. Dinas PP dan KB
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, UMKM
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16. Dinas PM dan PTSP
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18. Dinas Perpustakaan
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pariwisata
21. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
22. Satuan Polisi dan Pamong Praja
23. Dinas Pemadam dan Kebakaran
24. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25. Dinas Perkebunan

BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawiaan dan Pengembangan SDM
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Penaguulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KECAMATAN

1. Kecamatan Motui
2. Kecamatan Sawa
3. Kecamatan Lembo
4. Kecamatan Wawolesea
5. Kecamatan Lasolo
6. Kecamatan Molawe
7. Kecamatan Andowia
8. Kecamatan Asera
9. Kecamatan Oheo
10. Kecamatan Langgikima
11. Kecamatan Landawe
12. Kecamatan Wiwirano
13. Kecamatan Lasolo Kepulauan

1.2.2 Kekuatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dari berbagai disiplin ilmu. Pada tahun 2024, terdapat 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan eselon II hingga IV, dengan latar belakang pendidikan mulai dari jenjang SD hingga Doktor (S3).

TABEL 1.1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA MENURUT TINGKAT KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN KONAWE UTARA PER DESEMBER TAHUN 2024

Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	33	5	38
Administrator	156	34	190

Pengawas	208	104	312
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	325	686	1.011
Jabatan Fungsional Medis	223	996	1.219
Jabatan Fungsional Teknis	195	149	344
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	481	525	1.006
Jumlah	1.621	2.499	4.120

Sumber data : Konawe Utara dalam Angka Tahun 2025

1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan kewenangan dalam urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan wajib lainnya yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

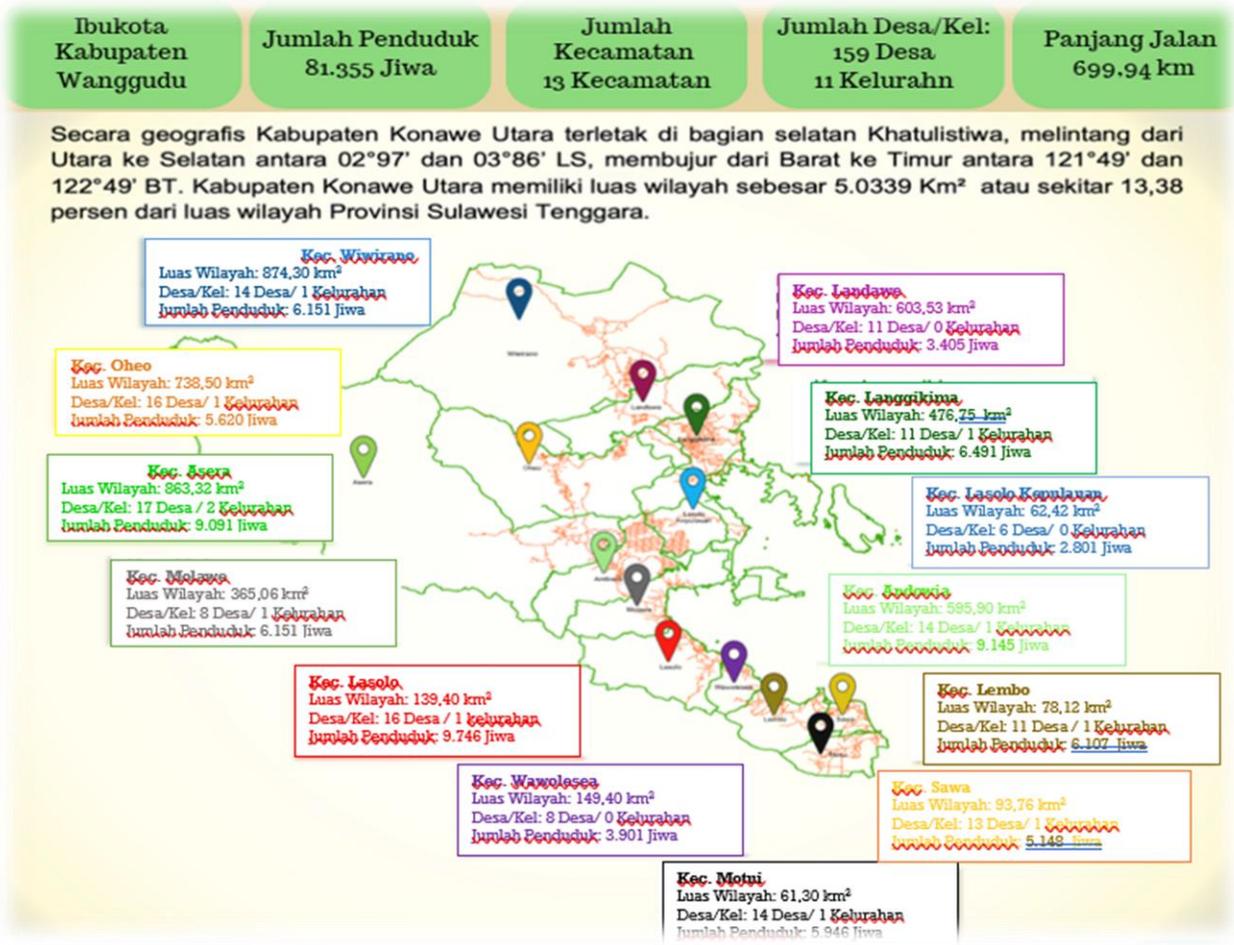
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

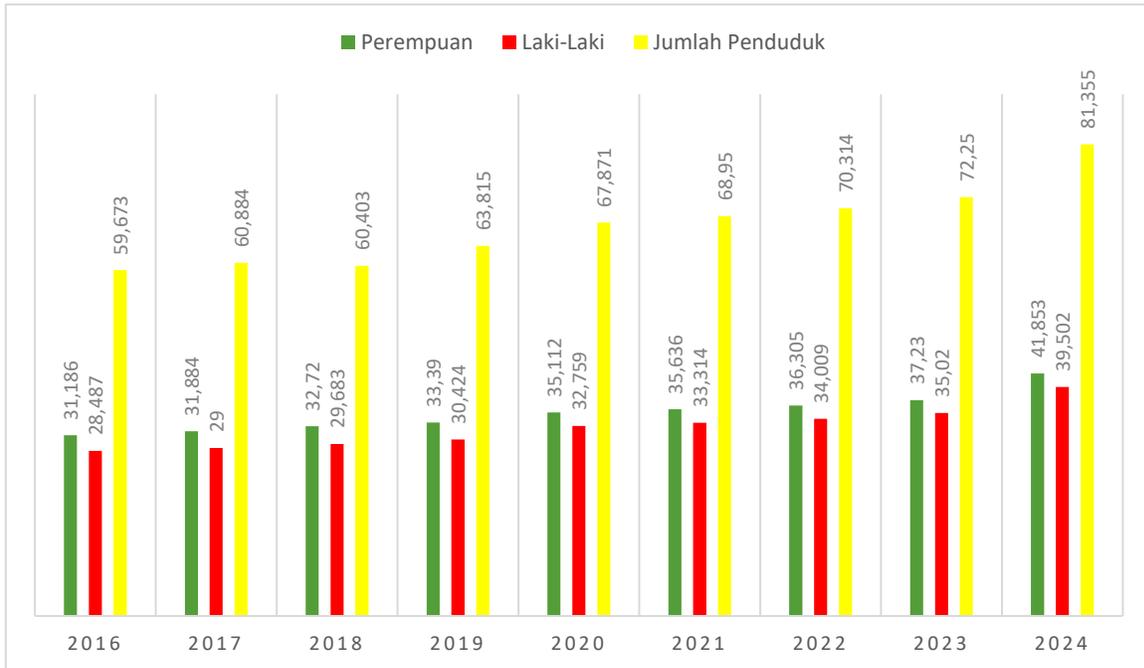
1.3.1. Aspek Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara

1.3.1.1 Aspek Geoiragfis dan Demografis Daerah

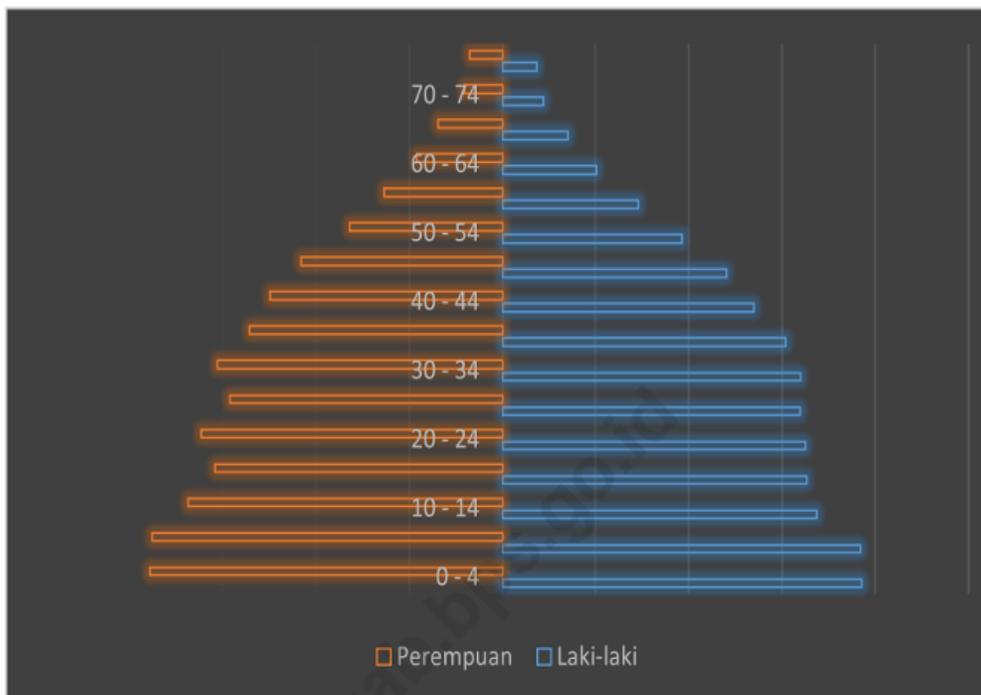


Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa yang terdsiri dari 41.853 jiwa laki-laki dan 39.502 jiwa perempuan, dengan angka sex rasio jenis kelamin sebesar 73,83%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun di Kabupaten Konawe Utara sebsar 2,27%

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2024



Piramida Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024



Sumber : Proyeksi Penduduk SP2020

Piramida penduduk Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk muda lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan penduduk tua. Artinya angka kelahira di wilayah tersebut tinggi, sedangkan angka kematian bayi rendah. Pemerintah kabupaten Konawe Utara masih berfokus pada pengendalian jumlah penduduk dan memberikan pembinaan kepada penduduk usia produktif.

1.3.1.2. Aspek Ekonomi Daerah

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup melalui tiga dimensi utama, yaitu: Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Dimensi Kesehatan diukur dengan menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi Standar Hidup Layak diukur berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, yang dianalisis melalui rata-rata pengeluaran per kapita.

Untuk dimensi Pengetahuan, penghitungan IPM menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan, dimensi Standar Hidup Layak dihitung menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Untuk dimensi Kesehatan, indikator yang digunakan adalah Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Metode agregasi dalam perhitungan IPM diperbaiki dengan menggunakan rata-rata geometrik. Jika data PNB tidak tersedia di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, maka digunakan proksi pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang diperoleh melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Metode ini diterapkan pertama kali dalam perhitungan IPM di Indonesia pada tahun 2014.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Konawe Utara, IPM pada tahun 2023 tercatat sebesar 72,11 meningkat menjadi 72,32 pada tahun 2024. Peningkatan ini menempatkan Kabupaten Konawe Utara dalam kategori "tinggi" bersama empat daerah lainnya di Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Konawe.

TAHUN	IPM KONAWA UTARA	IPM SULAWESI TENGGARA	IPM NASIONAL
2018	68,50	70,61	71,39
2019	69,22	71,20	71,92
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	72,91
2023	72,11	72,94	74,39
2024	72,32	73,62	75,02

Sumber Data : BPS Sulawesi Tenggara dan BPS Indonesia

Peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan dalam tiga dimensi utama:

1. Kesehatan: Diukur melalui Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH).
2. Pendidikan: Diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe Utara mencatatkan angka yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan PDRB ini mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam sektor-sektor perekonomian, yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Berikut adalah faktor-faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024:

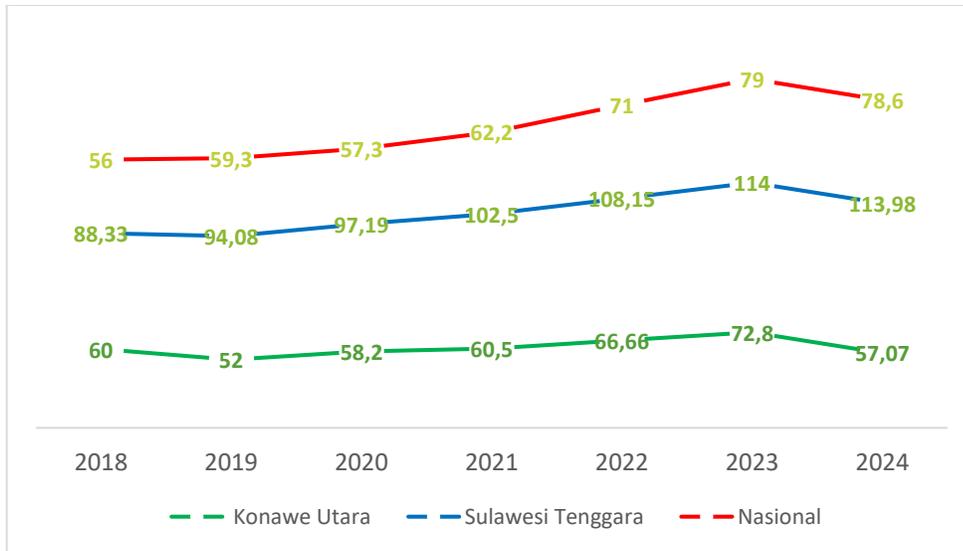
1. **Sektor Industri dan Manufaktur:** Sektor industri, terutama yang terkait dengan sumber daya alam (seperti pertambangan dan pengolahan hasil alam), berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara. Seiring dengan berkembangnya industri pengolahan, ada peningkatan produk lokal yang

dipasarkan, yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah produk.

2. **Perdagangan:** Perdagangan menjadi sektor yang terus berkembang, baik itu perdagangan antar daerah maupun ekspor produk hasil pertanian dan pertambangan. Meningkatnya permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, turut mendorong pertumbuhan PDRB.
3. **Investasi Infrastruktur:** Pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan fasilitas publik lainnya, mendukung kemajuan sektor ekonomi lainnya. Infrastruktur yang lebih baik mempermudah distribusi barang, memperlancar kegiatan bisnis, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan PDRB.
4. **Sektor Pertanian dan Perikanan:** Meskipun sektor pertanian dan perikanan lebih kecil kontribusinya dibandingkan dengan sektor industri, sektor ini tetap memainkan peran penting dalam perekonomian Kabupaten Konawe Utara. Peningkatan produktivitas pertanian dan keberhasilan dalam hasil tangkapan laut turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
5. **Ekspansi Sumber Daya Alam:** Kontribusi sektor sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan mineral dan energi, mengalami peningkatan. Hal ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena sektor ini menyediakan lapangan kerja dan mendatangkan pendapatan bagi daerah.

Peningkatan PDRB Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah ini berada pada jalur yang tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan melalui peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan akses ke layanan publik yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan sektor-sektor yang ada, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Memasuki periode 2023 hingga 2024, PDRB Kabupaten Konawe Utara terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ekonomi tumbuh sebesar 5,74%, sejalan dengan perkembangan sektor-sektor unggulan di daerah tersebut. Pencapaian ini hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 yang mencatatkan angka 17,95%.



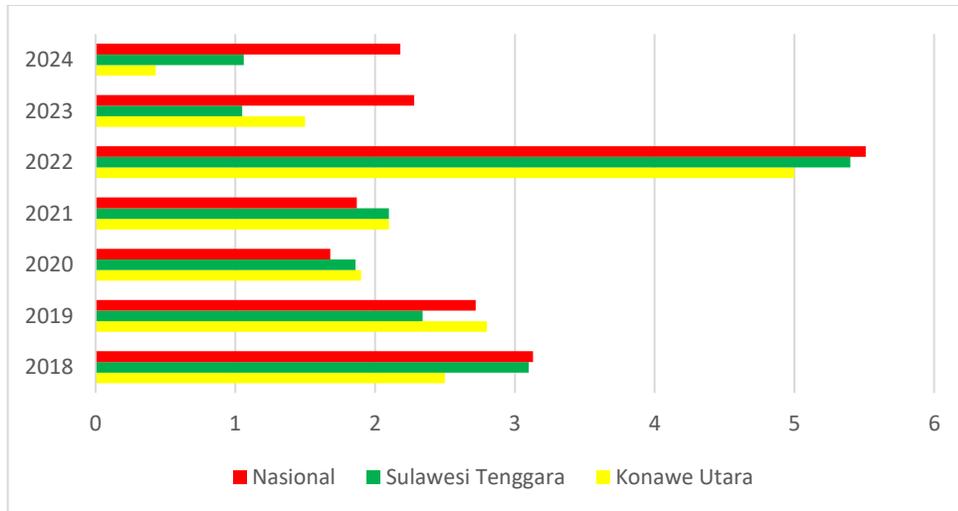
Sumber data : https://databoks.katadata.co.id/index.php/pdb/statistik/69b484e58980c06/data-2023-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-konawe-utara-rp-72-8-juta?utm_source=chatgpt.com

LAJU INFLASI

Laju inflasi adalah persentase perubahan rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Inflasi mengukur sejauh mana harga barang dan jasa naik, yang dapat mempengaruhi daya beli uang. Jika inflasi tinggi, nilai uang cenderung menurun, dan konsumen akan mendapatkan lebih sedikit barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. Sebaliknya, inflasi yang rendah atau negatif (deflasi) menunjukkan bahwa harga barang dan jasa stabil atau turun.

laju inflasi di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak signifikan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim pemantauan dan pengendalian inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui ;

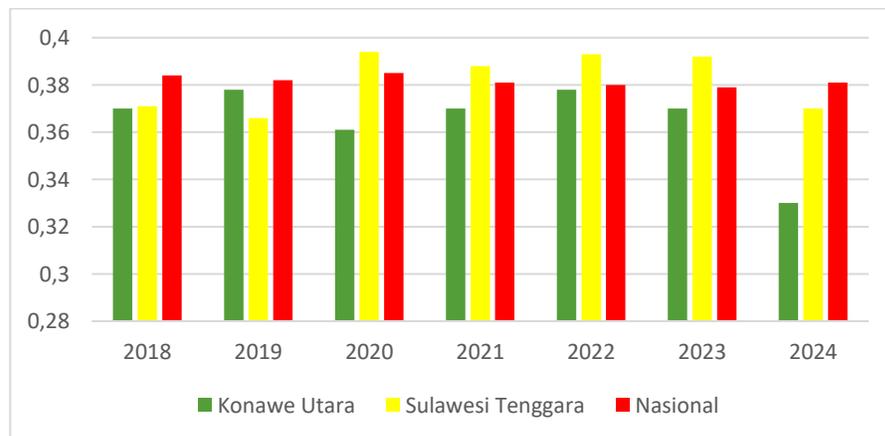
1. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPS dan lembaga terkait untuk memonitor harga secara berkala dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat menstabilkan harga barang dan jasa.
2. Program pengendalian inflasi sering melibatkan pembatasan ekspor barang tertentu, pengelolaan stok pangan, serta pengawasan harga pasar tradisional.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara dan BPS Indonesia.

INDEKS GINI

Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu populasi. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata (semua individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu individu memiliki seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki pendapatan sama sekali).



Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Dengan Gini Ratio sebesar 0,330, Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif rendah. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Gini Ratio di daerah perkotaan Sulawesi Tenggara yang

tercatat sebesar 0,370 pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran di Kabupaten Konawe Utara relatif **rendah**, artinya perbedaan pendapatan atau pengeluaran antar individu di daerah ini tidak terlalu besar. Dengan angka ini, Konawe Utara memiliki tingkat ketimpangan yang **terkendali** dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya.

TINGKAT KEMISKINAN

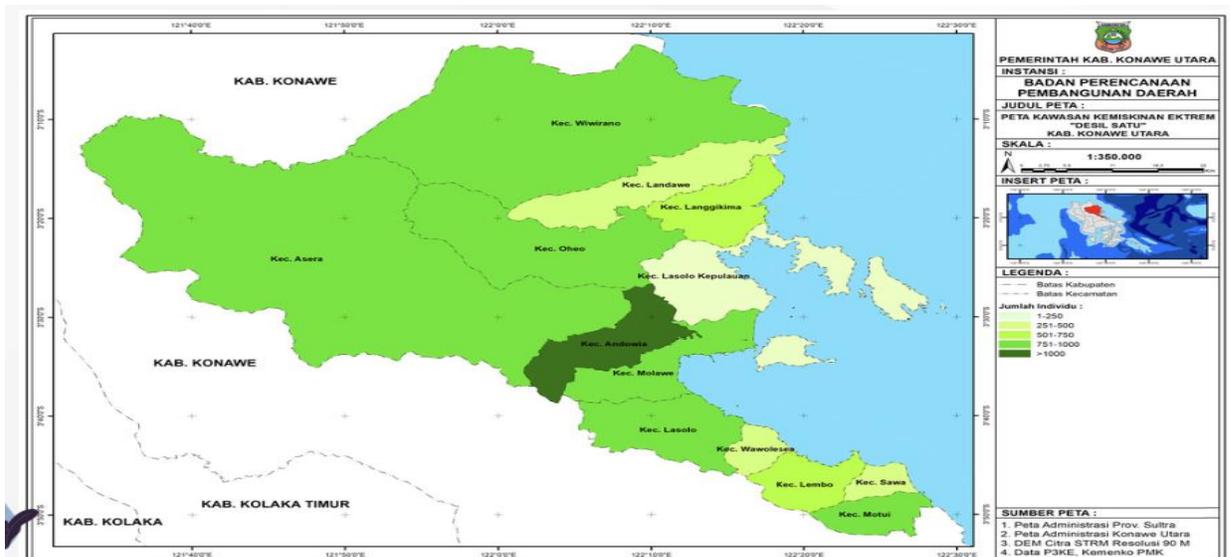
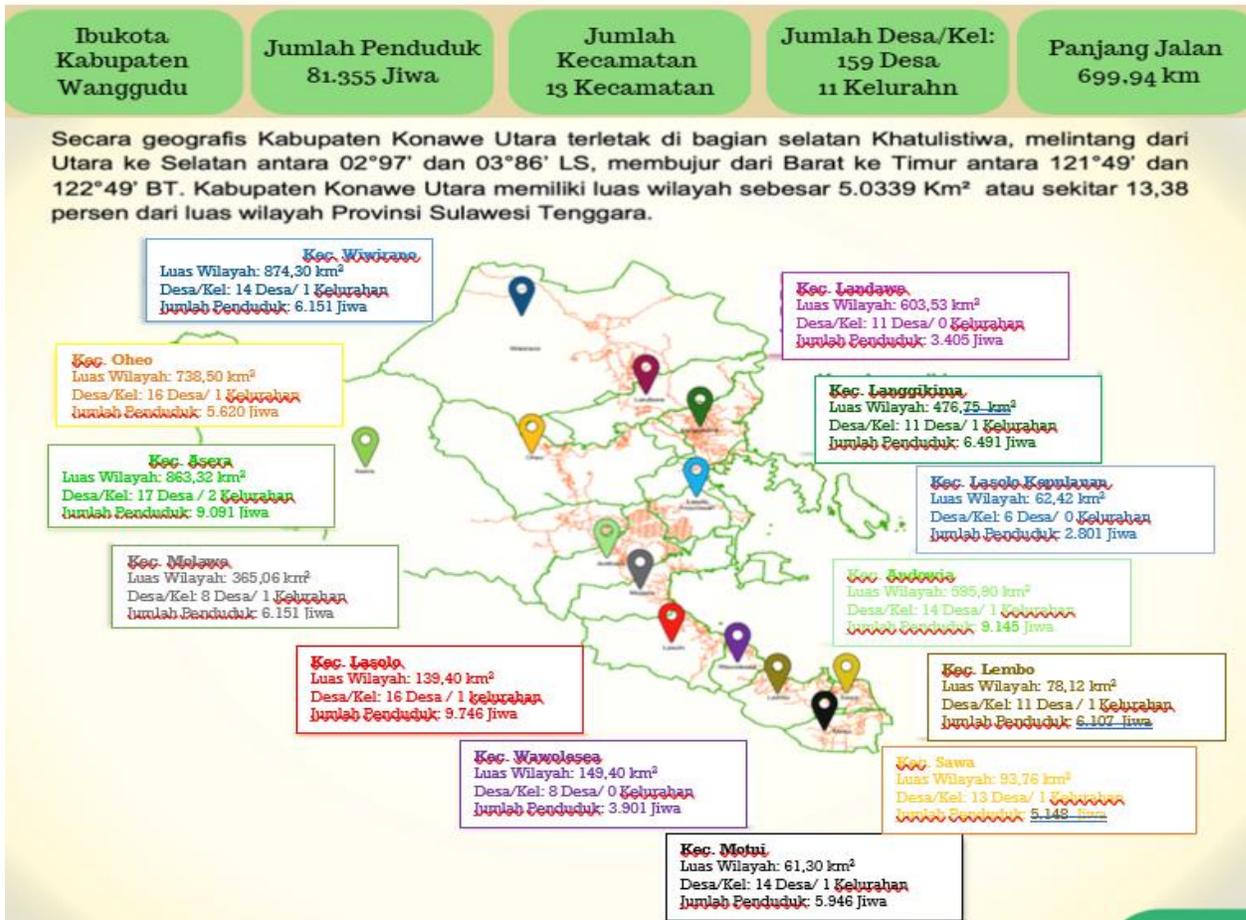
TAHUN	KONAWE UTARA	SULAWESI TENGGARA	NASIONAL
2018	13,72	11,03	9,82
2019	13,48	11,04	9,41
2020	13,25	11,69	9,78
2021	13,57	11,66	9,71
2022	13,72	11,24	9,54
2023	13,48	11,02	9,22
2024	13,17	11,21	9,00

Sumber Data : BPS Sulawesi Tenggara dan BPS Indonesia

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 13,25%. Penurunan persentase menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Dimana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan,

bantuan sosial, dan pengembangan sektor ekonomi serta membangun infrastruktur di wilayah perdesaan juga menjadi fokus, untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung perekonomian.

Pemetaan Ekstrim di Kabupaten Konawe Utara yang bersumber dari data P3KE



1.3.1.3. Aspek Strategis Pembangunan Kabupaten Konawe Utara

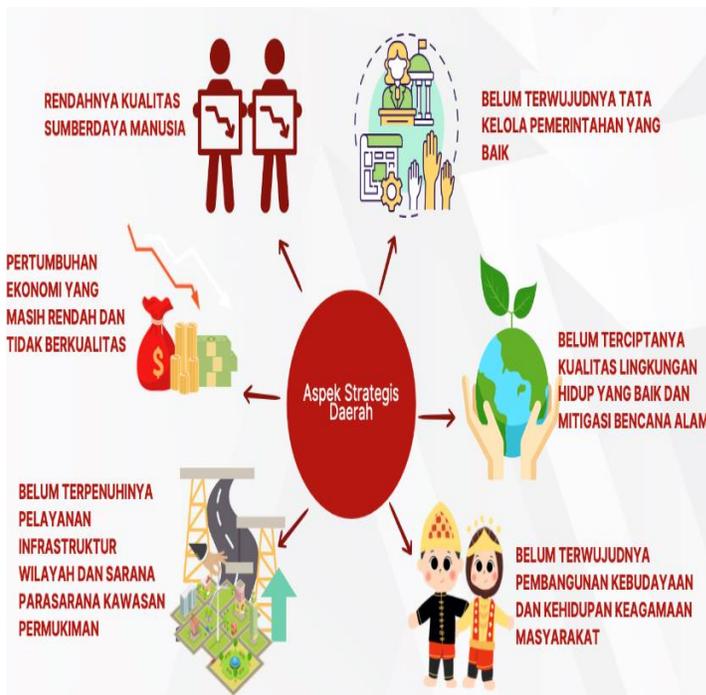
Permasalahan daerah mencerminkan kinerja daerah atau kondisi yang belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, identifikasi masalah dan isu strategis sangat penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan daerah adalah adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan kondisi nyata saat perencanaan dilakukan. Untuk mengurangi kesenjangan ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih, perlu dilakukan perumusan yang tepat berdasarkan analisis masalah daerah melalui identifikasi permasalahan di seluruh bidang pemerintahan.

Selanjutnya, permasalahan ini digabungkan menjadi satu rumusan masalah di Kabupaten Konawe Utara. Setiap kebijakan harus didasarkan pada rumusan masalah yang relevan, agar kebijakan dapat dipertimbangkan dengan matang dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas.

Prioritas yang tepat akan menghasilkan agenda utama dan

memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan di berbagai aspek dan urusan pemerintahan, RPJMD 2021-2026 merumuskan enam masalah utama Kabupaten Konawe Utara, yaitu:



Keenam permasalahan utama tersebut menjadi faktor pendorong utama yang menghambat tercapainya yang optimal di Kabupaten Konawe Utara, sehingga kesejahteraan dan daya saing daerah belum

dapat tercapai secara maksimal.

1.3.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah, baik yang bersumber dari isu internasional, nasional, maupun regional, serta amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), isu strategis daerah Kabupaten Konawe Utara dirumuskan dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam. Proses perumusan ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis adalah dampak besar yang dapat ditimbulkan terhadap pencapaian sasaran nasional. Pembangunan daerah harus selaras dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan di daerah ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat langsung bagi setempat, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, isu strategis yang dipilih harus memiliki relevansi yang kuat dengan prioritas nasional yang sedang dijalankan.

Selain itu, isu-isu strategis yang dirumuskan juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan yang berkelanjutan. Sebagai pemangku kepentingan utama di daerah, pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu, setiap isu strategis yang dipilih juga harus dapat dijalankan dengan efektif oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.

Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan isu strategis. Setiap kebijakan harus dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Isu strategis yang dipilih harus dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi luas, serta mendukung terciptanya pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Potensi untuk memberikan daya ungkit terhadap daerah juga menjadi faktor yang sangat penting. Isu strategis yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor kunci yang dapat

menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memprioritaskan isu-isu yang memiliki potensi daya ungkit tinggi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan investasi, serta peningkatan daya saing daerah di regional maupun nasional.

Terakhir, kemudahan dalam pengelolaan juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Setiap isu strategis yang dirumuskan harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, dengan memperhatikan aspek kemudahan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudahan dalam pengelolaan ini akan memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, dengan alokasi sumber daya yang efisien dan hasil yang optimal.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perumusan isu strategis daerah Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk menciptakan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi Melalui pendekatan yang tepat dan pemilihan isu yang relevan, diharapkan Kabupaten Konawe Utara dapat mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi daerah yang maju, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada beberapa aspek strategis untuk mendorong daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Fokus utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Konawe Utara mencakup:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga Pendidikan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana Kesehatan dan tenaga Kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten.
- Peningkatan Kesehatan ibu dan anak
- Memperomosisikan budaya hidup sehat bagi segala usia
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara system bagi berpenghasilan rendah dan tinggi.

EKONOMI

Daya saing ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Berikut adalah

penjabaran mengenai fokus utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah tersebut:

- Peningkatan iklim investasi Daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan produktifitas pertanian, dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian, dan perikanan
- Mengembangkan nilai tambah (value added) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan system distribusi dan pemasaran produk local berbasis online yang terintegrasi antara produsen, keuangan dan dan konsumen
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sector pertanian antara lain perikanan
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi;
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi dan UMKM;

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada beberapa aspek strategis yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Fokus utama dalam pengembangan infrastruktur di daerah ini meliputi:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan perkotaan Wanggudu;
- Pemanfaatan Infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa.
- Pengembangan sarana transportasi orang, barang
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas sosial ekonomi
- Pengembangan Sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani system sanitasi
- Penyediaan sarana dan prasarana umum (RTH, Landmark, Tmpat olahraga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman dll) yang berkualitas dan merata

- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik;
- Pengembangan system sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani system sanitasi;



LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada beberapa strategi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam. Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi serta mendukung berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran fokus tersebut:

- Menimbulkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan
- Pengurangan kerentanan bencana alam
- Menyediakan dan mengembangkan saran dan prasarana penanganan bencana
- Melatih dan mendorong kesadaran untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana

KEBUDAYAAN

Fokus kebudayaan dan kehidupan keagamaan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada penguatan identitas budaya daerah, pelestarian warisan budaya, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati antarumat beragama. Pembangunan di sektor ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang ada, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial dan integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjabaran fokus tersebut:

- Kemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lemabaga Adat Bugis-Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lemabaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Fiobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya.

1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421).
5. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007** tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
6. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

8. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
9. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
10. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara berlangsung sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

1.5. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang dirancang setiap lima tahun sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Daerah. RPJMD dirancang secara sistematis dengan menitikberatkan isu-isu yang diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis serta rencana yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Implementasinya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan daerah selama periode tersebut. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

Visi : KONawe Utara lebih SejahterA dan beRdaya saing (Konasara)

Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahan bencana;
6. Membangun peradaban yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.



Agenda :

1. Konawe Utara Cerdas dan Sehat
2. Konawe Utara Infrastruktur merata
3. Konawe Utara Lapangan Kerja untuk Rakyat
4. Konawe Utara Melayani
5. Konawe Utara Tangguh
6. Konawe Utara Harmonis dan berbudaya

LEBIH SEJAHTERA

Konawe Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Kehutanan seharusnya memiliki nilai tambah agar dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing, sehingga memungkinkan terjadi kemandirian daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

Periode 2021-2026 akan terus dilakukan upaya-upaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah sumber daya alam agar terwujud kesejahteraan, dan berdaya saing. Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedangkan yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman dan Makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurangnya apapun.

BERDAYA SAING

Dimaknai sebagai kemampuan dan potensi untuk bersaing dengan daerah lain, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Utara. Keunggulan ini tercermin dalam pengelolaan dan proses, daya, serta agresivitas yang ada di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan kekayaan daerah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan lingkungan yang produktif yang mendukung bisnis dan inovasi yang berkelanjutan.

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tujuan 1	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
<p>Meningkatnya kualitas SDM</p>	<p>Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pasrtisipasi Pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan melalui pendidkan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemeberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa KONASARA bagi perguruan tinggi; • Peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta bahan ajar; • Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah 	<p>Pemerataan dan penigkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai peningkatan sarana prasarana pengembangan kurikulum dan Pendidikan karakter</p>
	<p>Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan Kesehatan (promotive, preventif, kuratif, rehabilitative) • Penerapan hidup bersih dan sehat • Pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi serta perluasan jaminan Kesehatan 	<p>Penguatan sarana prasarana dan alat Kesehatan pada semua tingkatan pelayanan Kesehatan</p>

Meningkatnya kualitas hidup dan pengarusutamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan Pengarusutamaan gender dalam perlindungan Pengarusutamaan • Meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program dan KB 	Penguatan system penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengerusutamaan Hak Anak
Meningkatnya Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas kesempatan kerja, • Pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja • Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran terbuka
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Penyediaan pangan yang baik terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan stabilitas pasokan dan harga pangan
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penurunan angka kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan dan kemudahan akses pembiayaan.

Tujuan 2	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
<p>Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</p>	<p>Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan irigasi melalui pengembangan dan rehabilitas • Penyediaan sarana prasarana perhubungan • Percepatan sarana prasarana Kawasan perkotaan wanggudu 	<p>Pembangunan dan peningkatan jalan /jembatan kewenangan kabupaten dan jalan Kawasan strategi</p>
	<p>Terpenuhinya sarana prasarana Kawasan permukiman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan luas Kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman; 	<p>Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan rehabilitas rumah bencana 	<p>Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestic</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah dan persampahan 	<p>Penanganan persampahan</p>

Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
<p>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi</p>	<p>Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah</p>	<p>Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian</p>	<p>Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi</p>
		<p>Pengembangan peternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi dan peningkatan Kesehatan hewan</p>	<p>Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan Kawasan industry</p>
		<p>Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, Penyediaan sarana prasarana dan pengembangan pola kemitraan</p>	<p>Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemeberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi</p>
		<p>Meningkastkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkastan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk produk unggulan</p>	<p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah</p>

		Pengembangan Kapasitas koperasi dan UMKM	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM
		Mendorong pengembangan industry dan Kawasan industry sesuai dengan potensi daerah	Fasilitasi pengembangan Kawasan industry untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kepariwisataan yang mampu berdaya saing

Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya Investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi • Memeberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan • Peningkatan kapasitas Perusahaan Daaerah guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha-pengusaha 50arge 	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapsitas 50 arget 50 una daerah

Tujuan 4	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan public	Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan 5 target yang terpercaya	Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan system pengawasan yang efektif	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan melalui system akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE
		Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi public melalyui penerapan SOP dan peningkastan SDM	Inovasi penerapan system pelayanan informasi publik
	Meningkatkan kualitas Manajemen ASN	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan pengembangan jabatan fungsional	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes, dan	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa

		pengembangan usaha ekonomi produktif desa	
--	--	---	--

Tujuan 5	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
	Menurunnya pencemaran air dan udara	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara serta tertib hukum lingkungan	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dan imlenerasi PPLH
	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen bencana	Meningkatkan ketahan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan rersiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana)	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholders PRB dan peningkatan partisipasi dalam PRB

Tujuan 6	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Melestarikan seni budaya local	Meningkatnya investasi event seni budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya melalui peningkatan event seni budaya dengan pemberdayaan berbasis adat	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
Mewujudkan kehidupan yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial di Masyarakat	Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan rehalibitasi sarana keagamaan, • peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, • peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan 	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antar umat beragama

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja tahunan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026, yang mencakup indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja daerah dirancang untuk memberikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah. Indikator kinerja ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 tercapai.

Selanjutnya, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun berdasarkan setiap aspek dan fokus bidang urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangannya. Secara teknis, indikator kinerja daerah dirumuskan dengan memilih indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau hasil akhirnya (impact). Indikator kinerja daerah ini dapat disusun berdasarkan analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap pencapaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia										
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	70,266	70,672	71,078	71,484	71,89	72,296	72,296
Sasaran 1 : Meningkatkan Akses Pendidikan										
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,21	9,4	9,6	9,79	9,99	10,18	10,37	10,37
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,07	13,3	13,54	13,77	14,01	14,25	14,25
Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat										
4	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	73,00
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak										
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	86,41	86,66	86,9	87,14	87,39	87,63	87,63
6	Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
Sasaran 4 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Kompeten dan Produktif										
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,45	75,15	75,84	76,54	77,24	77,93	78,63	78,63
Sasaran 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan										
8	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,60	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	85,58
Sasaran 6 : Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial										
9	Penurunan Persentase Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	13,53	12,87	12,21	11,55	10,23	9,57	9,57	9,57
Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman										
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah										

10	Persentase Leterhubungan/Konektivitas Wilayah	Persen	85,84	85,84	86,53	87,22	87,91	88,6	89,29	89,29
Sasaran 7 : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah										
11	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,03	84,81	85,58	86,36	87,13	87,91	88,68	88,68
12	Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	67,23	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	70,59
Sasaran 8: Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman										
13	Persentase Kawasan Pemukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak Kumuh	Persen	78,45	81,58	84,72	87,85	90,99	94,12	97,26	97,26
14	Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	48,33	56,86	59,2	61,54	63,88	66,22	68,79	68,79
15	Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	36,31	39,28	54,28	56,62	58,96	61,3	63,64	63,64
16	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	15,38	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	34,88
Misi 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi										
Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi										
17	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,72	4,9	5,24	5,58	5,91	6,25	6,59	6,59
18	PDRB Perkapita	Rp/Juta/Jiwa/Tahun	60,8470	61,1776	61,5082	61,8388	62,1694	62,5000	62.8306	62.8306
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53	3,53
20	Indeks Gini	Indeks	0,388	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	0,364
21	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,53	13,4	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	12,75
Sasaran 9 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah										
22	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,75	39,89	40,03	40,16	40,30	40,44	40,58	40,58
23	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,24	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	21,54
24	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	11,78	11,80	11,82	11,85	11,87	11,89	11,91	11,91
25	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,18
26	Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
27	Nilai Omset Usaha Koperasi	Rp. Ribu	705.375	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	922.647

Sasaran 10 : Meningkatnya Investasi Daerah										
28	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	11,86	13,49	15,12	16,74	18,37	20,00	21,63	21,63
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Prima										
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien										
29	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,08	50,24	50,40	50,57	50,73	50,89	51,05	51,05
30	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
31	Opini BPK	Kategori	WTP							
Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya										
32	Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	1	1	2	3	3	3	3	3
33	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,3	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,78	1,78
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	3,76
Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN										
35	Indeks Merit System	Indeks	162	177	192	207	222	237	252	252
Sasaran 14 : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa										
36	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5855	0,5946	0,6037	0,6128	0,6128	0,6309	0,6400	0,6400
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana										
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,84	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	63,82
Sasaran 15 : Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang										
38	Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	82,94
Sasaran 16 : Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara										
39	Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	92,58	93,32	94,06	94,8	95,54	96,28	97,02	97,02
Sasaran 17 : Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana										
40	Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,4	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	162,26
Misi 6 : Membangun Peradaban Masyarakat yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Lokal										
Tujuan 6 : Melestarikan Seni Budaya Lokal										
41	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 18 : Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan										
42	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya	Event	0	1	2	3	4	5	5	5

Sasaran 18 : Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan										
43	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	73,92	74,29	74,66	75,03	75,4	75,77	76,14	76,14
Sasaran 19 : Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial										
44	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dengan fokus utama pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun ketiga dalam indikator Kinerja Utama periode tersebut. Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 juga menjadi bahan evaluasi, dengan mempertimbangkan apakah target tahun sebelumnya telah tercapai atau belum. Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam menetapkan target untuk tahun berikutnya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai janji yang akan diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Janji ini dirumuskan berdasarkan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber daya lainnya yang tersedia. Perjanjian ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah.

Adapun tujuan dilakukannya penetapan kinerja terbagi ke dalam beberapa aspek yaitu :

TUJUAN UMUM

Tujuan umum dari penetapan kinerja ini adalah untuk mendorong berbagai terget strategis yang meliputi:

1. Intensifikasi pencegahan korupsi, yaitu dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program agar terhindar dari praktik-praktik korupsi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan, dengan memastikan bahwa mendapatkan layanan yang optimal, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Percepatan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Melalui penetapan kinerja ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.

TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus dari penetapan kinerja ini adalah untuk mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintahan, yang menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah bersama seluruh jajaran satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk menyediakan dasar yang jelas bagi penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi, dengan menciptakan tolok ukur kinerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja aparatur secara menyeluruh. Selain itu, tolok ukur kinerja tersebut juga berfungsi sebagai landasan untuk pemberian penghargaan (reward) bagi aparatur yang berhasil mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan, maupun pemberian sanksi bagi yang tidak mampu memenuhi standar kinerja yang diharapkan, sehingga menciptakan budaya kerja yang lebih efektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Adapun isi perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dalam lampiran laporan ini adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU ASEAN Eng.

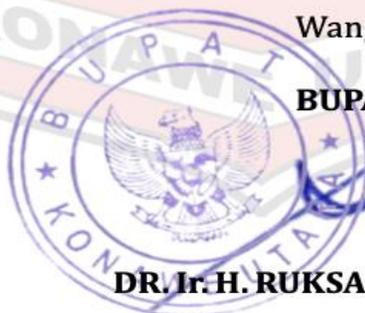
Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Wanggudu, 02 Januari 2024

BUPATI KONAWE UTARA



DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU ASEAN Eng.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,484
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,986
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,774
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,84
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,14
		Kota Layak Anak (Kategori)	Madya
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (Persen)	77,23
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	83,56
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	10,89
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan/ Konektivitas Wilayah (Persen)	87,91
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	87,13
		Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang terlayani jaringan irigasi (Persen)	69,47
2.2.8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	90,99
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	63,88
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	58,96
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	28,38

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,914
		PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	62,169
		Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,618
		Indeks Gini (Indeks)	0,372
		Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,01
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	40,302
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	21,44
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	11,868
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	1,162
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	0,073
		Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	850.223
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	18,372
4.4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	50,728
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	BB
		Opini BPK (Kategori)	WTP
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	3
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektornik) (Indeks)	1,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,62

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System	222
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	0,6218
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	62,16
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	81,96
5.5.16	Menurunkan Tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	95,53
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	165,64
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	100
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	4
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	75,4
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	84,01%	831.463.330
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihilangkan	58%	12.977.463.180
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100%	1.047.439.500
4.	Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	13.096 unit	1.104.975.100
5.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	76,92%	3.909.999.408
6.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan	75,96%	5.366.916.178
		Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	81,15%	
7.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	80 orang	1.076.245.740
8.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	2 hari	751.735.500
9.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	4 situs	809.296.679
10.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	11,775 orang	2.924.139.150
11.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	100%	11.728.600
12.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	100%	379.409.400
13.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	82,06%	2.381.290.450
		Cakupan PUS Unmeetneed	0,05%	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
14.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	77,70%	191.953.400
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	100%	2.284.869.000
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa Siaga Aktif	116 desa	738.788.075
		Jumlah posyandu aktif	165 unit	
		Persentase Rumah Tangga ber PHBS	93%	
		Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	100%	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	66%	2.286.952.030
18.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan	56,52%	2.754.578.364
19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru	0,77%	2.723.014.749
20.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)	95%	423.885.150
21.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	100%	242.291.900
22.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif	11,957 Orang	3.471.798.135
23.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	58,13	1.726.129.800
24.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	73%	602.867.200
25.		Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	1,18	121.236.329.534

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	131	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,2%	
		Prevalensi kasus Stunting	10,4%	
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000	0,32	
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk	131	
		Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	23	
		Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat	6-5 hari	
		Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	75%	
		26.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
Nilai EKPPD	baik			
27.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	408.045.600
28.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	100%	250.574.400
		Persentase penanganan kerawanan pangan	100%	
29.	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	9 desa	10.123.864.617
30.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase isian aplikasi SI-BPB	64%	110.376.715.900
31.	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	100%	17.063.471.916
32.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten	100%	10.000
33.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	100%	349.289.300

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
34.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah WMK	71,2%	512.897.750
35.	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	100%	428.638.210
36.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	81,08%	713.646.490
37.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	40%	1.788.819.400
38.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	367 orang	676.706.000
39.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase MHA yang Terakui	100%	8.985.150
40.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik	8,05%	141.146.450
41.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	37,95%	437.293.860
42.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.928 Kkl/Kapita/Hari 76,85 Gr/Kapita/Hari	224.100.850
43.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	60%	49.900.000
44.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE	5 aplikasi	9.866.599.940
45.	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	27,31%	660.028.100
46.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset pemda yang terinventarisir	90%	6.409.354.450

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
47.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	9.563 KK	3.082.493.200
48.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	45,77 %	3.614.000.000
49.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	18.976 unit	14.420.632.820
50.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	442 izin	116.636.050
		Survey kepuasan masyarakat	79,21%	
51.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	9 OPD	508.297.450
52.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	69%	1.801.760.850
53.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	78,04%	42.220.279.775
54.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu	275.899.240.887
		Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	4,53%	
55.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	100%	5.301.751.162
56.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	35%	806.978.625
57.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM	89%	192.107.091.604
		APK SD	105,79	
		APK SMP	84,13	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
		APM SD	99,07	
		APM SMP	80,45	
		Persentase SD Terakreditasi Minimal B	20,19%	
		Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	47,22%	
58.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas perikanan budidaya	9.060,89	10.433.634.450
		Persentase kelompok pembudidaya yang dibina	80%	
59.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Nelayan yang dilakukan pembinaan	80%	5.986.968.298
		Produktivitas perikanan tangkap	15.419 ton	
60.	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	15,38%	4.556.842.335
61.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Base kependudukan terupdate	1 database	14.385.000
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	2.737,81 Ha	17.544.123.841
63.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	12,58%	815.137.470
64.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif	50%	2.068.189.659
65.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi	4 perbup	23.246.700
66.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	8 cabor	8.004.663.015
67.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	13 organisasi	2.513.357.350

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
68.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	100%	6.808.799.244
69.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan	62%	10.570.424.200
70.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam	5%	66.077.650
71.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	85,74%	662.375.400
72.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	100%	717.854.550
73.	Program Pengembangan Umkm	Jumlah UMKM yang dibina	50 UMKM	277.771.450
74.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	75%	39.455.900
75.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT	14%	22.213.266.696
		Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	100%	
76.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak	65%	432.000.000
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	100%	569.981.000
78.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	2,30 91,57	1.336.893.440
79.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	7,76%	1.218.698.450
80.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan	15,06%	340.480.600

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
81.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	90%	10.026.300
82.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	65%	1.164.121.600
83.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	79,24%	1.416.739.350
84.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	19%	319.946.260
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	3 Hari	2.795.685.092
86.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan	10,60%	5.096.285.688
87.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	60,16	4.450.567.469
		Rasio perawat / 100.000 penduduk	165,44	
		rasio bidan / 100.0000 penduduk	235,17	
		Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit	80%	
88.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa Berkembang	79 Desa	1.500.000.000
89.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	20 kasus	2.390.513.224
90.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	100%	914.316.950
91.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	100%	341.948.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
92.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	90%	10.412.300
93.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	93,64%	42.600.086.050
94.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum	100%	6.365.275.994
95.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat	76,47%	1.439.817.457
		Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	88,24%	
96.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	100%	758.181.808.822
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan	2.335 ton	32.732.465.776
		Jumlah Produksi tanaman Hortikultura	166.356 ton	
		Jumlah Produksi tanaman pangan	108.159 ton	
		Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)	265,856 Kg	
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan	2.335 ton	10.273.217.015
		Produktivitas tanaman pangan	523,58 Kw/Ha	
99.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	609,88 Km	329.668.866.589

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
100.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	38,78%	905.772.045
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	88,50%	
101.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	54,78%	258.153.398
102.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	81,96%	4.365.997.000
103.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	80,62%	4.933.185.350
104.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	55%	491.715.800
105.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%	15.747.450
106.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	100%	24.643.272.550
107.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	100%	2.982.561.267
108.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	95%	2.454.696.492
109.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian	52,12%	663.292.350
110.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi	100%	388.201.510
111.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	100%	25.082.150

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
112.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja	100%	33.570.000
113.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan	95,63%	2.754.385.150
		Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	100%	
		Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	22,27%	
114.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	30%	48.955.000
115.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	36,01%	549.496.200
116.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	28,41%	116.540.550
117.	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti	1 orang	630.473.750
118.	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan/ditangani	1 orang	828.452.600
119.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	76,83 Ha	3.000.102.000
120.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	2.015.148.950
121.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp. 232,32 Milyar	181.094.000
122.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	40%	2.177.900.235
123.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien	10 sertifikat	106.416.000
		Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat	15 rekomendasi	
		Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit	80%	
124.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitasi jenis barang penting	50%	2.120.106.742
125.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	52,12%	342.752.450

ANGGARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Jumlah Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Rp. 2.106.854.521.312,00 terdiri dari 125 Program, 670 Kegiatan dan 2458 Sub Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk melakukan penilaian, analisis, dan penyampaian informasi secara sistematis mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan target mengenai keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh instansi Pemerintah Daerah dalam menjalankan visi dan misi yang telah dirumuskan. Akuntabilitas ini dilakukan secara terukur berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja kepala daerah, sehingga mampu menunjukkan sejauh mana komitmen dan tanggung jawab instansi dalam merealisasikan rencana yang telah disusun. Selain itu, akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja, tujuan, dan sasaran yang telah direncanakan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, proses ini mempermudah pihak-pihak terkait dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memberikan dasar yang kokoh untuk melakukan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan demi tercapainya hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran difokuskan pada evaluasi kinerja hasil (outcome) dengan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan, serta mencermati pola peningkatan atau penurunan kinerja. Proses ini juga mencakup identifikasi alternatif target yang telah diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Sementara itu, pengukuran kinerja kegiatan diarahkan pada evaluasi kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis program atau kegiatan yang berkontribusi pada keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta memberikan predikat tertentu berdasarkan hasil kinerja yang dicapai yaitu sebagai berikut :

> 95%-100%	Sangat Berhasil
> 80%-95%	Berhasil
> 50%-80%	Cukup Berhasil
<50%	Kurang Berhasil

Dari total 44 indikator kinerja yang mendukung pencapaian 19 sasaran strategis, terdapat sejumlah indikator kinerja yang telah memenuhi target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan dan dapat dikategorikan sebagai cukup berhasil hingga sangat berhasil. Namun, terdapat pula beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan atau dinilai kurang berhasil dalam realisasinya.

Pengukuran kinerja merupakan terget penting yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis telah berhasil direalisasikan. Pengukuran ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai target keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dirancang sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, khususnya dalam konteks pencapaian target sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja sasaran ini dinilai berdasarkan realisasi sejumlah indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi wujud nyata dari upaya pencapaian sasaran strategis serta bagian dari tahap pertama target tahunan daerah. Keberhasilan dalam merealisasikan capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan akan memberikan pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap

keberhasilan pencapaian kinerja masing-masing sasaran 78target78unan yang telah dirumuskan.

RINGKASAN CAPAIAN TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi Kinerja sebesar 78,17% dan capaian kinerja 108,21% Sedangkan indikator yang masih dianggap belum memenuhi target yang ditetapkan adalah Harapan Lama Sekolah dengan realisasi sebesar 13,13% dari capaian kinerja 95,32%

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Terdiri dari 2 (dua) sterategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Ada pun indikator kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya: Persentase Perhubungan/Konektifitas Wilayah dengan realisasi indikator kinerja sebesar 87,91% dan capaian kinerja 100%.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja dimana dua indikator tersebut melebihi target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian kinerja 150,83% dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan belum mencapai target yang diharapkan dengan capaian kinerja 74,97% sehingga inilai cukup Berhasil.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemeintah yang Efeskif dan Efesien

Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut melebihi target yaitu indeks Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kerja 101% dan indikator kinerja Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai capaian kinerja 175,92% walaupun mengalami penurunan nilai pada tahun sebelumnya tetapi nilai cukup berhasil. Sedangkan

indikator kinerja Nilai SAKIP belum melampaui 79 target yang telah diterapkan yaitu bernilai B.

Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja dimana indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melebihi target dengan capaian kinerja 101,49% dan indikator kinerja indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja 104,31% sehingga dinilai cukup Berhasil.

Tujuan 6 : Melestarikan seni dan Budaya local

Terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja tersebut melebihi target yang telah diterapkan yaitu Jumlah Penyelenggaraan Event dengan capaian kinerja 100% dan indikator kinerja persentase pengelolaan Potensi Konflik sosial mencapai kinerja 100% sehingga dinilai cukup berhasil.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Perjanjian kinerja Tahun 2024

CAPAIAN INDIKATOR MAKROTAHUN 2024

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	13,01	13,17	98,78
Pertumbuhan Ekonomi	5,91	5,74	97,28
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,62	2,4	150,83
Indeks Pembangunan Manusia	71,484	72,32	101,16

CAPAIAN IKU TAHUN 2024

Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Daya Saing dan Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,484	72,32	101,16
		Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,99	9,61	96,23
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,77	13,13	95,32
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Anga Usia Harapan Hidup	Tahun	71,84	69,78	97,13
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,14	87,24	100,11
			Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Pratama	Pratama
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,24	78,17	108,21
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,56	80,2	95,98
Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	10,23	9,58	98,6		
Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan Infastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman							
2	Meningkatkan Kualitas Infastruktur Wilayah		Persentase Keterhubungan Konektifitas Wilayah	Persen	87,91	87,91	100
		Meningkatnya Kapasitas Infastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	87,13	87,13	100
			Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	69,47	69,47	100
		Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan Pemukiman (perkotaan/Perdesaan) yang Tidak Kumuh	Persentase	90,99	90,99	100
			Rasio Akses Minuman Layak	Persen	63,88	63,88	100
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	58,96	58,96	100

			Cakupan Layanan Persampahan	Persen	28,38	14,83	52,25	
Misi 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi								
3	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,91	5,74	97,28	
			PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa /Tahun	62,1694	5707,11	91,79	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,618	2,4	150,83	
			Indeks Gini	Indeks	0,372	0,330	88,7	
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,01	13,17	98,78	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	40,30	39,7	98,51
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,44	22,87	106,66	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	11,868	8,9	74,97	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,16	1,15	99,13	
			Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,07	0,07	100	
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Persen	850,223	897.000	105,5	
		Meningkatnya Investasi Daerah		Pertumbuhan Investasi PMBDN dan PMA	Persen	18,37 (2,24 Triliun) 18,37	1,16 Triliun 15,56	51,87
	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Prima							
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,73	51,24	101	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai SAKIP	Kategori	BB	B	B
				Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya		Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	3	3	100
				Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,62	2,85	175,92
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,62	3,62	100
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian		Indeks Merit System	Indeks	222	225

		Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6128	0,6128	100	
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana								
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,16	63,09	101,49	
		Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	81,96	81,96	100	
		Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	95,54	96,58	101,08	
		Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	165,64	172,78	104,31	
Misi 6 : Membangun Peradaban Masyarakat yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Lokal								
6	Melestarikan Seni dan Budaya Lokal		Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina	Persen	100	100	100	
		Meningkatnya Investasi Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya	Nilai	4	4	100	
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-nilai Kerukunan Beragama	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	75,4	74,2	98,4
				Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

PENGUKURAN KINERJA DIBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET AKHIR RPJMD

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

IKU-1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi utama yang menjadi dasar dalam perhitungan, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir; pengetahuan, yang dihitung berdasarkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta standar hidup layak, yang diukur menggunakan pendapatan per kapita.

Dalam tiga tahun terakhir, IPM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren peningkatan meskipun kenaikannya tergolong tidak terlalu signifikan. Realisasi IPM pada tahun 2022 tercatat sebesar 71,10%, meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,11%, dan pada tahun 2024 mencapai 72,32%. Hal ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,484%, dengan capaian kinerja indikator mencapai 101,16%, yang tergolong dalam kategori sangat berhasil. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten Konawe Utara berada pada kategori tinggi di atas 70 poin, bersama dengan empat daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Konawe. Selain itu, terjadi peningkatan sebesar 0,21% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan progres positif dalam pembangunan manusia di wilayah ini.

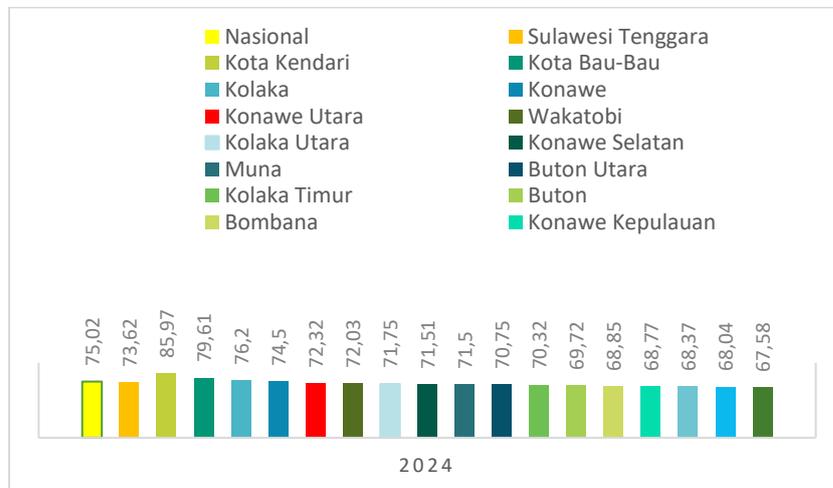
Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pemabangunan Manusia Tahun 2022-2024





Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian IPM pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di atas target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 100,03%.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemabangunan Manusia Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih berada di bawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan, dimulai dari 71,10 pada tahun 2022 hingga mencapai 72,32 pada tahun 2024. Untuk pertama kalinya, Kabupaten Konawe Utara masuk dalam kategori tinggi ($70 < IPM < 80$). Diharapkan pada tahun 2022 dan seterusnya, IPM dapat mencapai kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD 2021-2026. Pencapaian ini dapat diraih dengan melaksanakan pembangunan yang berdampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Meskipun sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan, IPM



Kabupaten Konawe Utara masih memiliki potensi untuk terus ditingkatkan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: peningkatan laju pertumbuhan Indeks Kesehatan dengan lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan akses terhadap sarana kesehatan yang memadai, penyediaan air

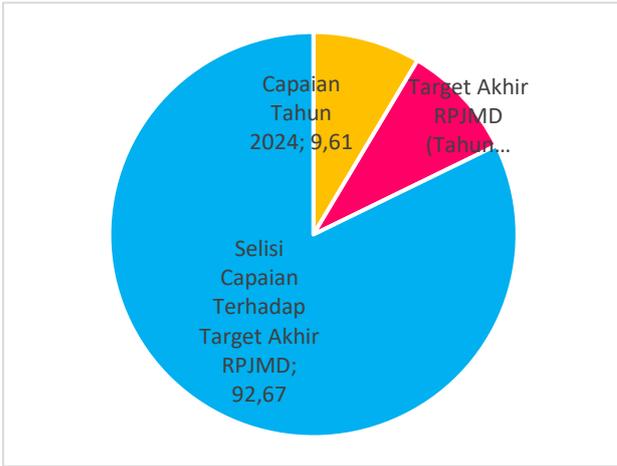
bersih, fasilitas MCK, serta peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal. Kemudian, peningkatan laju pertumbuhan Indeks Pengetahuan juga harus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, memastikan bahwa semua anak usia sekolah (SD-SLTP) dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhenti di tengah jalan. Selain itu, peningkatan laju pertumbuhan Indeks Pengaturan dapat dicapai dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pengeluaran per kapita, pembukaan lapangan usaha baru, dan program-program sosial dari pemerintah, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Pendidikan

IKU-2 Rata-Rata Lama Sekolah



Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh berbagai jenjang pendidikan formal yang telah dijalani sepanjang hidup mereka. Di Kabupaten Konawe Utara, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022, angka ini tercatat mencapai 9,53 tahun, pada tahun 2023, angka yang sama tetap tercatat di 9,53 tahun. Untuk tahun 2024 mencapai 9,61 tahun.



Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam minat masyarakat, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun begitu, angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP), yang berarti masih ada

tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA atau pendidikan tinggi.

Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022-2024

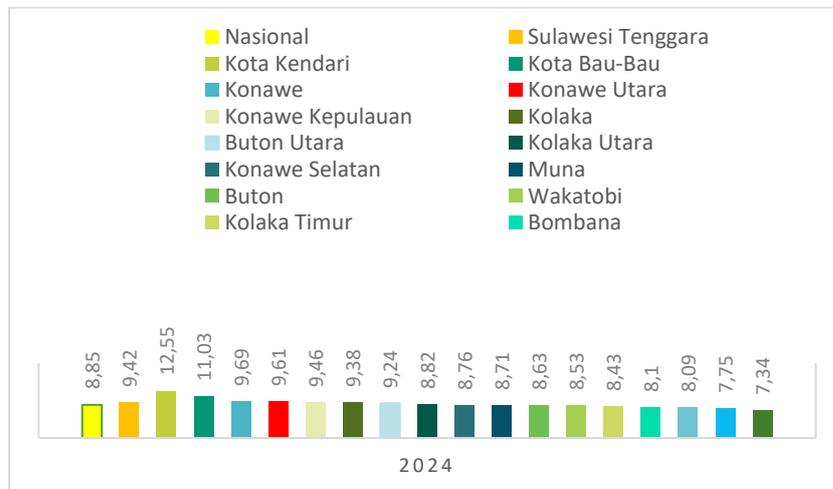


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 adalah 9,61 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 9,60 tahun. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Konawe Utara pada peringkat ketiga di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya di bawah Kota Kendari dan Kota Baubau. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, rata-rata lama sekolah hampir mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024, dengan selisih hanya 0,97 tahun dari target yang

sebesar 9,961tahun. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 96,33%.

Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Rata-rata Lama Sekolah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Peningkatan signifikan dalam rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak dapat dipisahkan dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi angka putus sekolah, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam sektor pendidikan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai kebijakan yang sangat berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat dasar hingga menengah, salah satunya adalah pemberian beasiswa untuk siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program Beasiswa Konasara yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak siswa dapat terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa terbebani oleh



masalah biaya, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara.

IKU-3 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi perkembangan sektor pendidikan di berbagai jenjang, yang menggambarkan lama pendidikan (dalam satuan tahun) yang diharapkan dapat diraih oleh setiap anak. Dalam hal ini, angka ini memberikan gambaran tentang harapan pemerintah dan masyarakat terhadap potensi pencapaian pendidikan bagi generasi mendatang.

Namun, meskipun ada perkembangan yang signifikan, pencapaian rata-rata lama sekolah di kalangan penduduk usia 15 tahun yang menjadi target belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2024, target harapan lama sekolah ditetapkan sebesar 13,77 tahun, tetapi pada tahun 2022, pencapaian harapan lama sekolah baru mencapai 13,11 tahun. Pada tahun 2023, capaian ini sedikit meningkat menjadi sekitar 13,12 tahun. Meskipun demikian,

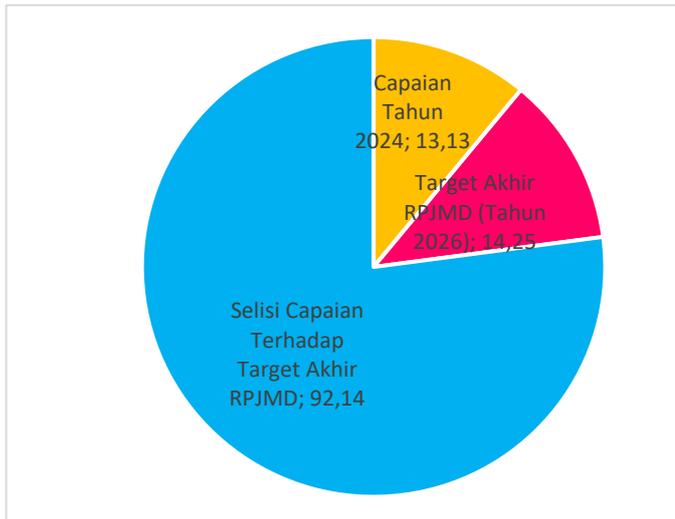


pada tahun 2024, meskipun capaian rata-rata-harapan lama sekolah belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 13,13 tahun, realisasi yang tercatat sebesar 95,32% masuk dalam kategori “Sangat Berhasil, menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024

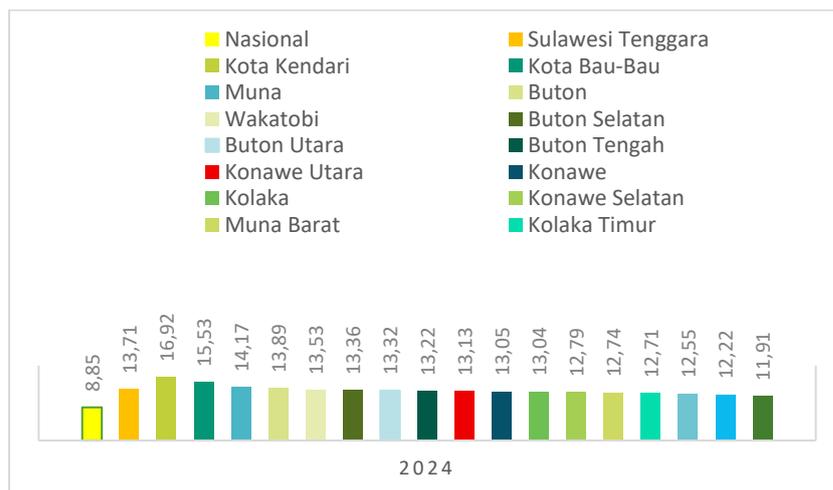


Pencapaian antara tahun 2022 hingga 2024 sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut cenderung stabil dan selalu berada di atas angka 90%. Posisi Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) Kabupaten Konawe Utara berada pada urutan ke-5 di antara kabupaten/kota se-Sulawesi



Tenggara, dengan realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian provinsi dan nasional. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 92,14%.

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Harapan Lama Sekolah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, yang sebesar 10,37 tahun, rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Di harapkan, pencapaian ini akan tercapai pada akhir periode RPJMD pada tahun 2026. Peningkatan Angka



Harapan Lama Sekolah ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah yang memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU-4 Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin panjang usia harapan hidup di suatu daerah, semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat, mencakup aspek gizi, serta kualitas lingkungan hidup.

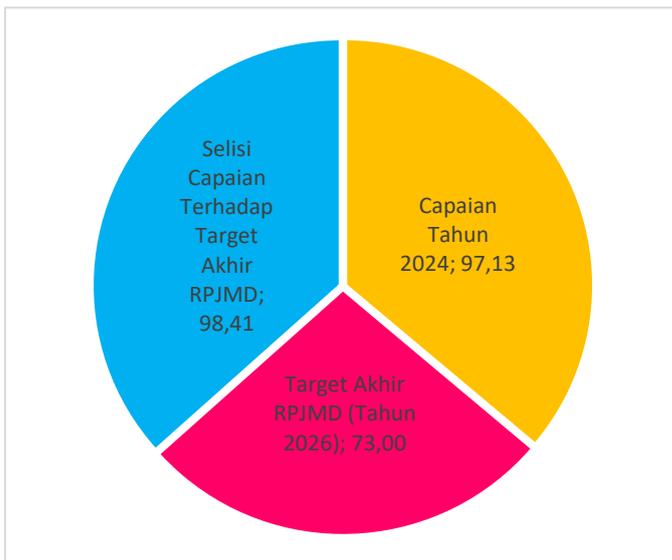
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022-2024





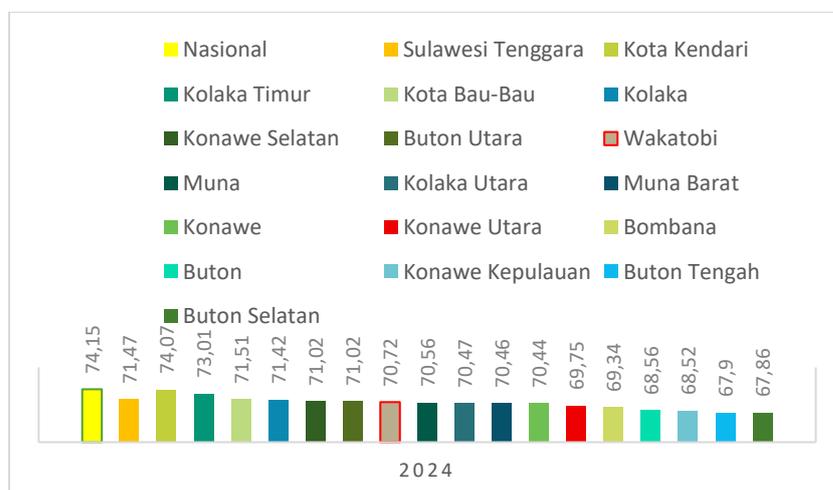
Cakupan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat tercatat meningkat, dengan usia harapan hidup pada tahun 2022 sebesar 69,59 tahun, pada tahun 2023 meningkat menjadi 69,68 tahun, dan pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 69,78 tahun. Meskipun demikian, angka ini belum berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang tercatat

sebesar 69,75%. Capaian tersebut mencapai 97,13% dari target yang ditetapkan, dan meskipun belum sepenuhnya memenuhi target, pencapaian ini tetap berada dalam kategori “Sangat Berhasil”



Jika dibandingkan dengan targetakhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Angka Usia Harapan Hidup cenderung meningkat dari tahun sebelumnya dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 98,41%.

Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Angka Harapan Hidup Saat Lahir - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))



Pencapaian Tahun 2022-2024 sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. Dengan capaian cenderung menurun namun selalu diatas 97%. Posisi capaian angka Usia Harapan Hidup Konawe Utara menempati urutan ke-3 untuk Kabupaten/Kota se Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional.

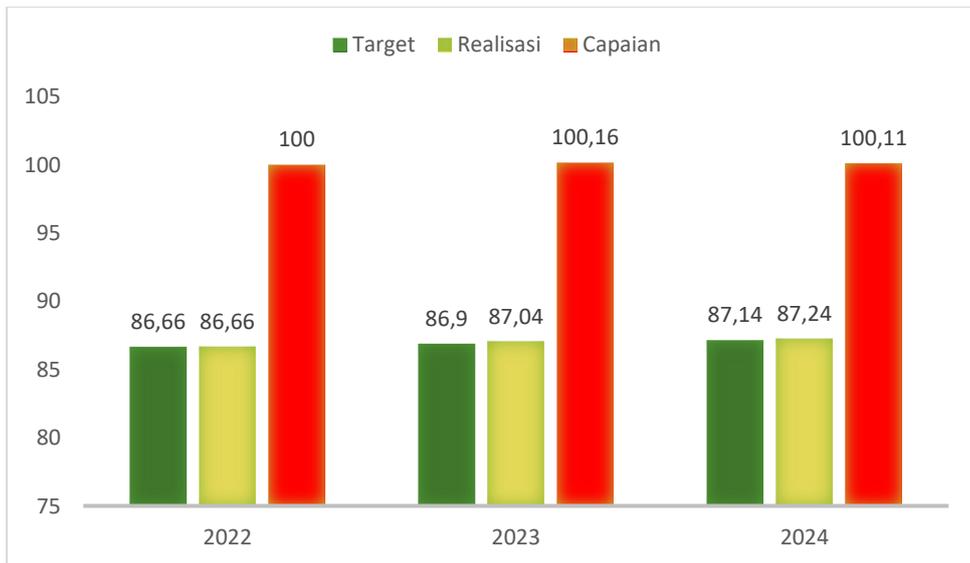
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

IKU- 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan sebuah indeks komposit yang terdiri dari berbagai variabel yang menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 86,66%, pada tahun 2023 naik menjadi 87,04%, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan lebih lanjut sebesar 87,24%. IPG Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 87,14%, dengan realisasi 100,11%, yang berada dalam kategori sangat berhasil.

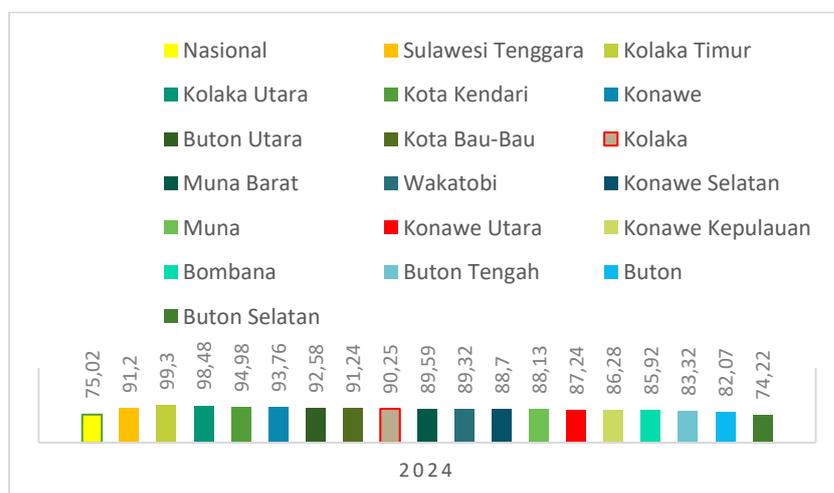


Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022-2024



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Indeks Pembangunan Gender (IPG) cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 99,80%.

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Indeks Pembangunan Gender \(IPG\) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Pencapaian antara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 telah tercapai, dengan hasil yang cenderung meningkat selama dua tahun terakhir dan selalu berada di atas 100%. Posisi Kabupaten Konawe Utara dalam hal capaian Indeks Pembangunan Gender menempati urutan ke-12 di antara kabupaten dan kota se-Sulawesi

Tenggara, meskipun realisasinya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian di tingkat provinsi, Sulawesi Tenggara, dan nasional.



IKU- 6

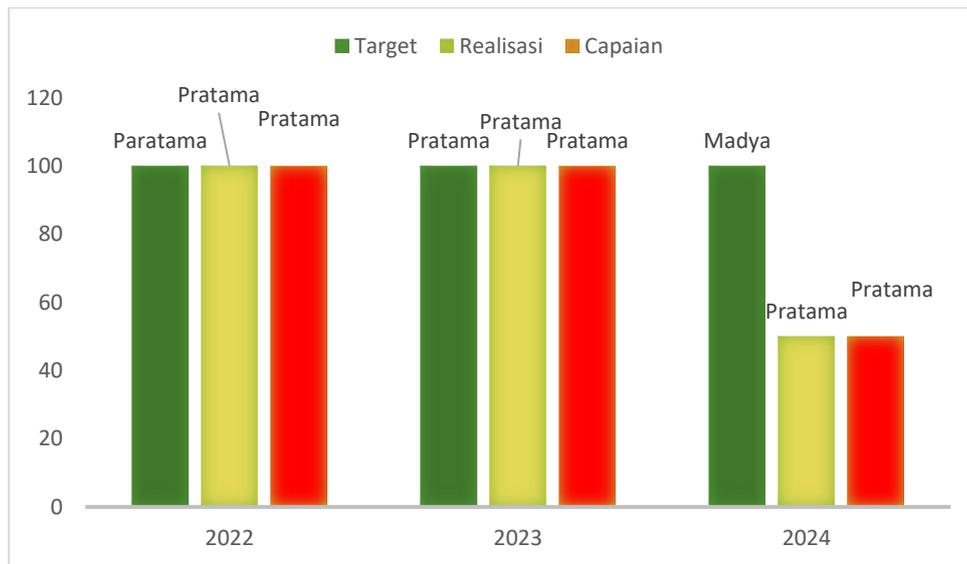
Kota Layak Anak



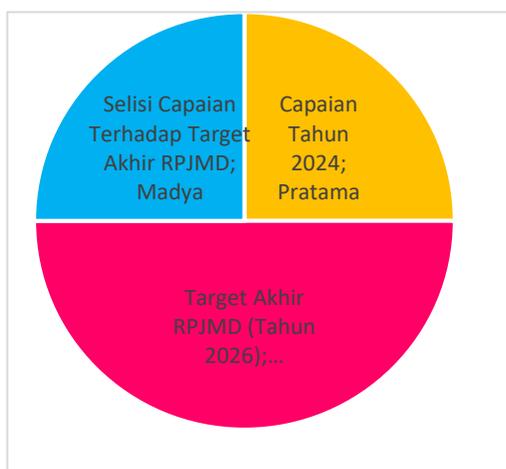
Istilah "Kota Layak Anak" dan "Kota Ramah Anak" sering kali digunakan secara bergantian oleh beberapa ahli dan pejabat untuk menggambarkan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak dalam pembangunan daerah. Hal ini bertujuan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat perhatian yang optimal dan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Implementasi ini tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah anak, tetapi juga menciptakan kebijakan dan program yang secara langsung menguntungkan kesejahteraan anak.

Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Kota Layak Anak Tahun 2022-2024



Di Kabupaten Konawe Utara, status Kota Layak Anak pada tahun 2022, 2023, dan 2024 berada pada kategori Pratama, yang menunjukkan bahwa pencapaian ini belum memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu madya dengan hasil yang cukup berhasil. Status ini mencerminkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memperbaiki kondisi bagi anak-anak di wilayah tersebut, meskipun belum mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pencapaian ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Kota Layak Anak belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 50%

Namun, dengan melihat pencapaian yang ada selama periode 2022 hingga 2024, diharapkan pada tahun 2025-2026, Kabupaten Konawe Utara dapat melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kepada anak-anak untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu kategori Madya. Hal ini akan memperkuat komitmen daerah untuk menjadi tempat yang semakin layak dan ramah bagi anak-anak, serta mendukung pengembangan mereka di masa depan.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja

IKU- 7 Partisipasi Angkatan Kerja



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk yang berada dalam kelompok usia kerja. TPAK berfungsi sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar keterlibatan angkatan kerja dalam aktivitas dunia kerja, serta memberikan gambaran tentang tingkat kesulitan yang dialami oleh angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan. Dengan kata lain,

TPAK menunjukkan seberapa banyak individu dalam kelompok usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam mencari atau menjalani pekerjaan.

Pada Kabupaten Konawe Utara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 71,64% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 70,75% pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, TPAK mencapai angka 78,17%. Pencapaian ini berada di atas target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 77,24% dengan realisasi capaian yang mencapai 108,21%. Ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tetap berada dalam kategori sangat berhasil. Hal ini mencerminkan upaya yang telah dilakukan dalam



meningkatkan partisipasi angkatan kerja, meskipun terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi.

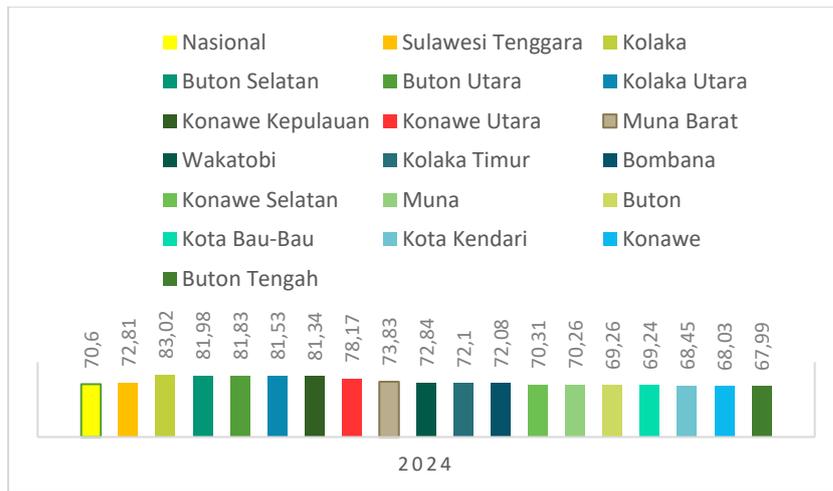
Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022-2024



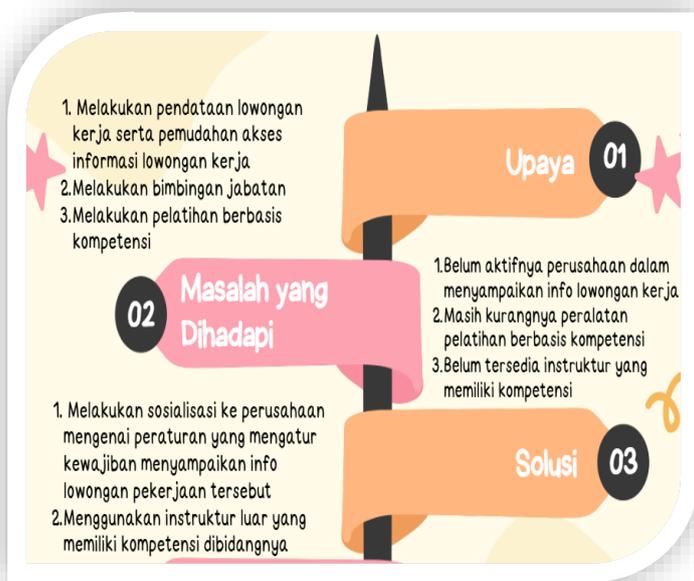
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Partisipasi Angkatan Kerja cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 99,41%.



Grafik 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara ([Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja \(TPAK\) Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))



Posisi capaian TPAK Kabupaten Konawe Utara menempati urutan ke-2 untuk Kabupaten/kota se-Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional. TPAK Kabupaten Konawe Utara masih menunjukkan angka yang sebanding dengan wilayah lainnya, dengan harapan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan oleh

pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja lebih lanjut di masa mendatang.

Sasaran 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan

IKU- 8 Skor Pola Pangan Harapan

Program Pemanfaatan Kebun Pekarangan (PPKP) merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Program ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan membantu menekan laju inflasi di wilayah tersebut. PPKP telah disosialisasikan secara luas ke seluruh

wilayah Kabupaten Konawe Utara, dengan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan di tingkat komunitas.



Melalui program ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang tidak terpakai untuk menanam berbagai jenis tanaman produktif. Saat ini, kelompok tani binaan yang terlibat dalam program ini telah berhasil memulai penanaman berbagai komoditas seperti semangka dan melon. Keberhasilan tahap awal ini akan dilanjutkan dengan rencana penanaman komoditas lain

seperti kangkung, sawi, bayam, hingga cabai, Selain tanaman tersebut, juga terdapat tanaman lain seperti jagung, tomat, labu, kacang panjang, dan ubi jalar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi pangan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi rumah tangga peserta program.

Grafik 3.14 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022-2024



Pola pangan harapan merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan di Ksbupaten Konawe Utara pada tahun 2022 mencapai 82,03% dan tahun 2023 mencapai 84,3% dan tahun 2024 mencapai 80,20 dari target 83,56% dengan relaisasi 95,96% dengan kategori “Sangat Berhasil”.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Skor Pola Pangan Harapan cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 93,71%.

Dengan memanfaatkan kebun pekarangan, program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah melalui kelompok tani binaan menjadi kunci keberhasilan program ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.



Sasaran 6: Meningkatnya Ketahanan Pangan

IKU- 9

Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)



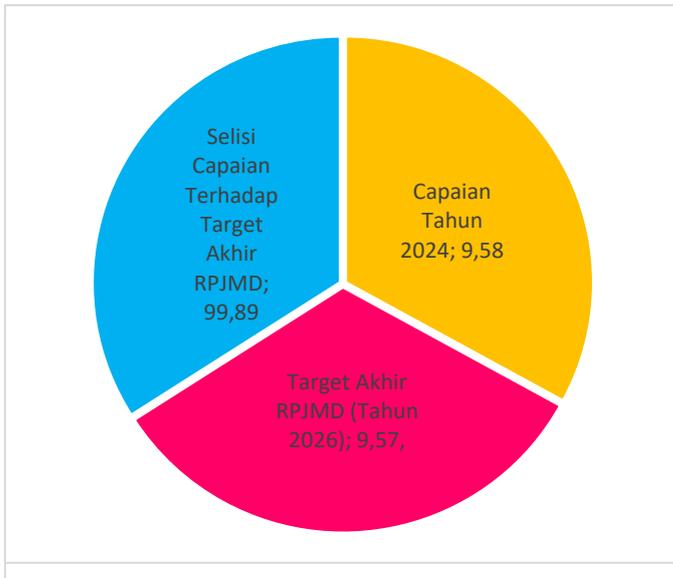
Program penurunan persentase warga miskin merupakan salah satu inisiatif strategis daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini juga mendapat dukungan tambahan dari dana APBN, dengan sasaran utama keluarga miskin dan rentan. Fokus dari program ini mencakup tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Presentase Penurunan Warga Miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022-2024



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program ini, indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah Tingkat Kemiskinan (%). Seperti yang dijelaskan dalam tabel kinerja, realisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,35%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 10,17%. Untuk tahun 2024, tingkat kemiskinan menunjukkan capaian yang lebih signifikan dengan angka

pencapaian indikator mencapai 98,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,58%.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Persentase Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 99,89%.

Penurunan persentase

tingkat kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti semakin kecil angka tingkat kemiskinan, semakin baik kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Prestasi ini juga menunjukkan bahwa capaian program berada dalam kategori "Sangat Baik" karena tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan keberhasilan ini, pemerintah daerah diharapkan terus melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin untuk menjaga momentum penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.



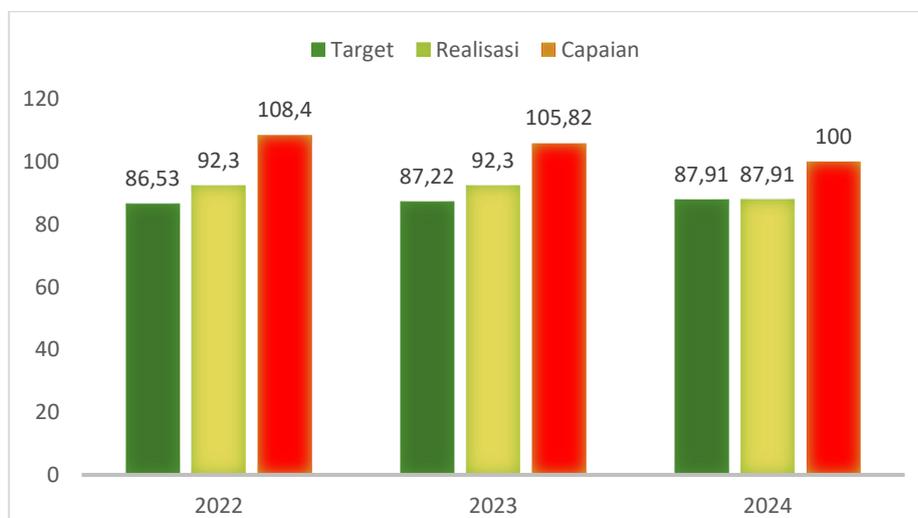
MIISI 2 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah

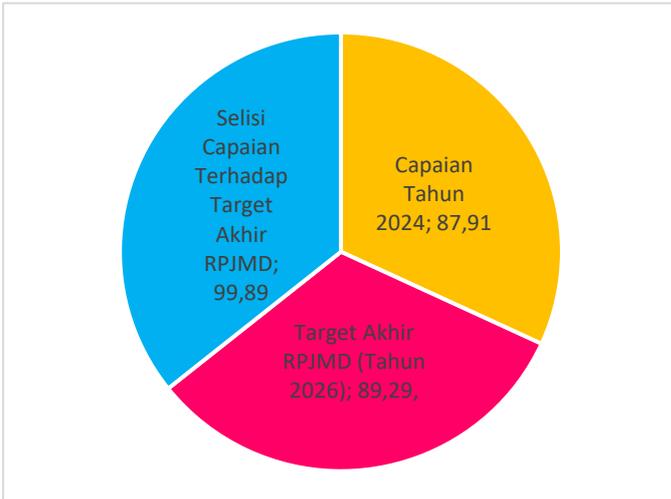
IKU-10 Persentase Keterhubungan/Konektivitas Wilayah

Konektivitas wilayah adalah kemampuan suatu wilayah untuk terhubung dengan wilayah lain secara fisik, ekonomi, sosial, dan teknologi melalui berbagai jaringan, seperti infrastruktur transportasi, komunikasi, dan logistik. Konsep ini mencakup kemudahan dan efektivitas aliran barang, jasa, informasi, dan manusia antara wilayah yang berbeda

Grafik 3.16 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Persentase Konektivitas Wilayah Tahun 2022-2024



Berdasarkan evaluasi kinerja terkait Peningkatan Kapasitas Infrastruktur, indikator Keterhubungan Wilayah menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase keterhubungan mencapai 92,30%, sementara pada tahun 2024 angkanya meningkat lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 87,91%, dengan capaian mencapai 100%. Hasil ini tergolong dalam kategori “Sangat Berhasil”.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Persentase Konektifitas Wilayah memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 98,45%.

Dengan adanya konektivitas wilayah, masyarakat di Kabupaten Konawe Utara merasakan berbagai dampak positif, antara lain:

1. Kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian atau memindahkan barang;
2. Kelancaran dalam perjalanan masyarakat dari daerah asal ke tujuan;
3. Akses yang lebih mudah untuk melakukan interaksi sosial maupun kegiatan politik;
4. Peningkatan kemudahan dalam menjalankan aktivitas perekonomian.



Sasaran 7: Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah

IKU- 11

Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap

Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap adalah indikator yang menunjukkan persentase panjang jalan dan jembatan di suatu wilayah yang berada dalam kondisi baik dan layak digunakan dibandingkan dengan total panjang jalan dan jembatan yang ada.

Grafik 3.17 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dengan indikator Proporsi jalan dan jembatan dalam keadaan Mantap seperti yang tergambar pada tabel di atas, bahwa realisasi kinerja indikator padatahun 2022 sebesar 88,73 tahun 2023 sebesar 89,52% dan tahun 2024 sebesar 87,13% yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 87,13% dengan angka capaian sebesar 100% Angka capaian untuk

indikator proporsi jalan termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Keadaan Mantap memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir

periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 98,25%.



Pada tahun 2024, total panjang jaringan jalan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara mencapai 699,94 kilometer. Jaringan jalan ini terdiri dari berbagai jenis permukaan, dengan rincian sebagai berikut: jalan beraspal mencakup 125,96 kilometer, jalan apen sepanjang 17,89 kilometer, jalan tanah sejauh 556,09 kilometer.

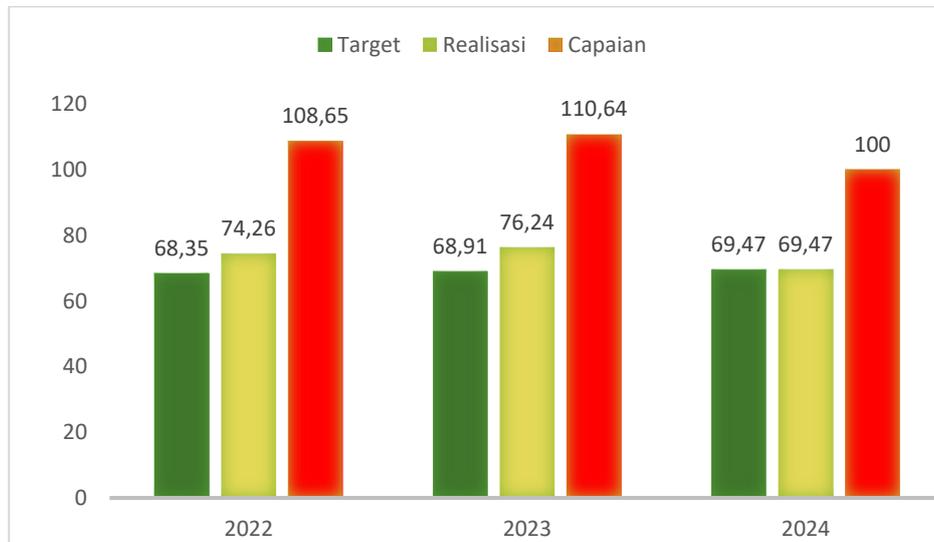
Jika ditinjau berdasarkan kondisi jalan, sebanyak 137,77 kilometer dari total panjang jalan berada dalam kondisi baik, sementara 16,7 kilometer berada dalam kondisi sedang. Selain itu, 253,23 kilometer jalan mengalami kerusakan ringan, dan sekitar 292,24 kilometer lainnya berada dalam kondisi rusak berat. Hal ini menunjukkan variasi kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut, yang mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi lokal.

IKU- 12

Presentase Darha Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi

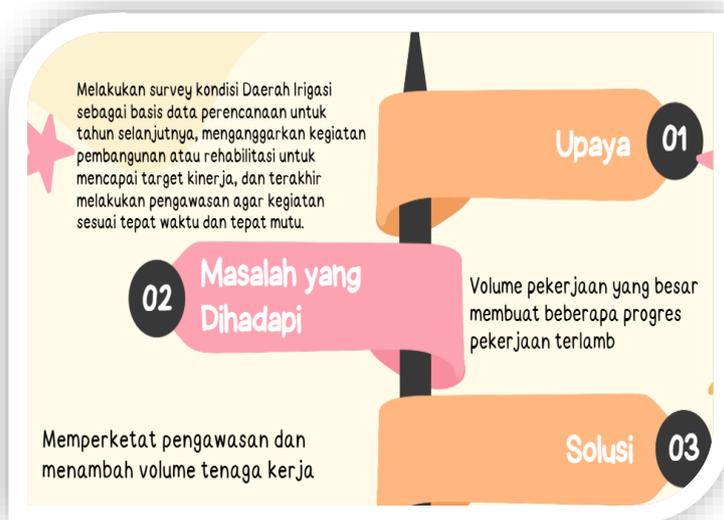
Dalam pengelolaan jaringan irigasi, keberhasilan dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri dapat diukur dengan melihat sejauh mana saluran irigasi dapat memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, sementara efektivitas diukur berdasarkan kondisi saluran irigasi yang masih terpelihara dengan baik. Hingga tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki 22 daerah irigasi dengan total luas mencapai 3.941 hektar. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2024, kondisi jaringan irigasi primer yang berada dalam kondisi baik mencakup 75,34% atau sekitar 8.683,10 meter, sedangkan untuk irigasi sekunder, persentasenya mencapai 75,22% atau sekitar 1.569,80 meter. Selain itu, capaian saluran irigasi yang berada dalam kondisi baik selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga 2024, dapat dilihat lebih rinci pada grafik berikut.

Grafik 3.18 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Presentase Darha Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi Tahun 2022-2024



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi cenderung menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 mencapai 74,26%, di tahun 2023 mencapai 76,24 dan tahun 2024 mencapai 69,47 atau sebesar 100% dari target yang diharapkan.

Meskipun mengalami penurunan namun indikator ini masuk dalam kategor “Sangat Berhasil” dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 98,41%.



Sasaran 8 : Terpenuhi Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman

IKU- 13

Persentase Kawasan Pemukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak Kumuh

Pemukiman yang tidak kumuh adalah kawasan permukiman yang memenuhi kriteria atau standar yang layak huni, aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya. Pemukiman ini dapat dicirikan dengan fasilitas dasar yang memadai, lingkungan yang teratur, serta akses yang baik terhadap berbagai layanan publik seperti air bersih, sanitasi, jalan yang baik, dan jaringan listrik. Pemukiman yang tidak kumuh memberikan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Presentase Permukiman yang tidak Kumuh Tahun 2022-2024



Pada tahun 2022, capaian indikator rata-rata untuk penanganan kawasan permukiman kumuh mencapai 78,45%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 92%. Untuk tahun 2024 realisasi capaian sebesar 90,99% atau sebesar 100%. Hal ini berarti, indikator tersebut berada pada kategori “Sangat Berhasil”



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Persentase Permukiman yang tidak Kumuh cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 93,55%.



Berdasarkan analisis menggunakan data satelit yang diperbarui dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di daerah ini tercatat sebesar 2.450,45 hektar. Sementara itu, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara telah ditetapkan melalui SK Bupati Konawe Utara Nomor

397/2019 tentang Penetapan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan total luas mencapai 112,669 hektar, yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Lebih lanjut, hasil verifikasi yang dilakukan dalam kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara adalah 528,13 hektar. Oleh karena itu, dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah ini, data yang ada menjadi acuan utama.

IKU- 14 Rasio Akses Air Minum Layak

Penyediaan air minum di Kabupaten Konawe Utara dilakukan melalui kerjasama antara PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) dengan pemerintah setempat. Dalam upaya menangani daerah-daerah yang rawan kekeringan dan yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM, selama lima tahun

terakhir telah dibangun fasilitas Hidran Umum (HU) dan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Di kawasan perkotaan, dibangun pula Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat setempat.

Sebagian besar sumber air minum berasal dari air tanah, yang meliputi baik sumur gali (air tanah dangkal) maupun sumur dalam, serta air dari PDAM. Sekitar 9,57% penduduk menggunakan sumur gali, baik yang terlindungi maupun tidak terlindungi, sementara 40,39% lainnya mengandalkan mata air, baik terlindungi maupun tidak terlindungi. Sebagian kecil, yaitu sekitar 0,59%, menggunakan air dalam kemasan, dan hanya sekitar 2,47% penduduk yang menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam.

Grafik 3.20 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Rasio Akses Air Minum Layak Tahun 2022-2024



Pengukuran pada indikator Rasio Akses Air Minum layak juga mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024 dimana tahun 2022, mencapai 66,73 ditahun 2023 sebesar 87,90% dan tahun 2024 mencapai 63,88% dari target yang telah ditentukan sebesar 63,88% atau sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Rasio Akses Air Minuman Layak memenuhi target yang telah ditentukan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 92,86%.



IKU- 15 Rasio Akses Sanitasi Air Layak

Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan dua kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena keduanya langsung berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sanitasi yang layak mengacu pada fasilitas yang memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan, yang dapat digunakan oleh rumah tangga secara mandiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Fasilitas sanitasi yang layak ini biasanya dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, yang merupakan jenis kloset yang lebih higienis dan dapat mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, fasilitas sanitasi yang baik juga mencakup tempat pembuangan akhir

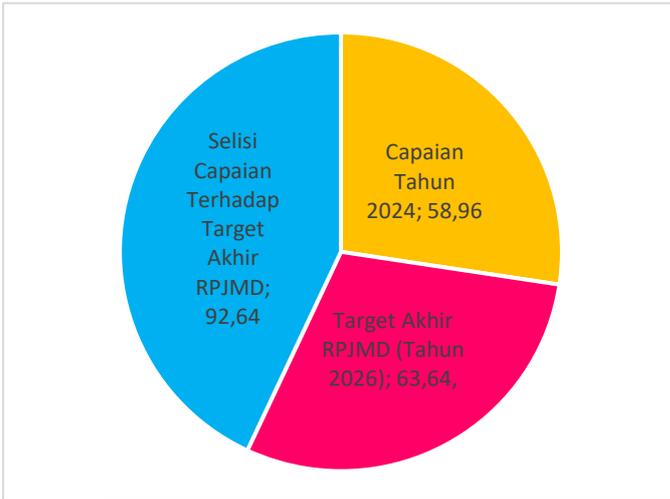
tinja berupa tangki septik, yang berfungsi untuk mengolah limbah tinja agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sanitasi yang dimaksud bisa berada di dalam rumah, halaman rumah, atau fasilitas komunal yang dapat diakses bersama oleh beberapa rumah tangga. Yang terpenting, fasilitas sanitasi tersebut harus terjangkau, artinya jaraknya harus dekat dengan tempat tinggal dan dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh anggota keluarga, sehingga memastikan semua individu dalam rumah tangga tersebut dapat menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan optimal.

Grafik 3.21 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Rasio Akses Sanitasi Air Layak Tahun 2022-2024

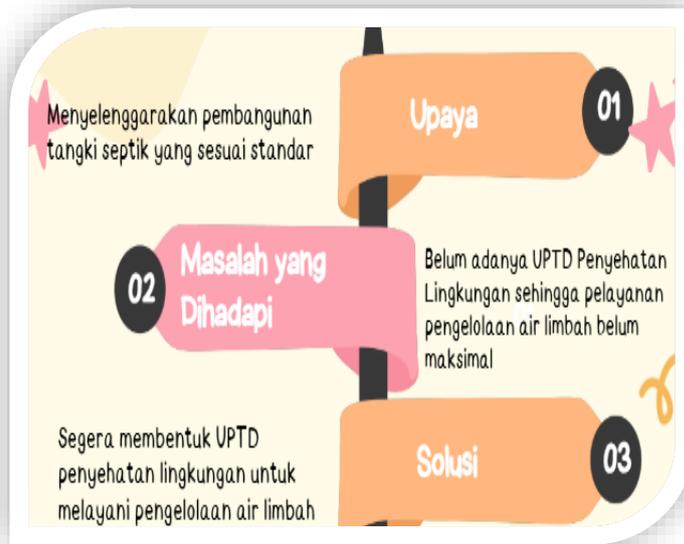


Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Konawe Utara telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak. Pada tahun 2022, sekitar 77,90% penduduk Kabupaten Konawe Utara sudah memiliki akses ke sanitasi yang memenuhi standar tersebut. Angka ini terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2023, persentase penduduk yang memiliki akses ke sanitasi layak mencapai 82,74%. Di tahun 2024, diharapkan angka ini akan terus meningkat, dengan target yang telah ditetapkan sebesar 58,96%. Pencapaian ini cukup membanggakan dan dinilai dengan kriteria yang “Sangat Berhasil”, karena sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.





Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Rasio Akses Sanitasi Layak memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 92,64%.



Program utama yang telah dijalankan untuk mencapai keberhasilan ini adalah program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya sanitasi yang baik dan

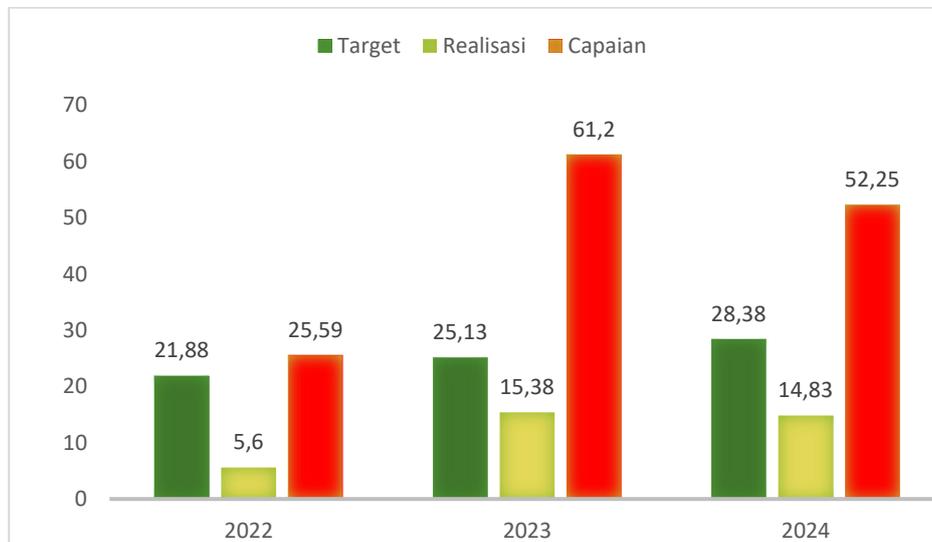
melibatkan mereka dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Dengan program ini, diharapkan peningkatan akses sanitasi yang layak dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesehatan serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

IKU- 16 Cakupan Layanan Persampahan

Cakupan layanan persampahan merujuk pada sejauh mana sistem pengelolaan sampah dapat menjangkau seluruh area atau komunitas yang membutuhkan layanan tersebut. Ini mencakup berbagai tahapan yang melibatkan pengumpulan sampah dari rumah tangga atau fasilitas umum, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan atau pembuangan, pemilahan sampah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan proses pengolahan, serta pengolahan sampah itu sendiri, yang dapat berupa daur ulang, komposting, atau pemanfaatan sampah lainnya. Semua proses ini bertujuan untuk

memastikan pembuangan akhir sampah dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap alam, dan mendukung keberlanjutan lingkungan di masyarakat.

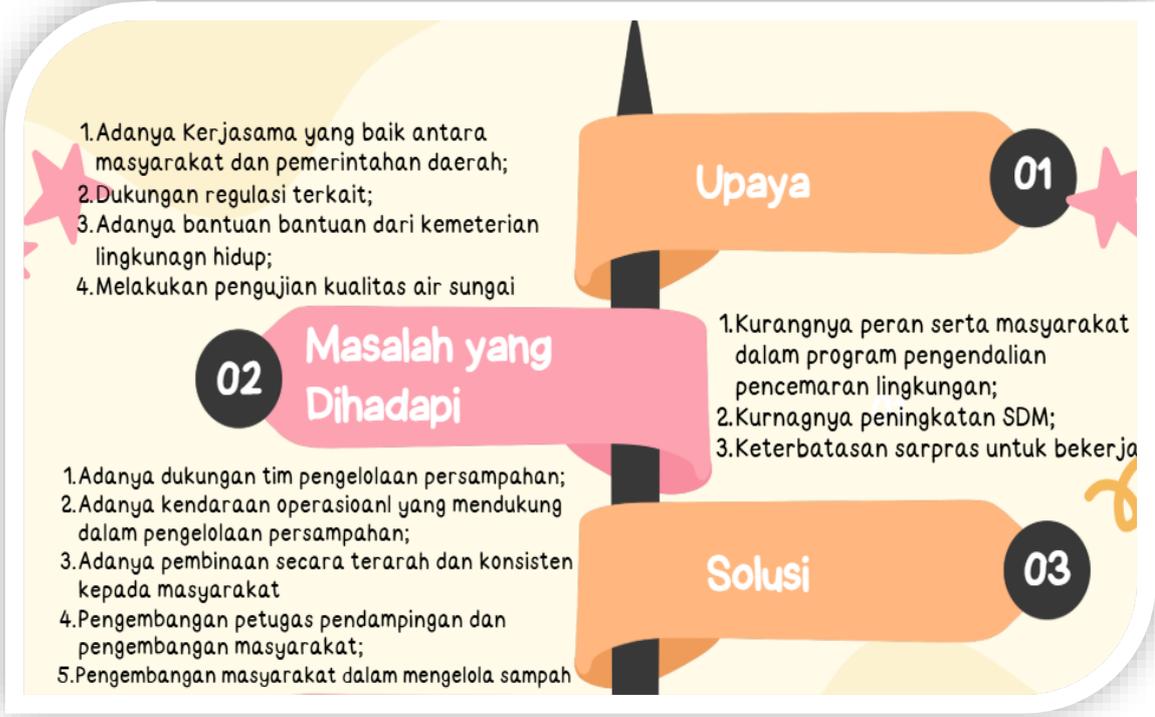
Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Cakupan Layanan Persampahan Tahun 2022-2024



Persentase layanan persampahan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 5,60% dan tahun 2023 sebesar 15,38 dan Tahun 2024 sebesar 14,83 yang belum mencapai target yang telah di tentukan yaitu 28,38 atau realisasi capaian sebesar 52,25% dengan kriteria penialain realisasi kinerja “Cukup Berhasil”. Pencapaian sanitasi yang layak di Konawe Utara di tempuh melalui pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Cakupan Layanan Pesampahan cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 42,51%.



MISI 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

IKU-17 Pertumbuhan Ekonomi

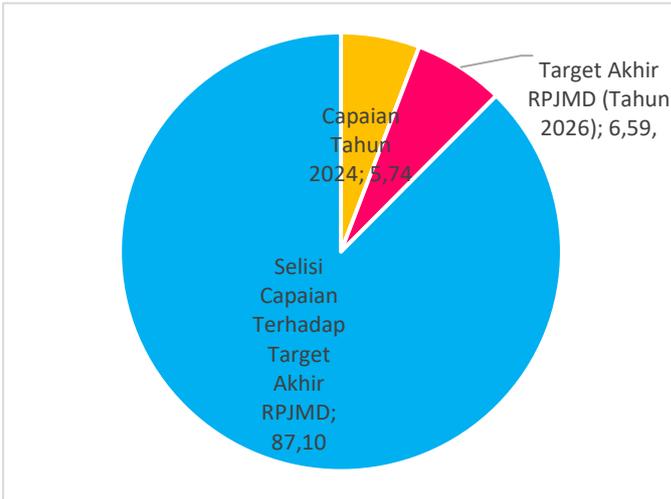
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan indikator seperti *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dalam jangka waktu tertentu, biasanya tahunan.

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada periode 2022–2024 menunjukkan tren pertumbuhan. Pada tahun 2023, tingkat pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03% dan meningkat sebesar 0,71% pada tahun 2024 menjadi 5,74%

Grafik 3.23 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024



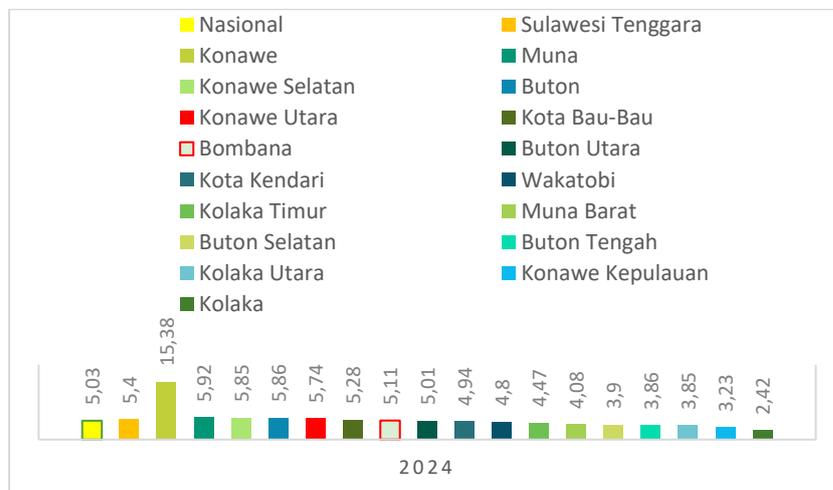
Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,07%, diikuti 5,03% pada tahun 2023, dan 5,74 pada tahun 2024. Meskipun target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,91%, realisasi mencapai 97,28% dari target, sehingga belum memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021–2026



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Pertumbuhan Ekonomi cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 87,10%.

Pertumbuhan Ekonomi Konawe Utara sedikit diatas capaian nasional dan berada pada urutan ke-5 tertinggi Kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara

Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



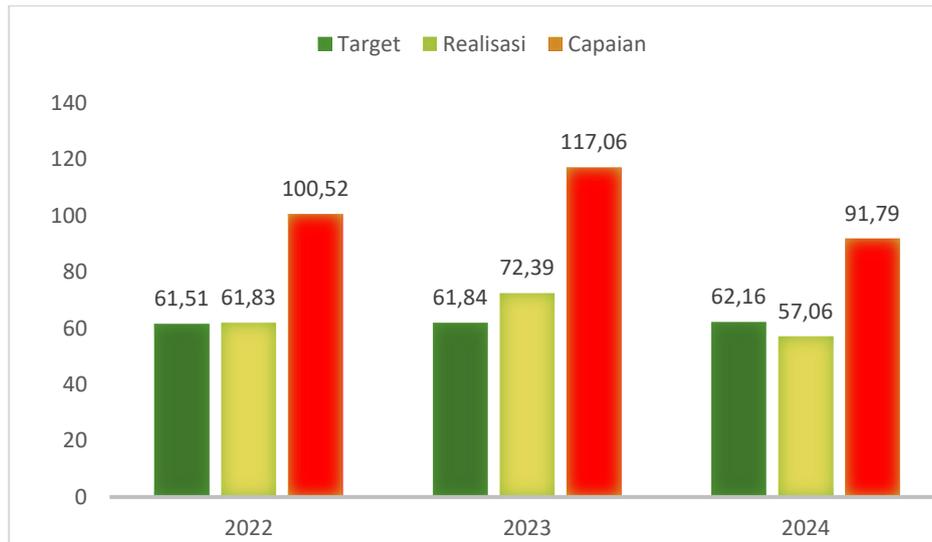


Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama ditopang oleh lima sektor utama, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) penyediaan akomodasi dan makanan minuman; (3) pengadaan listrik dan gas; (4) jasa pendidikan; serta (5) perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor. Kelima sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024.

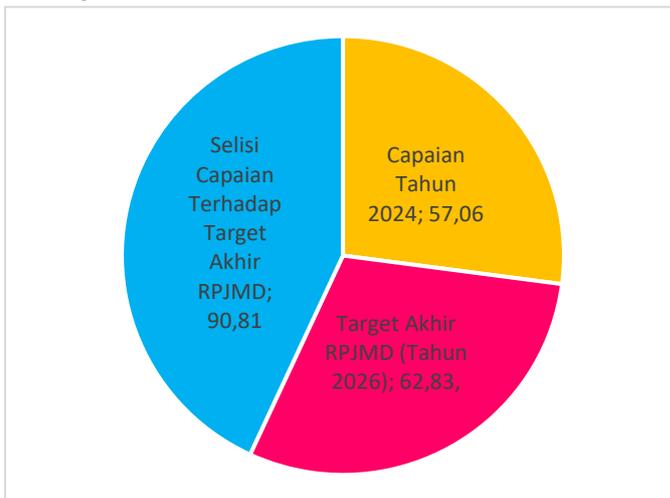
IKU-18 PDRB Perkapita

Standar pertumbuhan pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata penghasilan yang diterima oleh setiap individu di dalam masyarakat dan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan sejauh mana perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan taraf hidup warganya. Ketika terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita, hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik, tetapi juga mengindikasikan adanya kemajuan dalam sektor-sektor ekonomi yang mendukung kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan per kapita menjadi salah satu penanda utama dalam mengukur perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2022-2024



Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 61,83%, diikuti 72,39% pada tahun 2023, dan 57,06 pada tahun 2024. Mencapai 91,79% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori “Sangat Berhasil”.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 PDRB Perkapita cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 90,81%.

Sejak periode 2022 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Konawe Utara telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan capaian yang selalu melebihi angka 100%. Bahkan, capaian tersebut tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melampaui target yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2026, menunjukkan kinerja ekonomi yang sangat baik dan konsisten dalam pencapaian pertumbuhan yang diinginkan.



IKU-19

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebuah indikator yang mencerminkan persentase dari penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja, namun sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah individu yang tergolong dalam kelompok pengangguran di suatu wilayah, yang sangat berguna untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ukuran yang penting, TPT membantu dalam memahami tantangan ketenagakerjaan dan potensi perbaikan yang dibutuhkan dalam meningkatkan lapangan kerja.

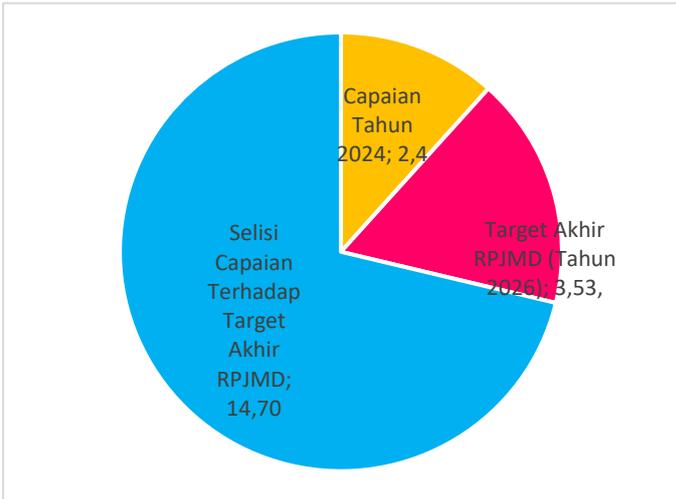


Grafik 3.26 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2024



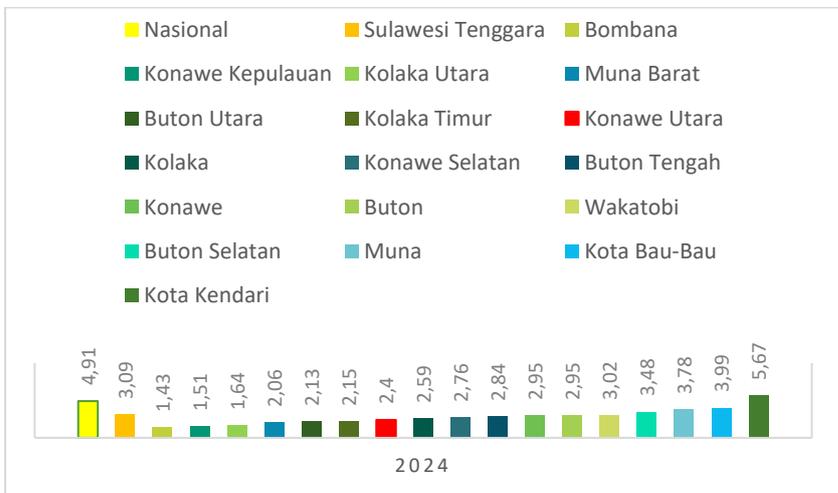
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja indikator TPT selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,01%, meningkat menjadi 2,76% pada tahun 2023, dan diperkirakan akan mencapai 2,4% pada tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian TPT berhasil mencapai 150% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 3,62%, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini dikategorikan "Sangat Berhasil" karena angka pengangguran yang lebih rendah daripada target yang ada, sekaligus melampaui sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021–2026. Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja serta perkembangan ekonomi yang lebih baik di daerah tersebut.





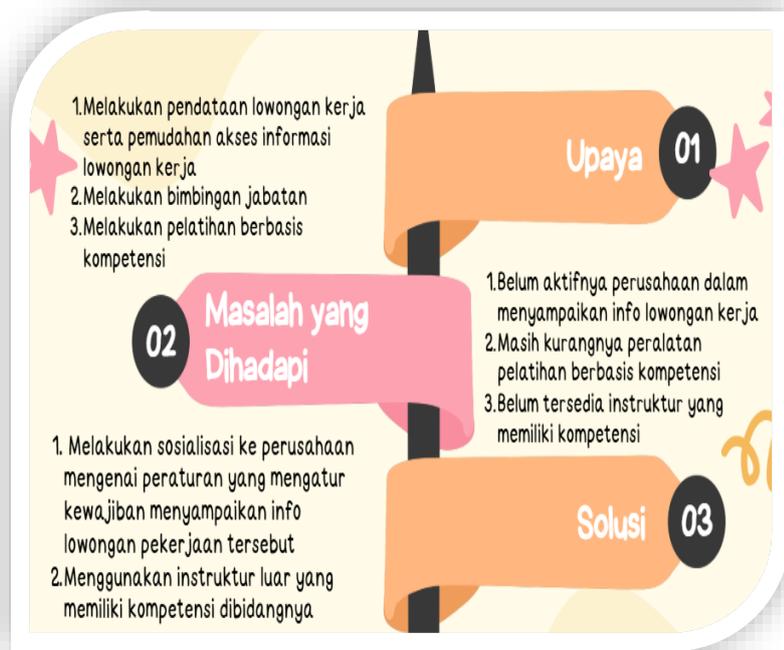
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 14,70%.

Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statisti Provinsi Sulawesi Tenggara ([Tingkat Pengangguran Terbuka \(TPT\) Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Sejak tahun 2022-2024, TPT Kabupaten Konawe Utara selalu mencapai target kinerja dengan capaian diatas 100% dan telah berhasil mencapai target akhir RPJMD sebesar 3,53%. Konawe Utara menempati urutan ke-7 dengan TPT terendah dari 17 Kab/kota se_Sulawesi Tenggara capaian ini lebih bik dari rata-rata capaian Provinsi maupun Nasional.



Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu Program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja. Pelatihan yang dilaksanakan di

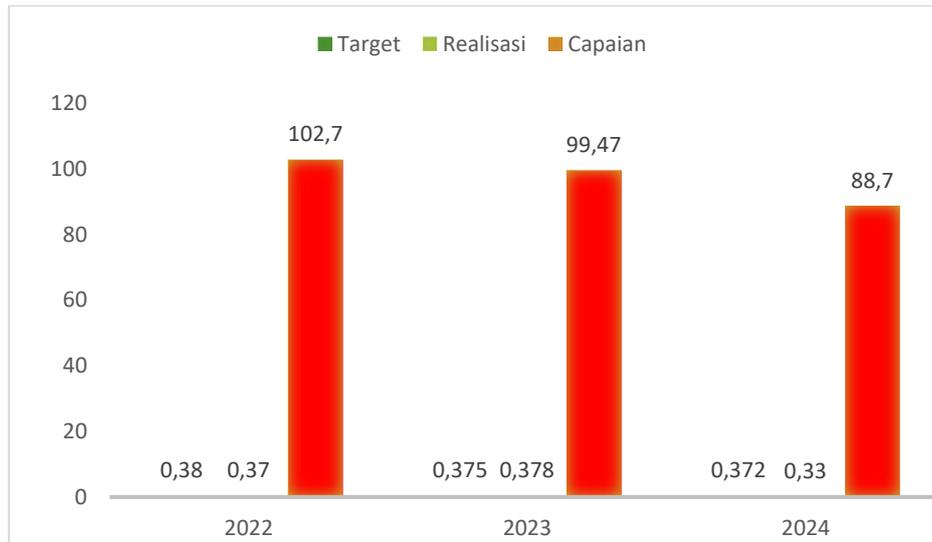
Kabupaten Konawe Utara salah satunya adalah

pelatihan/kursus program asistensi pembuatan pakaian.

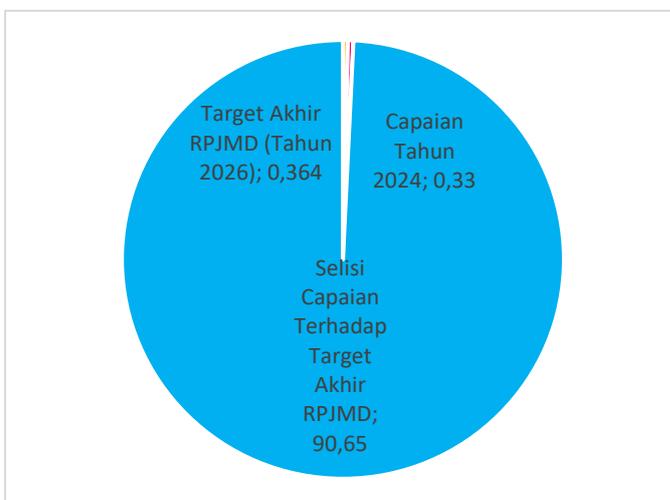
IKU-20 Indeks Gini

Koefisien Gini adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi dan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa merata atau timpangnya pembagian pendapatan di kalangan penduduk. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata, sementara angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat besar. Oleh karena itu, semakin kecil nilai koefisien Gini, semakin adil distribusi pendapatan di suatu daerah, dan semakin besar nilainya, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi.

Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024

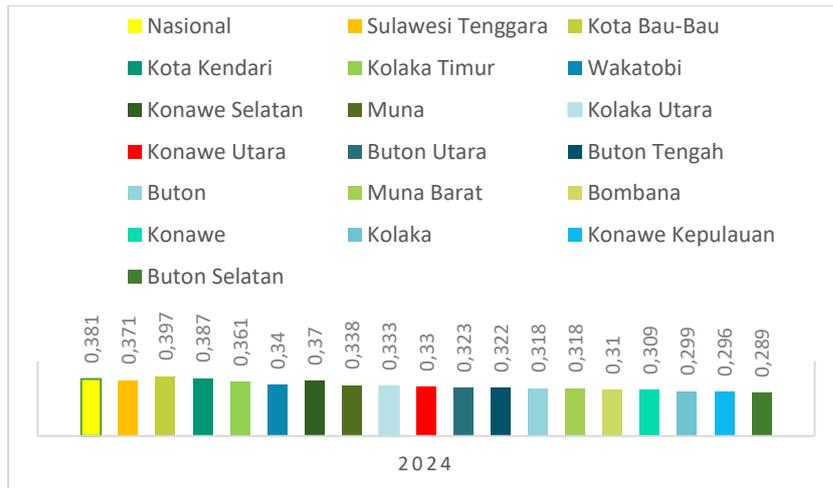


Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja indikator Indeks Gini selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,370%, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,378% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 0,330 dengan target yang ditetapkan sebesar 0,372%. Capaian tersebut menunjukkan hasil yang “sangat Berhasil” walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, karena nilai Indeks Gini yang tercatat pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021–2026, yang mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan dan penurunan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.



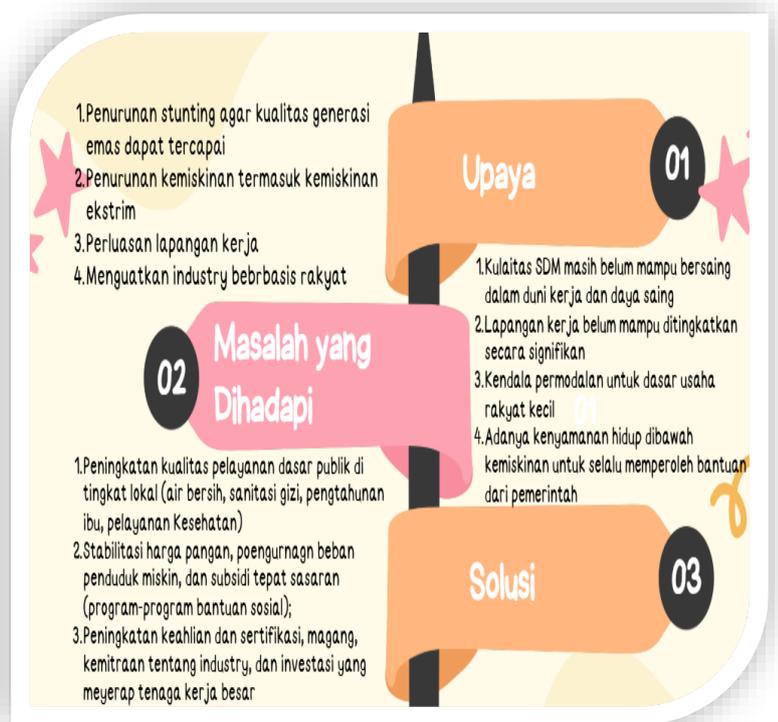
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Indeks Gini belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 90,65%.

Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Posisi Kabupaten Konawe Utara menjadi yang kesebelas tertinggi di Sulawesi Tenggara, diatas rata-rata Provinsi namun masih di bawah nilai Nasional. Untuk perbandingan terhadap target Akhir RPJMD, memiliki capaian sebesar 88,70%. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di kabupaten Konawe Utara, yaotu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha penyediaan konstruksi dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran



IKU-21**Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu atau kelompok tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan pokok makanan dan kebutuhan non makanan. Ketidakmampuan ini diukur dari segi pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai standar hidup minimal. Kebutuhan dasar makanan merujuk pada pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencukupi konsumsi energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang berasal dari 52 jenis komoditas makanan. Sementara itu, kebutuhan dasar non makanan mencakup berbagai kebutuhan minimal lainnya, seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Secara spesifik, kebutuhan non makanan ini mencakup 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas di wilayah pedesaan, yang menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan berdasarkan konteks geografis dan sosial.

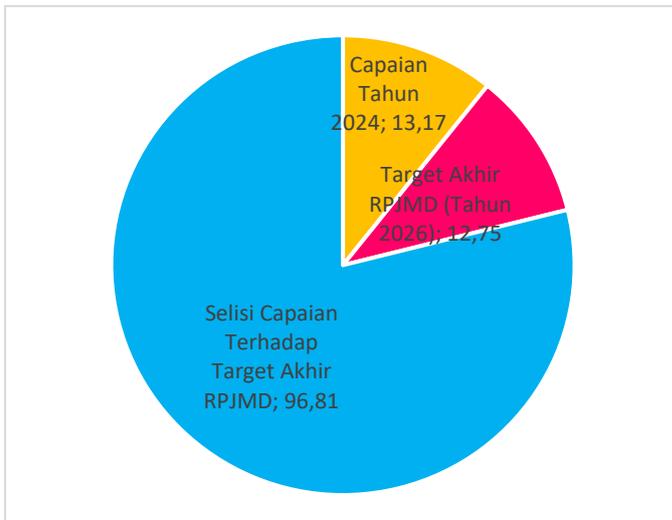


Grafik 3.30 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024



Pada periode 2022 hingga 2024, tingkat kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan, rata-rata capaian pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,72%, kemudian menurun menjadi 13,46% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 13,17% pada tahun 2024. Pencapaian tersebut termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” jika dibandingkan dengan

target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 13,01%, yang mengindikasikan adanya penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 Tingkat Kemiskinan cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 96,81%.

1. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru.

2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;

3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;

Upaya 01

1. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar;
3. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemerataan beras untuk warga miskin lansia.
4. Pembentukan unit Reaksi cepat penanganan kemiskinan ekstrem (URC-KIS) yang langsung menasar target masyarakat miskin berdasarkan data P3KE by name by address diharapkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara.

1. Penurunan kemiskinan cenderung lambat;

2. Bantuan kemiskinan tidak tepat sasaran/tidak mengubah kondisi penerima

3. Potensi ekonomi daerah belum maksimal dikembangkan

4. Peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan

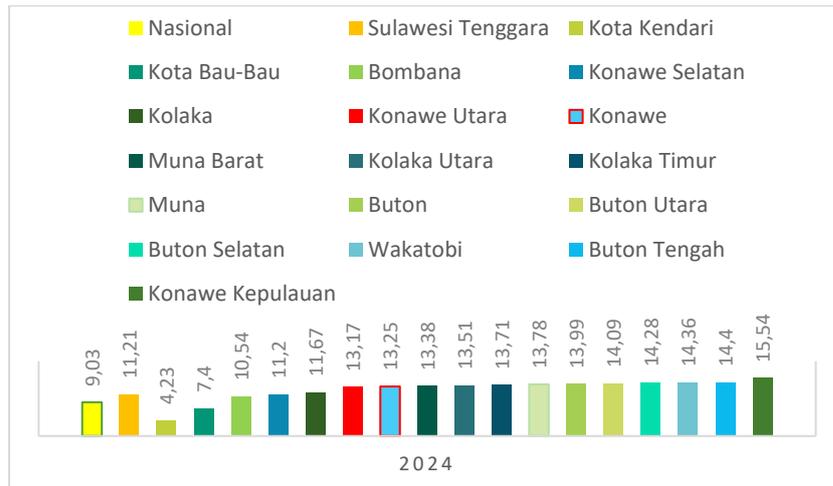
Masalah yang dihadapi 02

1. Inovasi pengembangan aplikasi dashboard pemantauan URC-KISS
2. Pengembangan Obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru;
3. Mengembangkan potensi daerah dengan mengusulkan proyek strategis Nasional masuk di Konawe Utara
4. Meningkatkan Kerjasama dengan investor di bidang potensi daerah

03 Solusi

04

Grafik 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara ([Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara](#))

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara telah merancang Rencana Penurunan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2023-2028, dengan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor dan fokus utama pada upaya mengurangi kemiskinan ekstrem. Dalam menyusun rencana ini, digunakan data sasaran dari Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kemenko PMK. Melalui proses pemetaan dan pembaruan data, telah diidentifikasi kelompok Desil 1-4 sebagai indikator tingkat kemiskinan di wilayah Konawe Utara. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, pemerataan pendapatan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada alokasi bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan aktif dari masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi juga sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata.

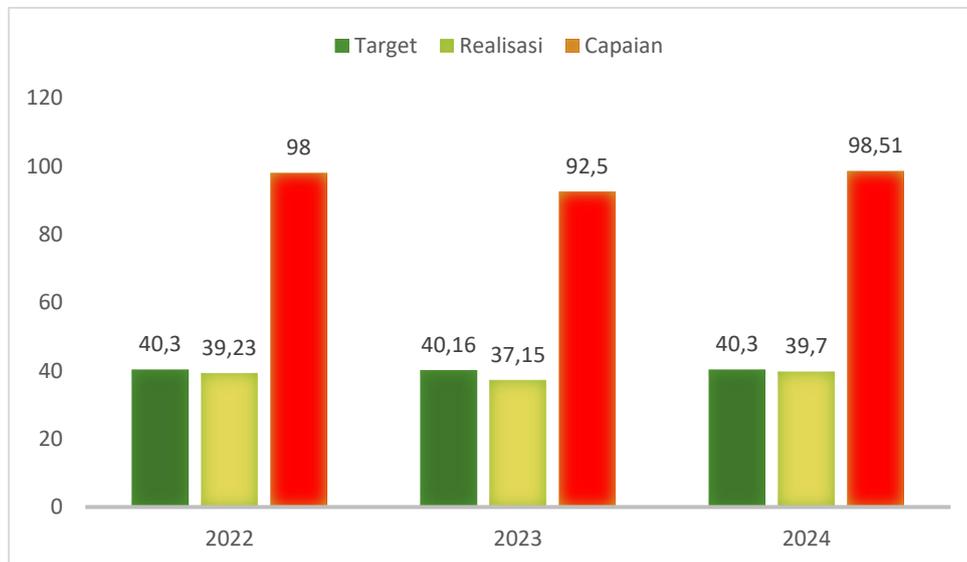
Sasaran 9 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah

IKU- 22 **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional, seperti kabupaten, mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah dalam periode tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB dilakukan melalui dua pendekatan,

yaitu berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua pendekatan ini memberikan gambaran rinci mengenai komposisi nilai tambah, baik dari sisi sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) maupun dari sisi penggunaannya.

Grafik 3.32 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja indikator pertumbuhan PDRB di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022, capaian sektor ini mencapai 39,23%, menurun menjadi 37,15% pada tahun 2023, dan diproyeksikan sebesar 39,70 pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” dengan target yang telah ditetapkan sebesar 40,30%, angka ini belum berhasil melampaui target yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara



untuk tahun 2021-2026, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memenuhi target yang telah ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di atas target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 97,83%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026, indikator ini masih berada cukup jauh dari target akhir yang direncanakan sebesar 40,58% pada tahun 2026. Tren capaian dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan yang mengindikasikan adanya pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, menuju sektor sekunder, yang meliputi industri pengolahan dan kegiatan ekonomi lainnya. Pergeseran ini mencerminkan adanya perubahan struktur ekonomi di wilayah tersebut, di mana kontribusi sektor primer terhadap PDRB secara bertahap mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lain.



IKU- 23 **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengendalian**

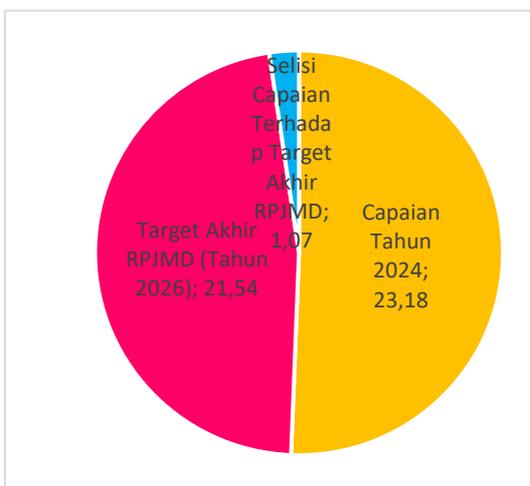
PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencakup aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan berbagai jenis barang tambang, mineral, dan galian yang terdapat di dalam tanah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas.

Grafik 3.33 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengendalian Tahun 2022-2024

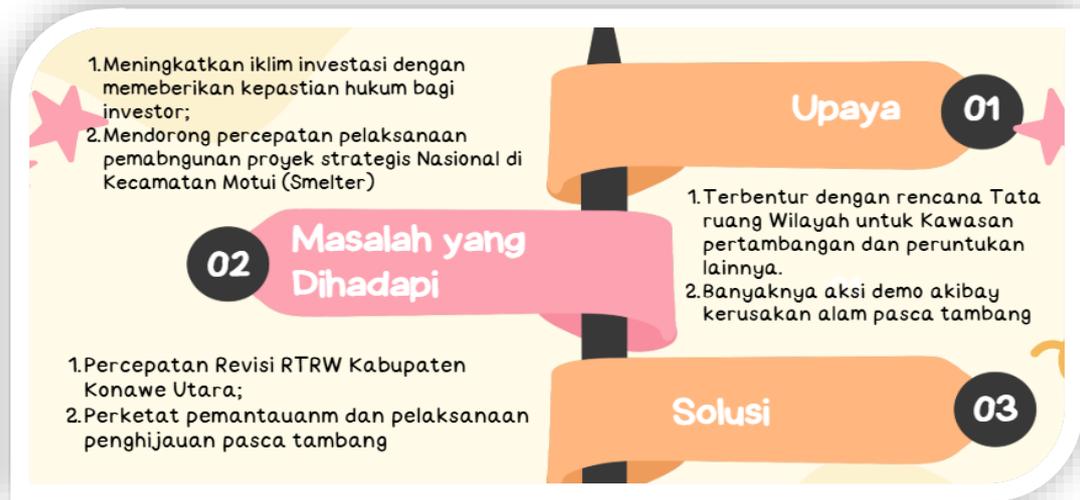


Hasil evaluasi kinerja pertumbuhan PDRB sektor ini selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, capaian mencapai 22,13%, meningkat menjadi 24,81% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 22,87%. Angka ini melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 21,44%, dengan realisasi sebesar 106,66%. Capaian tersebut masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” dan telah melampaui target yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara



untuk tahun 2021-2026, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengendalian sudah melebihi target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengendalian pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di atas target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 1,07%.



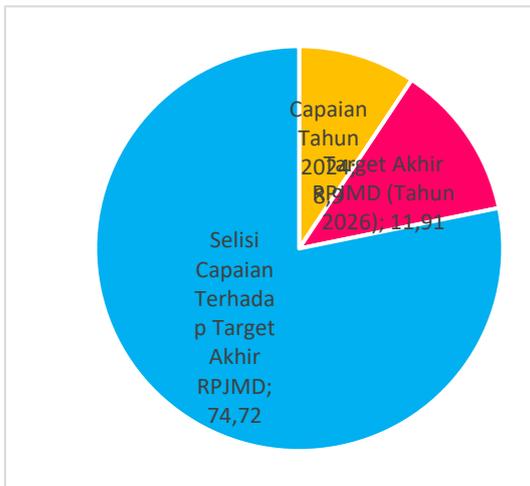
IKU- 24 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Kegiatan perdagangan mencakup dua jenis utama, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar melibatkan pembelian dan penjualan kembali barang, baik baru maupun bekas, dalam jumlah besar oleh pedagang kepada produsen, importir, pedagang lain, perusahaan, lembaga, atau konsumen tanpa mengubah bentuk barang. Sementara itu, perdagangan eceran mencakup pembelian dan penjualan kembali barang dalam jumlah kecil, umumnya melayani konsumen individu atau rumah tangga, baik barang baru maupun bekas, tanpa mengubah bentuknya.

Grafik 3.34 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2022-2024

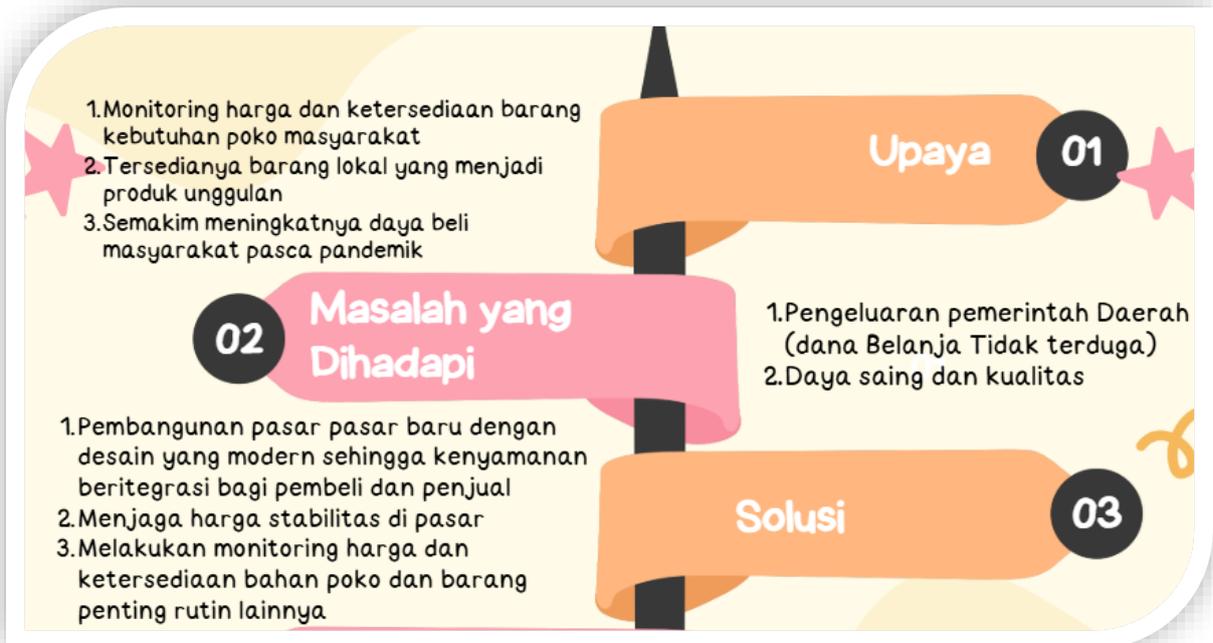


Hasil evaluasi kinerja pertumbuhan PDRB sektor perdagangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan capaian sebesar 12,2% pada tahun 2022, 12,13% pada tahun 2023, dan 8,9% pada tahun 2024. Angka ini belum melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 11,87%, dengan realisasi mencapai 74,97%. Capaian tersebut dikategorikan “Berhasil” karena telah melampaui target yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara periode 2021-2026.



74,72%

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sudah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di atas target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar

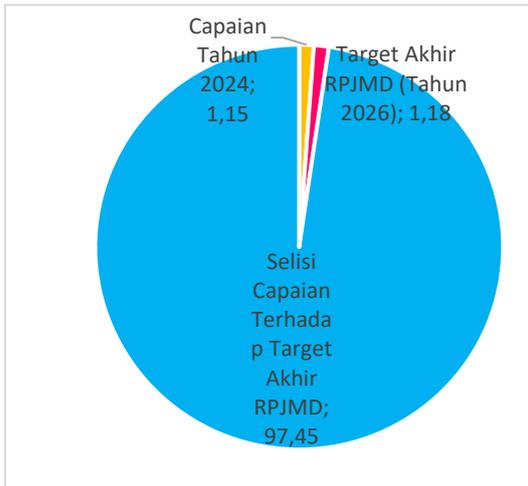


PDRB sektor industri pengolahan mencakup kegiatan yang mengolah bahan organik atau anorganik menjadi produk baru dengan kualitas yang lebih tinggi, baik melalui proses manual, mesin, maupun proses kimiawi.

Grafik 3.35 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi kinerja pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan selama tiga tahun terakhir menunjukkan capaian sebesar 1,03% pada tahun 2022, 0,80% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 1,15 pada tahun 2024. Angka ini belum mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 1,16%, dengan realisasi capaian sebesar 99,13%. Capaian ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” dan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026.



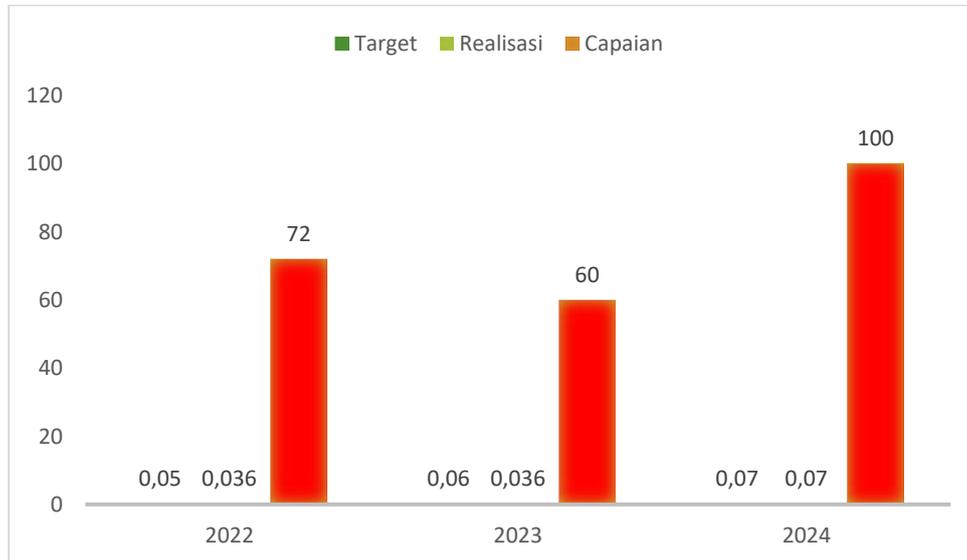
97,45%

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sudah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di atas target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar



Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi karena memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah yang dikunjungi oleh wisatawan.

Grafik 3.36 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi kinerja indikator pertumbuhan PDRB sektor pariwisata selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2022, sektor ini mencapai 0,036%, diikuti oleh 0,036% pada tahun 2023, dan tahun 2024 mencapai 0,07% dengan realisasi capaian sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil", namun belum melampaui target kinerja yang diharapkan.



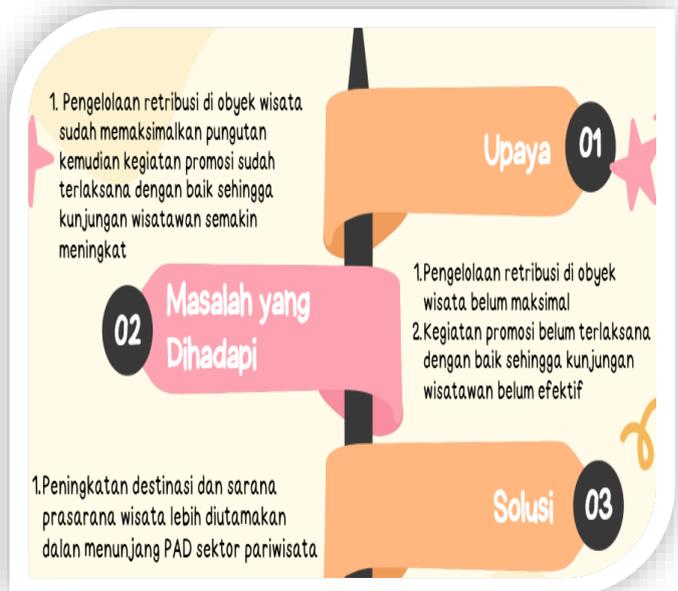


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2021-2026, Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata memenuhi target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026. Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan hasil yang tetap berada di target tahunan yang telah ditentukan. Capaian hingga tahun 2024 terhadap target Tahun 2026 sebesar 77,77%

Seperti sektor lainnya, pariwisata juga memengaruhi perekonomian suatu daerah atau negara tujuan wisata. Selain itu, sektor ini turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri, yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konawe Utara memiliki potensi pariwisata alam yang dapat dikembangkan, seperti Pantai Taipa, Pemandian Air Panas Wawolesea, Telaga Ladori, Telaga Tiga Warna, Pulau Labengki, dan lainnya, yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pada Tanggal 17 November Tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi pada desa Labengki di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Juara 1 dari Klasifikasi Desa Wisata berkembang dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 setelah bersaing dari 6.016 desa yang ada di Indonesia. Yang diselenggarakan di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.



Jumlah omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi mencerminkan total pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi dalam periode tertentu.

Grafik 3.37 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Nilai Omset Usaha Koperasi Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi capaian omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, omset yang tercatat mencapai Rp 816.192, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 877.800, dan pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp 897.000. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar Rp 850.233, dengan capaian realisasi sebesar 105,87%. Capaian ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” karena telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, indikator ini sangat jauh dari target akhir tahun 2026 sebesar Tahun 2022 hingga 2024 capaian cenderung meningkat, dengan perbandingan terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,22%.



Sasaran 10: Meningkatnya Investasi Daerah

IKU- 28

Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA

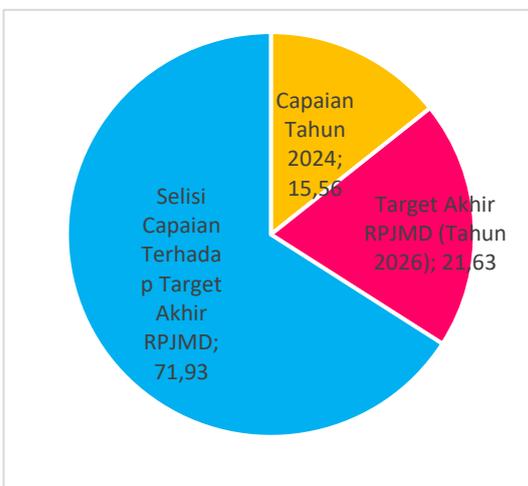
Dalam proses pembangunan, investasi memainkan peran yang sangat krusial. Investasi menentukan dinamika dan percepatan pembangunan yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika proses investasi berjalan dengan baik, perekonomian akan tumbuh secara positif, asalkan investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara, yang kaya akan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi fokus perhatian bagi para investor, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Grafik 3.38 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA Tahun 2022-2024



Hasil evaluasi capaian Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022 tercatat mencapai 24,13%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 32,09%, dan pada tahun 2024 mencapai 15,56%. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar 18,37%, dengan capaian realisasi sebesar 51,87%. Capaian ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil” walaupun belum melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2021-2026.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, indikator ini melebihi dari target akhir tahun 2026 sebesar 21,63%. Tahun 2022 hingga 2024 capaian meningkat dari target yang telah ditetapkan. Selisih antara capaian tahun 2024 dengan target RPJMD tahun 2026 sebesar 71,93%.

1. Aktif Melakukan Sosialisasi tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Pelaku Usaha

Upaya 01

02

Masalah yang Dihadapi

1. Melakukan Pengawasan/Turun ke Lapangan untuk Melakukan Bimbingan Langsung kepada Pelaku Usaha/Perusahaan
2. Mengeluarkan Surat Teguran Tertulis bagi pelaku usaha/perusahaan yang tidak melaporkan LKPM tepat waktu

1. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melaporkan perkembangan investasinya

Solusi 03

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

IKU-29

Indeks Reformasi Birokrasi

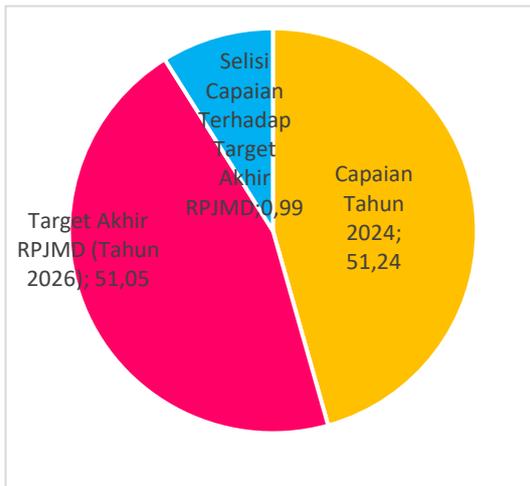
Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait aspek kelembagaan (organisasi), tata kelola (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur.

Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari praktik KKN, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas.

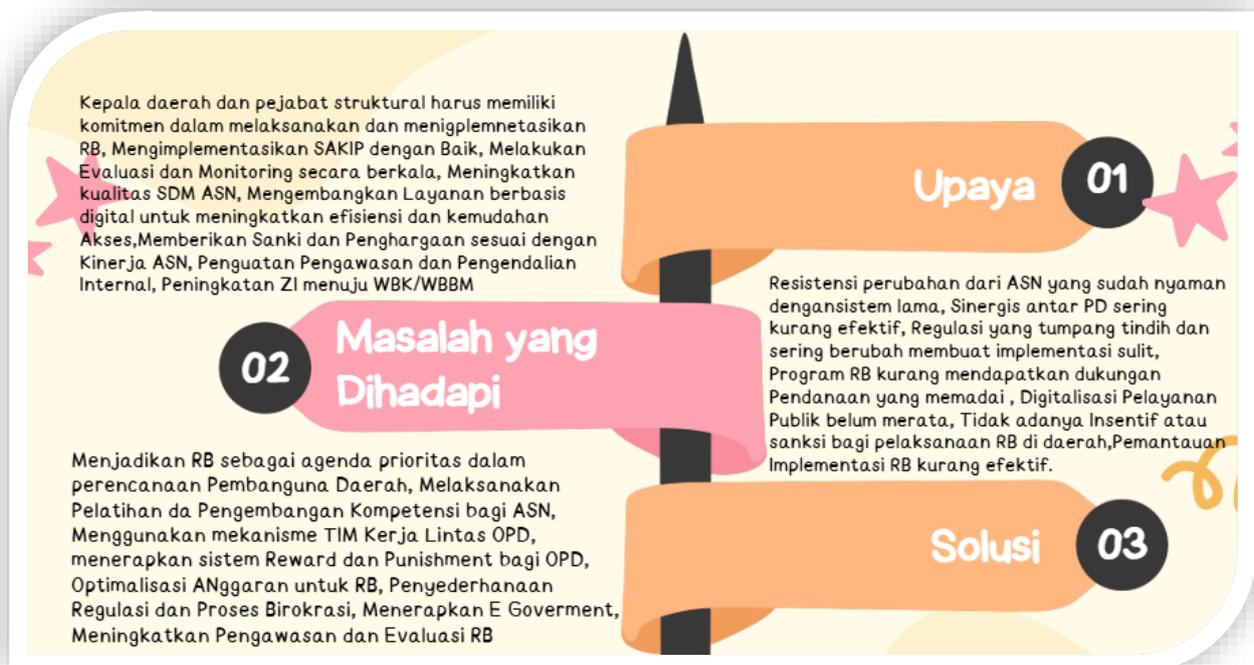
Grafik 3.39 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024



Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara di 3 Tahun terakhir yaitu Tahun 2022 mencapai nilai 52,95 tahun 2023 mencapai nilai 51, 24 dan Tahun 2024 mencapai 51,24 yang telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50,73 dalam RPJMD dengan kategori “Sangat Berhasil”



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, indikator ini melebihi dari target akhir tahun 2026 sebesar 51,05%. Tahun 2022 hingga 2024 capaian meningkat dari target yang telah ditetapkan.



Sasaran 11: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

IKU-30 Nilai SAKIP

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus mencatat peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai yang dicapai adalah 65,16, meningkat menjadi 65,45 pada tahun 2023, dan mencapai 66,52 (Kategori B) yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan

sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja pada tahun 2024, dengan realisasi capaian sebesar 93,54% dengan capaian ‘Sangat Berhasil’”.

Grafik 3.40 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022-2024



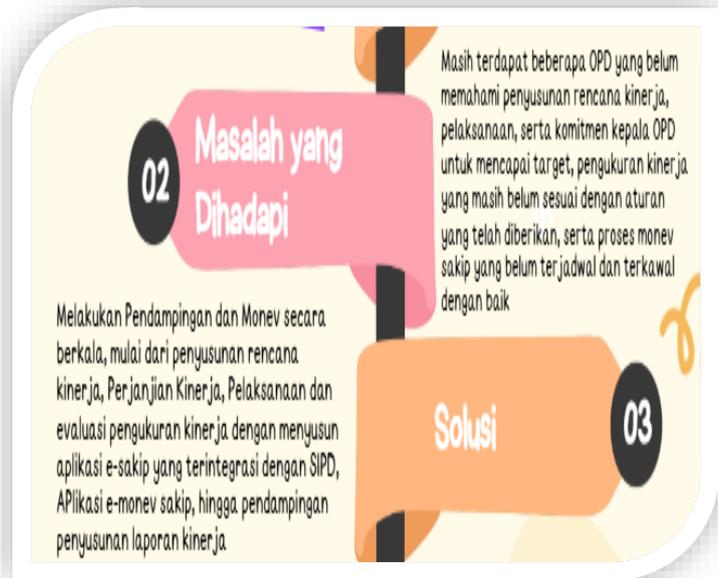
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, indikator ini belum mencapai dari target akhir tahun 2026 sebesar BB.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melakukan evaluasi internal terhadap seluruh PD oleh Tim Evaluator internal. Namun, laporan dari Tim Evaluator Internal belum merata memberikan rekomendasi perbaikan

yang spesifik yang dapat ditindaklanjuti PD. Hal ini antara lain tampak dari LHE AKIP Internal pad Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pariwisata.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut

1. Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
2. Mereviu dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and timebound) dan cukup baik level Pemda maupun PD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat mereviu kesesuaian level pengampu kinerja yang ada;
3. Review dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada logical framework yang disusun sampai ke level individu;
4. Mengidentifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya untuk mencapai suatu kinerja;
5. Pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
6. Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
7. Memastikan kembali program dan kegiatan yang dimiliki untuk lebih berfokus pada pencapaian kinerja sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya yang dimiliki;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya;



9. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
10. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga PD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya..

IKU-31 Opini BPK

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara selama tiga tahun terakhir menunjukkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)." Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara



Tahun 2024, yang diterbitkan pada 22 Mei 2024,

capaian indikator kinerja terkait opini BPK terhadap laporan keuangan daerah mencapai 100%.



Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebanyak enam kali berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2024. Dengan realisasi target 100%, pencapaian indikator ini dikategorikan sebagai "Sangat Berhasil."

Grafik 3.41 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Opini BPK Tahun 2022-2024





Opini tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinilai memadai, bebas dari salah saji material, dan telah menggunakan basis akrual (accrual basis). Basis akrual ini

memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi keuangan organisasi, karena mencatat seluruh transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, serta jumlah utang dan piutang.

Laporan keuangan tersebut telah memenuhi persyaratan kewajaran, yang mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

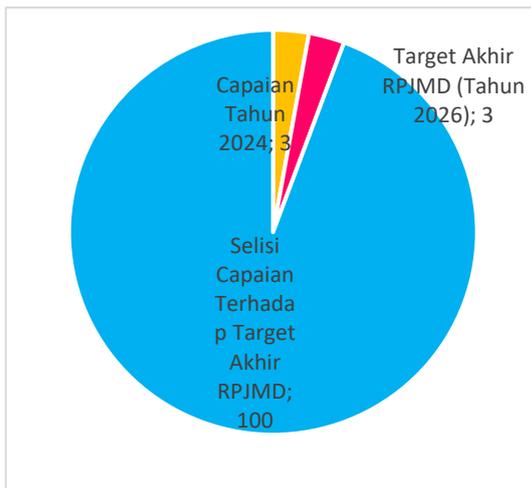
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Pelayanan Publik yang Terpercaya

IKU-32 Indeks Maturitas Kelembagaan

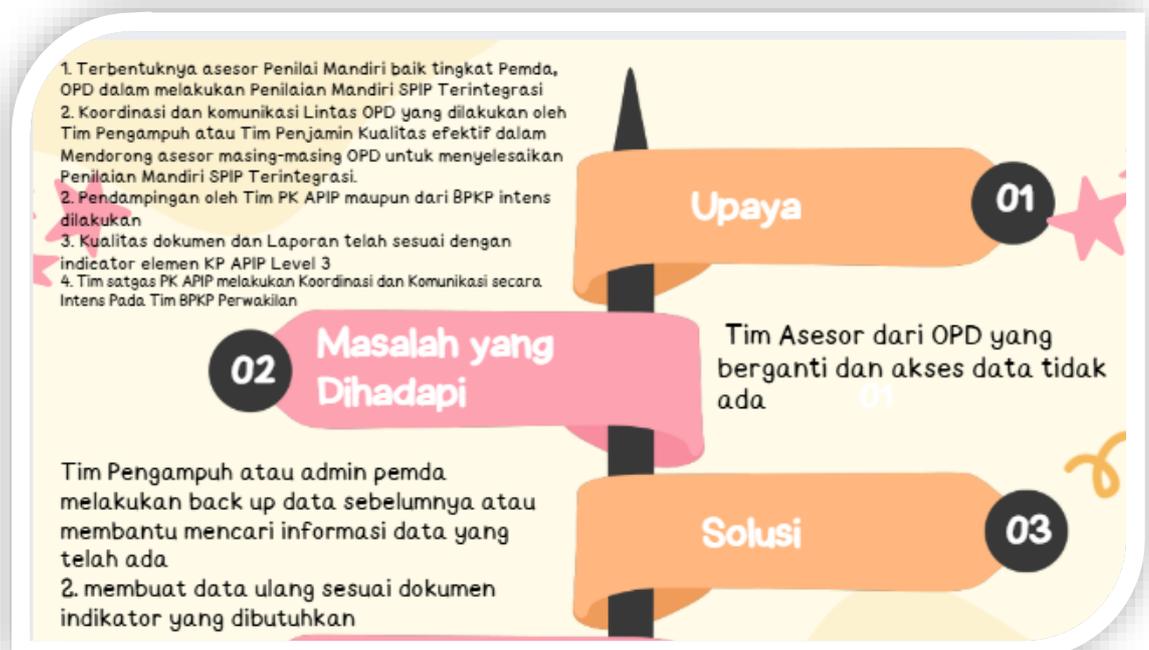
Indikator Level Kapabilitas APIP mencapai kinerja 100% dengan pencapaian pada Level 3. Hal ini selaras dengan arahan Presiden yang mendorong peningkatan signifikan kapasitas APIP di seluruh Indonesia dari Level 1 ke Level 3. Selain itu, pencapaian ini juga sesuai dengan Grand Design dan Roadmap untuk mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP menuju standar kelas dunia.



Grafik 3.42 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Maturitas Kelembagaan Tahun 2022-2024



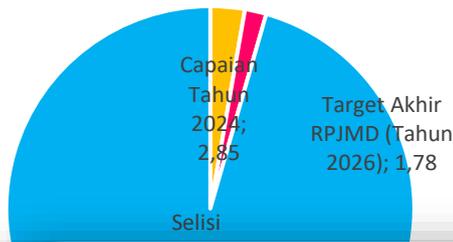
Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2022,2023 dan 2024 terlihat bahwa indiaktor mengalami peningkatan capaian kinerja dimana relaisasi capaian kinerja menjadi level 3 atau 100%, dengan kategori ‘Sangat Berhasil’ yang melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada pengguna SPBE. Kebijakan terkait pelaksanaan program aplikasi informatika tercantum dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kabupaten Konawe Utara.



Grafik 3.43 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2024



Capaian realisasi Indeks SPBE di 3 tahun terakhir yaitu pada



02 Masalah yang Dihadapi

Melengkapi dokumen terkait Kebijakan Internal Yang mengatur pengelolaan TIK dalam Perbup No. 49 Tahun 2022, Membentuk Tim Koordinasi SPBE, Peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan, data dan informasi berbasis aplikasi dan adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan SPBE melalui penyediaan jaringan TIK

Membuat dokumen Arsitektur SPBE, melengkapi Peta Rencana SPBE yang lebih terperinci sehingga pengelolaan dan penerapan infrastruktur TIK lebih terarah, melakukan Integrasi aplikasi yang digunakan pmda serta melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek dan pelatihan bidang pengelolaan TIK

Upaya 01

Penerapan Perencanaan Strategisnya masih rendah karena belum ada dokumen Arsitektur SPBE yang mengatur desain sistem secara Komprehensif dan Peta Rencana SPBE Belum terperinci, Kurangnya Integrasi antar sistem di instansi terkait serta masih kurangnya kapasitas teknis SDM pada TIM Koordinasi SPBE

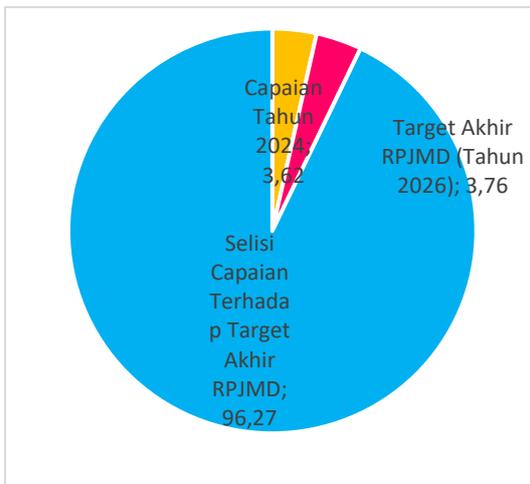
Solusi 03

tahun 2022 mencapai nilai 1,61 tahun 2023 mencapai nilai 2,10 dan Tahun 2024 mencapai nilai 2,85 dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,54 dengan mutu pelayanan “Sangat Berhasil”. Capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD mencapai 175,92% dari target tahun 2024 sebesar 1,62.

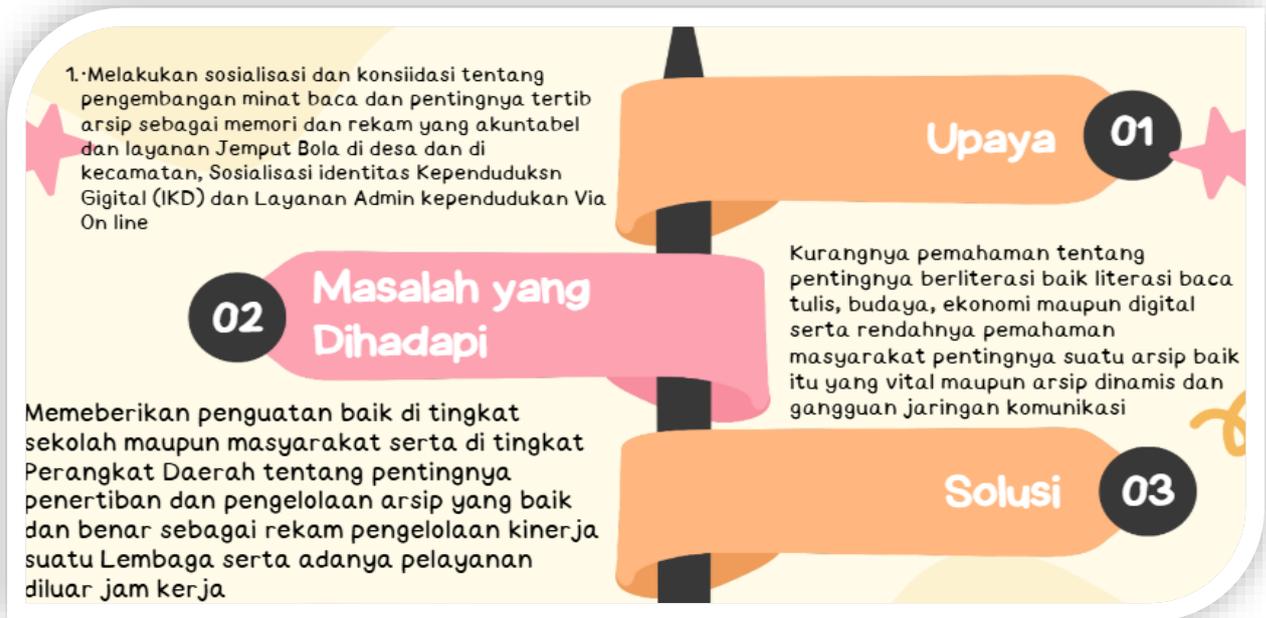
IKU-34 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian ini didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, serta adanya peningkatan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

Grafik 3.44 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024



Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan, dengan nilai pada tahun 2022 mencapai 3,50%, tahun 2023 sebesar 1,61%, dan tahun 2024 diproyeksikan mencapai 3,62% dari target yang ditetapkan sebesar 3,62%.



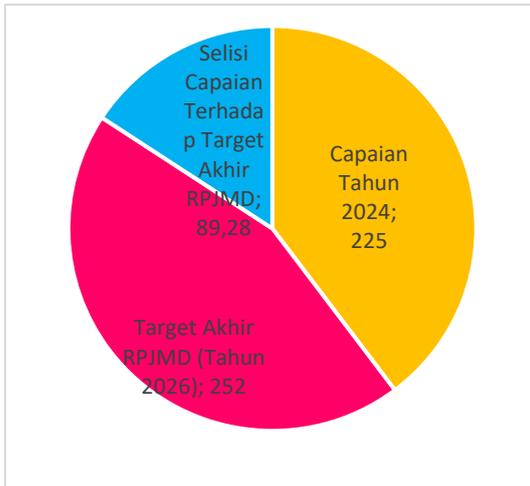
Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN

IKU-35 Indeks Merit Sistem

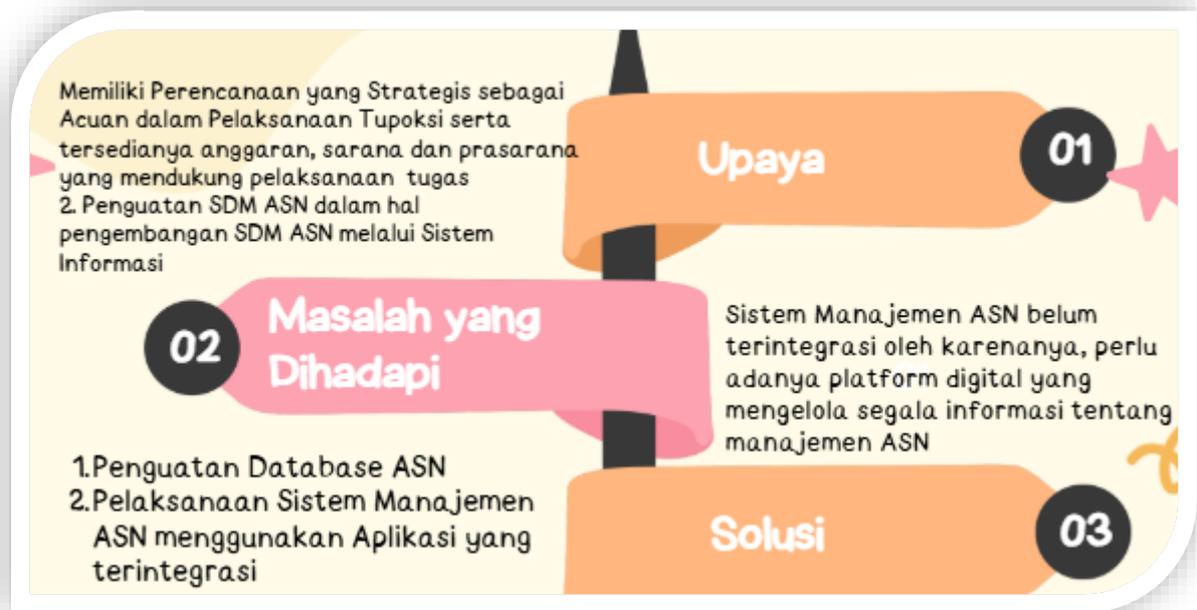
Sistem merit ASN adalah penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada prestasi kerja. Namun, disadari atau tidak, kualitas ASN di Indonesia masih banyak yang memiliki mental priyayi dibandingkan mental melayani kepentingan publik dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugas dengan tepat dan benar.

Grafik 3.45 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Merit Sistem Tahun 2022-2024





Capaian realisasi Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang luar biasa, yaitu mencapai 225% dari target yang ditetapkan sebesar 252%, dengan kategori penilaian “Sangat Berhasil.” Jika dibandingkan dengan target RPKMD tahun 2026 maka selisih targetnya sebesar 89,28%.



Sasaran 14: Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

IKU-36 Indeks Desa membangun

Indeks Desa Membangun merupakan gambaran mengenai data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa. Indeks ini dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi desa tertinggal dan mendorong peningkatan jumlah desa mandiri. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Grafik 3.46 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun Tahun 2022-2024



Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2022 sebesar 0.62545%, tahun 2023 sebesar 0,6757% dan tahun 2024 sebesar 0,6128 dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,6128% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100% melebihi target Akhir RPJMD.



Capaian realisasi Indeks Desa Membangun pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang luar biasa, yaitu mencapai 0,6128% dari target yang ditetapkan sebesar 252%, dengan kategori penilaian “Sangat Berhasil.” Jika dibandingkan dengan target RPKMD tahun 2026 maka selisih targetnya sebesar 95,75%.

1. Menggali permasalahan yang ada di desa dan mencari solusi demi terlaksananya percepatan pembangunan desa;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan Desa

02

Masalah yang Dihadapi

1. Komitmen Bersama antara pemerintah kabupaten, Kecamatan, Desa dan Tenaga pendamping Desa untuk mendukung percepatan tujuan pembangunan desa untuk memajukan dan mendirikan masyarakat menjadi sejahtera

Upaya 01

1. Penyebaran penduduk belum merata sehingga daerah yang padat penduduknya tidak memiliki tanah Garapan;
2. Perbedaan adat kebiasaan dan tingkat sosial ekonomi di setiap desa;
3. Mayoritas penduduk desa bermata pencaharian belum tetap

Solusi 03

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

IKU-37

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKHL menggabungkan berbagai parameter lingkungan hidup, seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, kebersihan lingkungan, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Grafik 3.47 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024



Realisasi kinerja terhadap indikator Indeks Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2022 mencapai 62,72%, pada tahun 2023 sebesar 58,85%, dan pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 63,09% dari target 62,16%. Dengan capaian kinerja sebesar 101,49%, indikator ini masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 maka selisih target tahun 2024 dengan target akhir sebesar 98,85%.





Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, serta memperhitungkan kepentingan

ekonomi, budaya masyarakat, dan penataan ruang.

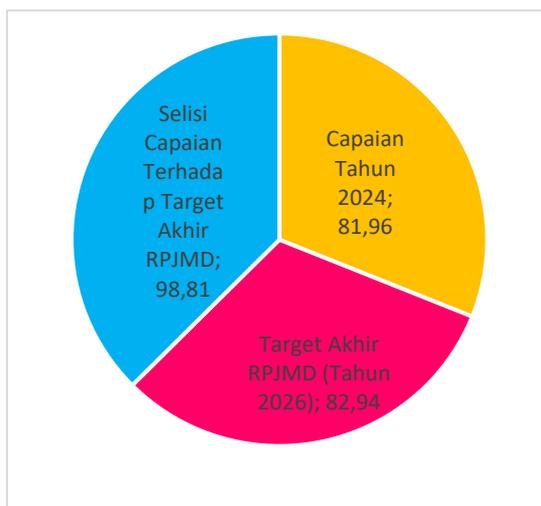
Sasaran 15: Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

IKU-38 Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang



Peninjauan Kembali (PK) terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi peninjauan kembali RTRW menunjukkan bahwa proses ini baru dapat dilanjutkan pada tahun 2021, mengingat keterbatasan anggaran dan lamanya proses penyusunan hingga penetapan. Oleh karena itu, perlu upaya dan langkah percepatan untuk menyelesaikan revisi RTRW Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2024.

Grafik 3.48 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang Tahun 2022-2024



Realisasi kinerja terhadap indikator ketaatan terhadap perencanaan tata ruang Kabupaten Konawe Utara selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, dengan capaian pada tahun 2022 mencapai 82,34%, pada tahun 2023 sebesar 82,26% dari target 81,47%, dan pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 81,96% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026, maka selisih target capaian

sebesar 98,81%.



Penertiban izin kesesuaian pemanfaatan ruang untuk berbagai peruntukkan dilakukan melalui proses pengajuan permohonan, pembahasan di tingkat Tim Koordinasi Ruang Daerah (TKPRD), hingga diterbitkannya rekomendasi kesesuaian tata ruang. Penentuan kesesuaian pemanfaatan ruang dan faktor perubahan kesesuaian tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan overlay yang didukung oleh Sistem Informasi Geografi (SIG).

Cek lapangan dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara data pemanfaatan ruang yang diperoleh dari interpretasi peta citra dengan kondisi aktual di lapangan, serta untuk mendokumentasikan bentuk pemanfaatan ruang yang ada. Hal ini bertujuan untuk menguji akurasi interpretasi dan membatasi pemanfaatan ruang yang sebenarnya serta perubahannya.

Sasaran 16: Menurunnya Pencemaran Air dan Udara

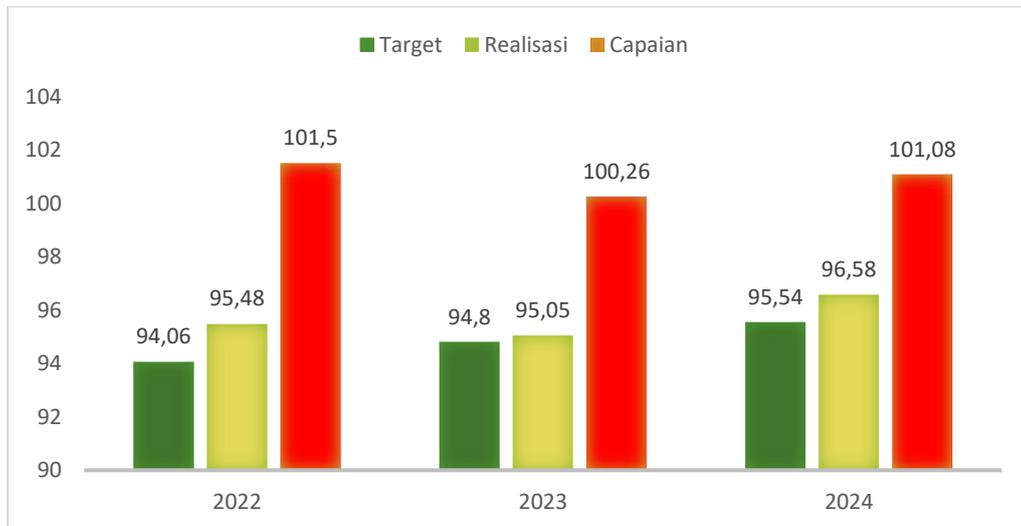
IKU-39 Indeks Kualitas Air dan Udara

Indeks kualitas air dan udara adalah ukuran digunakan untuk menilai pencemaran udara, bergantung pada standar kualitas udara di negara masing-masing. Dari tabel capaian pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Air dan Udara diatas, diketahui bahwa dari terget indeks kualita air dan udara sebesar 94,80% yang tercapai dari 2022 sebesar 95,48%, tahun 2023 mencapai 95,05% dan tahun 2024 sebesar 96,58% atau sekitar 101,08%% dengan kategori “Sangat Berhasil”, ini berarti bahwa setiap tahun tingkat pencemaran air dan udara di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan yang signifikan. Jika



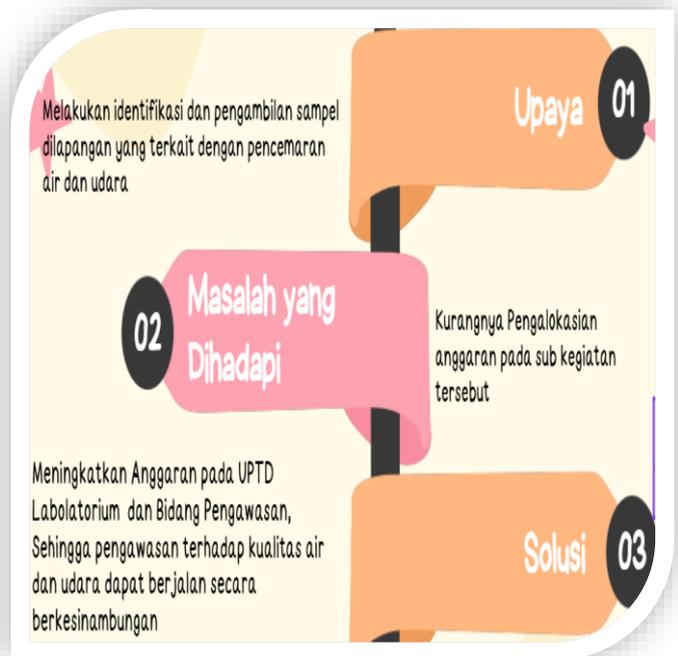
dibandingkan dengan target RPJMD maka selisih target capaian sebesar 99,54%.

Grafik 3.49 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air dan Udara Tahun 2022-2024



Pemantauan kualitas air sungai merupakan bagian dari upaya pengelolaan kualitas air yang bertujuan untuk menilai kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Konawe Utara. Proses pengambilan sampel kualitas air sungai dilakukan oleh Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sementara pengujian

sampel dilakukan di Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah terakreditasi. Pemantauan ini mencakup kegiatan pengambilan sampel, pengukuran debit air, dan pengamatan kondisi sekitar sungai, yang kemudian akan diuji di laboratorium untuk



mengetahui nilai setiap parameternya. Dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang dialiri sungai maka ditetapkan 10 lokasi desa yang dijadikan sampel pengujian kualitas air.

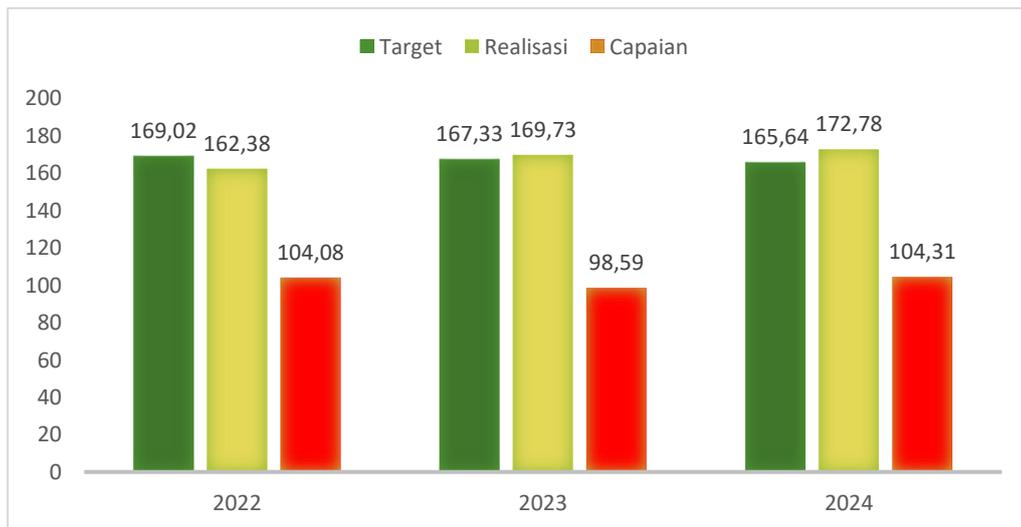
Hasil uji kualitas air sungai untuk setiap parameter selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sungai sesuai dengan kelas perutukannya. Berdasarkan Analisa hasil uji pemantauan yang dilakukan pada laboratorium Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di ketahui bahwa Status Mutu Kualitas air di Kabupaten Konawe Utara tidak melebihi baku mutu kualitas air sungai atau dengan kategori **Tidak Tercemar**.

Sasaran 17: Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana

IKU-40 Indeks Resiko Bencana

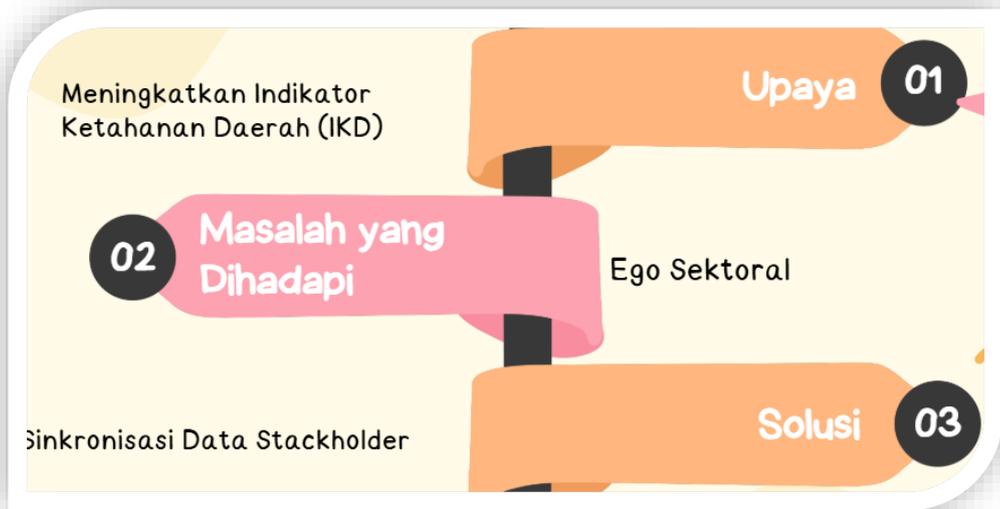
Indeks Risiko Bencana (IRBI) menjadi landasan untuk memahami ancaman bencana, kerentanannya, serta kapasitas suatu daerah. Oleh karena itu, hasil akhir dari kegiatan sosialisasi dan lokakarya yang menghasilkan IRBI sangat penting untuk menyusun rencana pembangunan.

Grafik 3.50 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2022-2024





Berdasarkan data IRBI diketahui bahwa dari target Indeks Resiko Bencana sebesar 165, 64% yang tercapai pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 162,38%, tahun 2023 mencapai 169,73 dan tahun 2024 sebesar 172,78% dari target 165, 64% atau sekitar 104,31%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 maka selisih capaian target sebesar 93,91%.



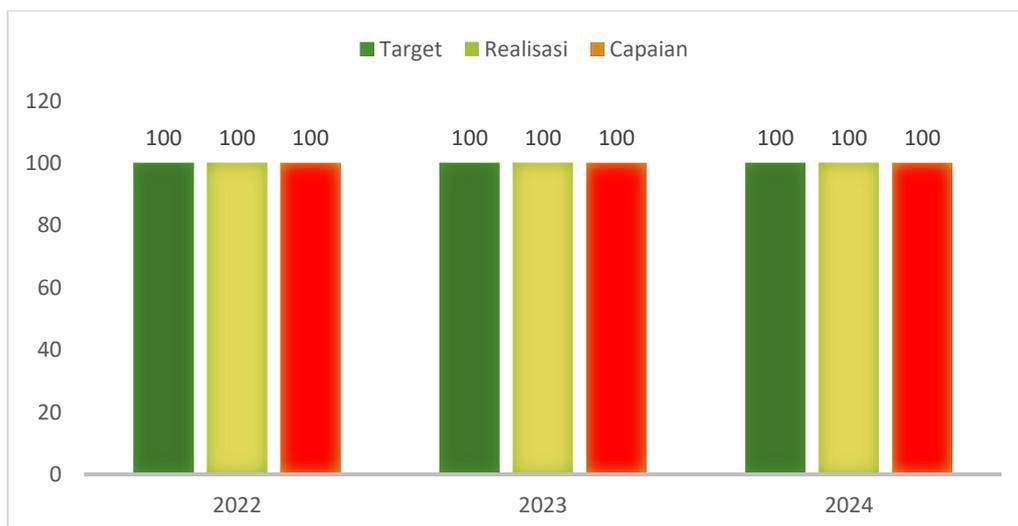
MIISI 6 : Membangun Peradaban Masyarakat yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Sosial

Tujuan 6 : Melestarikan Seni Budaya Lokal

IKU-41 Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang Dibina

Lembaga adat merupakan gabungan dari kata "lembaga" dan "adat." Dalam Bahasa Inggris, "lembaga" diterjemahkan sebagai *institution*, yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang sudah mapan, terdiri atas interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat didefinisikan sebagai organisasi adat yang relatif stabil, tersusun atas pola-pola perilaku, peran, dan hubungan yang terarah dan mengikat individu. Lembaga ini memiliki otoritas formal dan sanksi hukum adat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peningkatan kapasitas lembaga adat perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, dimulai dari tingkat Nagari, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.

Grafik 3.51 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang Dibina Tahun 2022-2024



Dari tabel capaian pengukuran terhadap indikator kapasitas Lembaga Adat yang dibina indikator Kapsitas Lembaga Adat yang dibina diatas, diketahui bahwa dari target Kapasitas Lembaga Adat yang di bina sebesar 100% yang tercapai sejak tahun 2022-2024 sebesar 100%.

Sebagai bentuk komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama di Bumi Konasara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dana hibah sebesar Rp. 120 juta untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), H. Hasran Abubakar, S.Pd., M.Si. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah sebagai dukungan terhadap peran FKUB dalam menjaga harmoni antarumat beragama.



Sasaran 18: Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang Diselenggarakan

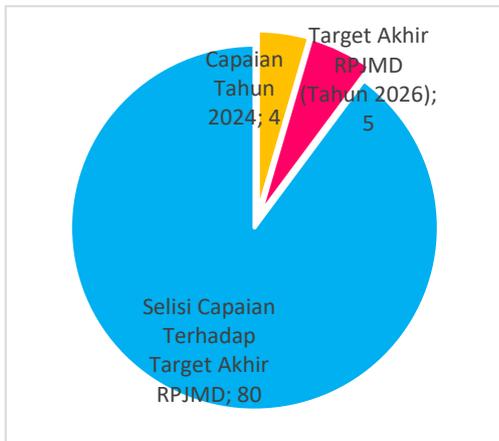
IKU-42 Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya

Penyelenggaraan festival dan budaya menjadi indikator penting dalam mengukur pencapaian sasaran strategis untuk memperkuat kebudayaan sebagai identitas daerah di



Kabupaten Konawe Utara.

Pada tahun 2023, realisasi rasio penyelenggaraan festival seni dan budaya telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 4 dari target 4, mencapai 100% dengan kategori "Sangat Berhasil". Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 maka selisih target capaian sebesar 80%.



Grafik 3.51 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya Tahun 2022-2024



Pada tahun 2024, jumlah event pariwisata terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu Festival Konasara, peringatan HUT ke-17, Jalan Sehat Konasara Sultra bersama Kendari Pos, serta Carnaval Budaya Tahun 2024.

Hallo Sultra merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara. Prinsip dasar dalam mengintegrasikan pengembangan pembangunan di semua sektor adalah menjadikan Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu kabupaten unggulan yang berkontribusi mendukung slogan "Masa Depan Indonesia."



Sebagai bagian dari agenda besar yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, salah satu prioritas utama adalah promosi daerah beserta seluruh potensi sumber dayanya. Beberapa agenda penting yang direncanakan meliputi:

- **Menjadikan perayaan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai agenda rutin berskala nasional dan internasional.**
- **Kegiatan utama dalam program ini** mencakup pameran produk unggulan, pemilihan putra-putri pariwisata, festival tenun, karnaval, lomba kuliner, dan berbagai acara lain yang mendukung promosi sumber daya alam daerah.
- **Keikutsertaan dalam event nasional seperti Pameran Kemilau Sulawesi**, yang menampilkan wisata minat khusus seperti arung jeram di Lalindu dan trekking wisata mangrove sebagai pendukung daya tarik wisata unggulan Konawe Utara. Kegiatan ini bertujuan memperluas kemitraan, mempromosikan potensi daerah, membuka peluang investasi, membangun kerja sama bisnis, serta mempererat hubungan antarwilayah. Konawe Utara juga menjalin kerja sama dengan perusahaan internasional, yang diperkirakan akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi daerah.
- **Penyelenggaraan Festival Konasara dan Ekspo Konasara Tahun 2023**, yang memamerkan keunggulan dan ciri khas Kabupaten Konawe Utara di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu potensi unggulan kabupaten ini adalah sektor pariwisata, yang telah dikenal luas di Nusantara dan mancanegara. Dengan potensi tersebut, Konawe Utara berpeluang menarik lebih banyak wisatawan, yang akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis, menjadikannya sebagai salah satu potensi besar dalam keragaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, termasuk di Kabupaten Konawe Utara. Keberagaman ini merupakan aset yang harus terus dijaga dan dikembangkan demi terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Grafik 3.52 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Beragama Tahun 2022-2024



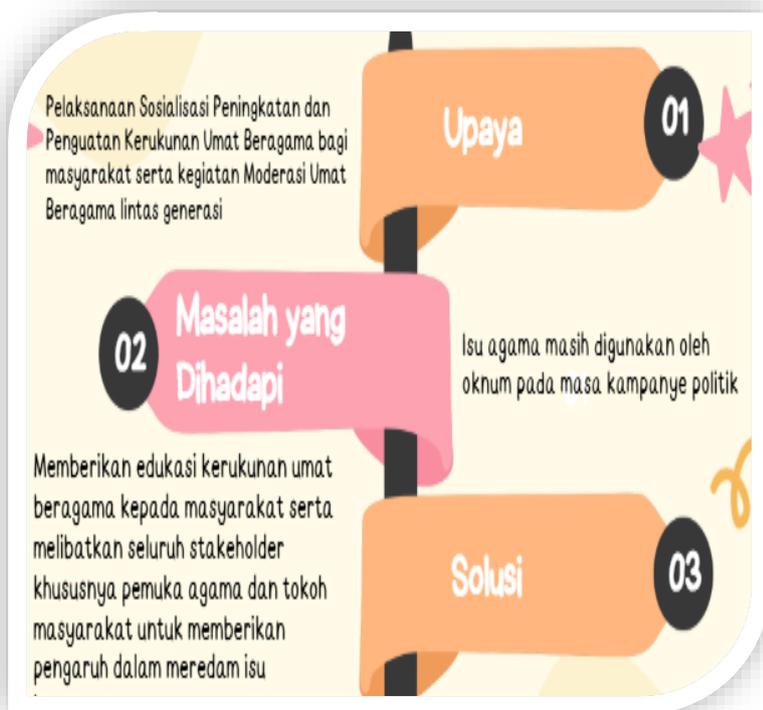
Berdasarkan tabel capaian pengukuran terhadap Indeks Kerukunan Beragama, pada tahun 2022 indeks ini mencapai 79,9%, tahun 2023 sebesar 75,50%, dan tahun 2024 mencapai 74,20% dengan realisasi capaian sebesar 98,40% pada kategori “Sangat Berhasil”. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 maka selisih target capaian sebesar 97,45.

Indeks kerukunan tersebut dibentuk dari tiga indikator utama:

1. **Toleransi** – Merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan.
2. **Kesetaraan** – Mencerminkan sikap saling melindungi, memberikan kesempatan yang sama, tanpa mengedepankan superioritas di antara kelompok.

- Kerja Sama** – Menggambarkan keterlibatan aktif untuk berinteraksi, bergabung, serta memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 terdapat 229 tempat ibadah di Kabupaten Konawe Utara yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Rinciannya meliputi 188 masjid, 7 mushola, 18 gereja, dan 16 pura. Hal ini mencerminkan keberagaman agama yang hidup berdampingan secara harmonis di wilayah tersebut.



Berdasarkan hasil pengukuran terhadap ketersediaan sarana tempat ibadah dan jumlah penduduk tahun 2024, diketahui rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk. Formula yang digunakan adalah jumlah tempat ibadah dikalikan 1.000, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024, rasio ini ditargetkan mencapai 4 tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Konawe Utara.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara konsisten melaksanakan program peningkatan pelayanan sarana keagamaan. Program ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap tempat ibadah yang memadai dan berkualitas.

Sasaran 19: Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial

IKU-44 Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada indikator persentase pengelolaan potensi konflik sosial menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari awal tahun 2022 hingga 2024, seluruh target perencanaan tercapai dengan persentase 100%, yang

dikategorikan sebagai "Sangat Berhasil", dengan jumlah konflik yang tercatat sebanyak 17 kasus.

Grafik 3.53 Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial Tahun 2022-2024



Jika ditinjau secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Utara, yaitu "Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial", juga mencapai 100% dalam periode tersebut. Rata-rata

capaian kinerja selama kurun waktu tersebut adalah 100%, menunjukkan keberhasilan yang konsisten.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari rasa solidaritas dan kekompakan seluruh pemangku

kepentingan, khususnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Konawe Utara, yang bekerja sama



dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut

3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana. Berikut uraian analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian setia tujuan misi Kabupaten Konawe Utara

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terdiri dari 6 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya Akses Pendidikan

Terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata lama Sekolah dan harapan lama sekolah. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.181.671.634.491,22,-,- dengan realisasi Rp. 172.673.333.462,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diperbaiki data agar tepat sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu angka usia harapan hidup. Anggaran yang dialokasikan pada sasan tersebut yaitu sebesar 137.818.289.141,57,- dengan realisasi 130.987.145.005,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,04%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan agar tepat sasaran.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Terdiri dari 2 (dua) indikator kInerja yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Kota Layak Anak. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 14.591.124.185,- dengan realisasi Rp. 14.385.098.280,- atau esisiensi anggaran sebesar 98,59%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi. Permasalahan diantaranya refocusing Program dan

Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 4 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 3.868.897.142,- dengan realisasi Rp. 3.867.423.280,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,96%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing Program dan kegiatan yang kurang mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 5 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Terdiri dari 1(satu) indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 8.605.866.238,- dengan realisasi Rp. 8.561.704.670,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,48%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 6 Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja yaitu Presentase penurunan Warga miskin. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 6.140.610.019,- dengan realisasi Rp. 6.101.829.650,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,37%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktru Wilayah Dan Kawasan Permukiman.

Terdiri atas 2 sasaran yaitu:

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah

Terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase keterhubungan/konektivitas wilayah, Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondis Mantap dan Presentase di yang terlayani jaringan irigasi. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 359.735.455.214,- dengan realisasi Rp. 325.371.975.458,- atau efisiensi serapan annggaran sebesar 90,45%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman

Terdiri dari 4 (empat) Indikator kinerja yaitu Presentase Kawasan Permukiman Perkantoran/Perdesaan yang rasio Akses Air Minum, Rasio Akses Sanitasi ayak dan Cakupan Layanan Persampahan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersbut yaitu sebesar Rp. 38.931.377.547,- dengan realisasi Rp. 38.704.149.560,- atau efosiensi serapan anggaran sebesar 99,42%. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing program dan kegiatn yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan Dan Daya Saing Unggulan Daerah

Terdiri atas 2 sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-sektor Unggulan Daerah

Terdiri dari 11 (sebelas) indikator Kinerja yaitu Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Presentase PAD Sektor Pariwisata dan Nilai

Omset Usaha Koperasi. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 98.178.273.006,01,- dengan realisasi Rp. 94.138.811.408,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,89%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 Meningkatnya Inbvestasi Daerah

Terdiri dari 6 (Enam) Indikator Kinerja yaitu Pertumbuhan Investasi PMBDN dan PMA. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 1.695.040.950,- dengan realisasi Rp. 1.613.435.300,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,19%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdiri atas 2 sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan OPINI BPK. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 69.804.579.127,- dengan realisasi Rp. 64.409.079.698,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 92,27%. Berbagai upaya solusi yang dilakukan dalam mengahdapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Indeks Maturitas Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 43.915.558.241,- dengan realisasi Rp. 43.427.218.872,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 98,89%. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Merit System. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 5.490.503.808,- dengan realisasi Rp. 5.247.626.673,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,58%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 4 Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

Terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 21.108.994.846,- dengan realisasi Rp. 20.724.639.400,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 98,18%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahan Bencana

Terdiri dari 3 Sasaran Strategis yaitu:

Sasaran 1 Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 25.226.316.790,- dengan realisasi Rp. 19.365.145.814,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 76,77%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara

Terdiri dari 1(satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air dan Udara. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 51.599.973.696,- dengan realisasi Rp. 49.903.600.834,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 96,71%. Berbagai upaya dan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Resiko Bencana. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 9.592.931.696,- dengan realisasi Rp. 6.217.293.508,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 64,81%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan agar tepat sasaran.

Tujuan 6 Melestarikan Seni Budaya Lokal

Terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu

Sasaran 1 Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan

Terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Presentase Lembaga Adat yang dibina, Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Indeks Kerukunan Beragama. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 5.341.155.090,- dengan realisasi Rp. 4.918.800.090,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 92,06%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Presentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 45.794.711.490,- dengan realisasi Rp. 44.577.092.940,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 97,34%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

3.1.4 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian implementasi visi dan misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan, sasaran dan indikator. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan berdasarkan pada isu-isu strategik. Terdapat beberapa Program dan kegiatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 137 Program dan 125 kegiatan dan 2458 sub kegiatan. Adapun analisis dari program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator Kinerja. Dan didukung sebanyak 196 (Seratus Sembilan Puluh Enam) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Akses Pendidikan telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah program Pengelolaan Pendidikan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 95,00%. Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek serta pendistribusian pendidik dan tenaga pendidik yang belum merata.

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dan 51 (Lima Puluh Satu) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kepastian Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dari Keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 95,04%. Adapun kendala yang dihadapi dan upaya jangka pendek yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu lansia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penyakit yang diderita, masih adanya penyakit menular yang terlambat terdeteksi karena masyarakat tidak memeriksakan diri serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dan berobat teratur pada penyakit Hipertensi, DM, Jantung dll (Penyakit Tidak Menular)

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak telah melaksanakan sebanyak 8 (Delapan) Program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 98,59%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena belum optimalnya layanan informasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Oleh Karena itu perlu adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Sasaran 4 Meningkatnya Kesempatan Kerja yang telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 99,96%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Sasaran 5 Meningkatnya Ketahanan Pangan yang telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 99,48%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam , bergizi seimbang dan aman.

Sasaran 6 Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin/Rentan telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 99,37%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi dan aman.

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Memiliki 2 (dua) Sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah telah melaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) program dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 90,45%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek

Sasaran 2 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman telah melaksanakan 6 (enam) program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU). Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 99,42%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya dukungan tim pengelolaan persampahan mendukung pengelolaan persampahan, air dan udara di wilayah pemukiman dan kurangnya kendaraan operasional yang mendukung pengelolaan persampahan, air dan udara di wilayah pemukiman.

Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi

Memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. dan didukung sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-sektor Unggulan Daerah telah melaksanakan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) program dan 124 (Seratus Dua Puluh Empat) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSp/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM yang telah dilaksanakan realisasi anggrannya mencapai 99,40%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya realisasi APBD dalam penyediaan sarana dan prasarana keterbatasan pengadaan bahan dan fasilitas sarana dan prasarana.

Sasaran 2 Meningkatnya Investasi Daerah telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 15 (Lima Belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dari kesleuruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggrannya mencapai 95,19%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek.

Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien

Memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Keuangan Daerah telah melaksanakan sebanyak 15 (Lima belas) Program dan 84 (Delapan Puluh Empat) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 92,27%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran Kegiatan Utama serta memastikan Rencana Aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama, menetapkan Tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi menjadi Peraturan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu menyusun Proses Bisnis Statistik yang berstandar untuk proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada Generic Statistical Business Prosecess Model (GSBPM), perlu menyusun Rencana Aksi dan melaksanakan Sosialisasi dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum perlu diberi Pendampingan dan pemahaman

Sasaran 2 Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Pelayanan Publik yang Terpercaya telah melaksanakan sebanyak 13 (Tiga Belas) program dan 93 (Sembilan Puluh Tiga) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil,

Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 98,89%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu masih membutuhkan SDM bidang TIK dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya berliterasi baik itu literasi baca tulis, budaya, ekonomi maupun digital serta rendahnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya suatu arsip dinamis dan gangguan jaringan komunikasi.

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian telah melaksanakan sebanyak 2 (Dua) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 95,58%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum mencapai tingkat maksimal karena system Manajemen ASN belum terintegrasi oleh karenanya perlu adanya Platform digital yang mengelola segala informasi tentang manajemen ASN. Oleh Karena itu, Penguatan Data Base ASN dan pelaksanaan Sistem Manajemen ASn menggunakan Aplikasi yang terintegrasi tetap harus dilakukan.

Sasaran 4 Meningkatkan Kapsitas Pemerintah Desa telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 12 (Dua Belas) kegiatan. Adapun Program kegiatan tersebut adalah Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 98,18%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu penyebaran penduduk belum merata sehingga daerah yang padat penduduknya tidak memiliki tanah gerapan, perbedaan adat kebiasaan dan Tingkat sosial ekonomi disetiap desa dan mayoritas penduduk desa bermata pencaharian belum tetap.

Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja dan didukung sebanyak 108 (Seratus Delapan) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Terjaganya Kualitas Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan telah melaksanakan sebanyak 4 (Empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Penatagunaan Tanah dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggrannya mencapai 76,77%. Adapun kendala yang dihadapi dalam jangka pendek yaitu penganggaran secara optimal setiap tahunnya agar target yang diinginkan tercapai.

Sasaran 2 Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara telah melaksanakan sebanyak 8 (Delapan) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan. Adapun Program kegiatan tersebut adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidika, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan. Dari keseluruhan Program yang telah dilaksanakan realisasi anggaran mencapai 96,71%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu kekurangan kesadaran dan Perusahaan dan Masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu melakukan sosialisasi dan monitoring di lapangan secara intens.

Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Bencana telah melaksanakan sebanyak 4 (Empat) Program dan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penanganan Bencana. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi jangka pendeknya yaitu kualitas anggota Satpol PP dan

SATLINMAS dalam tanggapan, kesiapsiagaan serta reaksi penanganan cepat bencana yang harus terus ditingkatkan kualitasnya serta dalam membagi personal kedalam kelompok berdasarkan klasifikasi zona wilayah serta perbedaan intensitas resiko. Keseluruhan Program yang telah dilaksanakan realisasi anggaran mencapai 64,81%.

Tujuan 6 Melestariakan Seni Budaya Lokal

Memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Dan disukung sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Investasi Event Seni Budaya yang diselenggarakan telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dan 4 (Empat) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Dari keseluruhan Program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 92,06%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu perbedaan latar belakang dan identitas suku agama masyarakat yang rentan digunakan sebagai pemecah pemersatu melalui politik. Oleh karenanya menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda serta memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat.

Sasaran 2 Menurunnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 15 (Lima Belas) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 97,34%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya koordinasi antar pihak dan Lembaga terkait untuk pencegahan terjadinya potensi konflik.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2024 dengan total Belanja Daerah sebesar Rp. **2.065.783.272.596,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **1.883.328.034.731,00** atau **91,17%**. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kab. Konawe Utara Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Selisih Lebih	%
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.682.000.000,00	11.578.106.644,00	5.896.106.644,00	203,77
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.940.000.000,00	948.181.120,00	991.818.880,00	48,88
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan	11.947.282.906,00	11.947.282.906,00	0,00	100,00
6	Lain-lain PAD yang sah	17.603.194.000,00	49.946.675.795,00	32.343.481.795,00	283,74
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	37.172.476.906,00	74.420.246.465,00	37.247.769.559,00	200,20
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	66.244.799.501,00	46.597.617.000,00	19.647.182.501,00	70,34
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya	1.126.648.383.920,00	1.145.729.094.000,00	19.080.710.080,00	101,69
12	Dana Alokasi Umum	498.804.310.000,00	498.052.424.077,00	751.885.923,00	99,85
13	Dana Alokasi Khusus	107.844.343.000,00	105.726.114.949,00	2.118.228.051,00	98,04
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	77.888.294.000,00	73.600.081.821,00	4.288.212.179,00	94,49
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)	1.877.430.130.421,00	1.869.705.331.847,00	7.724.798.574,00	99,59
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DID	26.345.403.000,00	26.345.403.000,00	0,00	100,00
19	Dana Desa	119.707.457.000,00	119.706.345.464,00	1.111.536,00	100,00
20	Jumlah Transfer Pemeritnah Pusat Lainnya (16 s/d/ 19)	146.052.860.000,00	146.051.748.464,00	1.111.536,00	100,00
21	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.036.336.760,00	46.537.661.048,00	11.501.324.288,00	132,83
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah 22 s/d 23	35.036.336.760,00	46.537.661.048,00	11.501.324.288,00	132,83
25	BANTUAN KEUANGAN				
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya			0,00	0,00
27	Jumlah Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Total Pendapatan Transfer (15 +20+24+27)	2.058.519.327.181,00	2.062.294.741.359,00	3.775.414.178,00	100,18
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				

30	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	906.608.307,00	406.608.307,00	181,32
31	Kapitasi JKN	0,00		0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	6.754.968.295,00		6.754.968.295,00	0,00
33	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 30 s/d 32)	7.254.968.295,00	906.608.307,00	6.348.359.988,00	12,50
34	JUMLAH PENDAPATAN 97+28+33)	2.102.946.772.382,00	2.137.621.596.131,00	34.674.823.749,00	101,65
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	420.700.176.653,39	355.140.363.407,00	65.559.813.246,39	84,42
38	Belanja Barang dan Jasa	669.164.484.762,24	639.319.257.295,00	29.845.227.467,24	95,54
39	Bunga	19.144.421.304,00	4.046.032.653,00	15.098.388.651,00	
40	Subsidi	0,00	0,00	0,00	
41	Hibah	95.040.385.833,00	86.645.103.210,00	8.395.282.623,00	91,17
42	Bantuan Sosial	1.318.423.155,00	1.316.886.000,00	1.537.155,00	99,88
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.205.367.891.707,63	1.086.467.642.565,00	118.900.249.142,63	90,14
44	BELANJA MODAL				
45	Belanja Tanah	19.400.010.000,00	14.796.757.934,00	4.603.252.066,00	76,27
46	Belanja Peralatan dan Mesin	164.873.292.939,13	161.816.475.516,00	3.056.817.423,13	98,15
47	Belanja Gedung dan Bangunan	261.971.548.372,19	228.405.672.385,00	33.565.875.987,19	87,19
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	360.236.681.877,05	346.123.000.447,00	14.113.681.430,05	96,08
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.689.847.700,00	3.221.269.500,00	1.468.578.200,00	68,69
50	Belanja Aset Lainnya	26.244.000.000,00	22.144.413.442,00	4.099.586.558,00	84,38
51	Jumlah Belanja Modal (45 s/d 50)	837.415.380.888,37	776.507.589.224,00	60.907.791.664,37	92,73
52	BELANJA TAK TERDUGA				
53	Belanja Tak Terduga	23.000.000.000,00	20.352.802.942,00	2.647.197.058,00	88,49
54	Jumlah Belanja Tak Terduga	23.000.000.000,00	20.352.802.942,00	2.647.197.058,00	88,49
55	JUMLAH BELANJA (43+51+54)	2.065.783.272.596,00	1.883.328.034.731,00	182.455.237.865,00	91,17
56	TRANSFER				
57	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
58	Bagi Hasil Pajak	2.012.015.739,00	1.069.555.771,00	942.459.968,00	53,16
59	Bagi Hasil Retribusi	556.333.490,00	93.257.629,00	463.075.861,00	16,76
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s/d 60)	2.568.349.229,00	1.162.813.400,00	1.405.535.829,00	45,27
62	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN				
63	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
64	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa	223.511.720.500,00	223.510.608.964,00	1.111.536,00	100,00
65	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (63 s/d 65)	223.511.720.500,00	223.510.608.964,00	1.111.536,00	100,00
67	JUMLAH TRANSFER (59+64)	226.080.069.729,00	224.673.422.364,00	1.406.647.365,00	99,38
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (53+65)	2.291.863.342.325,00	2.108.001.457.095,00	183.861.885.230,00	91,98
69	SURPLUS/DEFISIT (32-66)	188.916.569.943,00	29.620.139.036,00	218.536.708.979,00	15,68
70	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	310.998.277.498,00	310.998.277.498,00	0,00	100,00
73	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Jumlah Penerimaan (72 s/d 78)	310.998.277.498,00	310.998.277.498,00	0,00	100,00
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	100,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	115.581.707.555,00	115.081.307.554,00	500.400.001,00	99,57
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan bank	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 87)	122.081.707.555,00	121.581.307.554,00	500.400.001,00	99,59
89	PEMBIAYAAN NETO (79-88)	188.916.569.943,00	189.416.969.944,00	500.400.001,00	100,26
90	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67+89)	0,00	219.037.108.980,00	219.037.108.980,00	0,00

Rasio penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi sebesar 93,79% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 73,64% menunjukkan efektifnya penggunaan anggaran Tahun 2024, namun demikian pencapaian tersebut termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun Realisasi anggaran dibandingkan dengan Realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran Dan Realisasi Anggaran

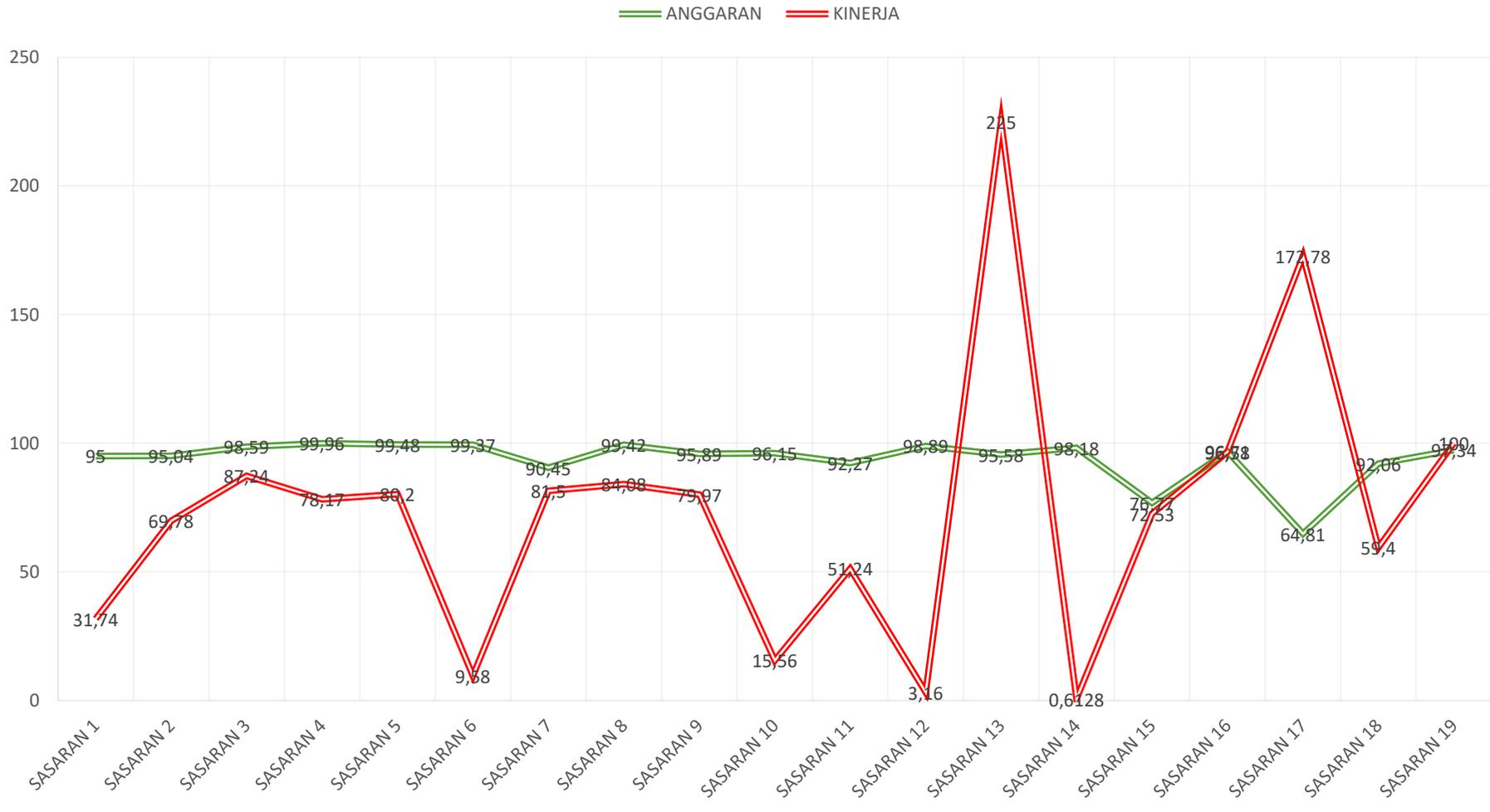
Sasaran Strategis		Tingkat Efisiensi		
		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisien/Inefisiensi
		(%)	(%)	
Sasaran 1	Meningkatnya Akses Pendidikan	95	31,74	Efisien
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	95,04	69,78	Inefisien
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	98,59	87,24	Efisien

Sasaran 4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Produktif	99,96	78,17	Efisien
Sasaran 5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	99,48	80,2	Efisien
Sasaran 6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	99,37	9,58	Inefisien
Sasaran 7	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	90,45	81,5	Inefisien
Sasaran 8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	99,42	84,08	Efisien
Sasaran 9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	95,89	79,97	Efisien
Sasaran 10	Meningkatnya Investasi Daerah	96,15	15,56	Inefisien
Sasaran 11	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan Pengelolaan Data	92,27	51,24	Efisien
Sasaran 12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	98,89	3,16	Efisien
Sasaran 13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	95,58	225	Efisien

Sasaran 14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	98,18	0,6128	Inefisien
Sasaran 15	Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	76,77	72,53	Efisien
Sasaran 16	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara	96,71	96,58	Efisien
Sasaran 17	Terwujudnya Tatakelola dan Manajemen Bencana	64,81	172,78	Efisien
Sasaran 18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya Yang Diselenggarakan	92,06	59,4	Efisien
Sasaran 19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	97,34	100	Efisien
Rata - Rata		93,79	73,64	

- Tabel Sasaran Starategis/Program/Kegiatan, anggaran dan Kinerja secara rinci akan disajikan dalam lampiran

GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA



BAB IV
PENUTUP

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan pada BAB II terkait pencapaian Sasaran RPJMD 2021-2026 tahun kedua, atau pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kabupaten Konawe Utara 2023, disajikan sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Laporan ini merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Hasil evaluasi menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian seluruh sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Secara umum, pencapaian target indikator beberapa SKPD berada pada rata-rata 80,40%, yang dapat dikategorikan "Baik". Berdasarkan analisis pengukuran kinerja sasaran, rata-rata capaian sebesar 103,75% menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berjalan dengan "Sangat Baik", ditandai dengan terealisasinya program-program yang mendukung capaian tujuan dan sasaran.

Namun, terdapat beberapa indikator sasaran yang memerlukan perhatian untuk lebih dioptimalkan pada tahun mendatang. Selain itu, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya tercapai akibat kendala geografis dan kondisi alam.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sekaligus memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, visi jangka menengah Kabupaten Konawe Utara, yakni "Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing", dapat terwujud.

Wanggudu, 10 Februari 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 



UKSAMIN

LAMPIRAN 1 : DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

- 1 -



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

14

6. Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Konawe Utara;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Bagian Organisasi Sekretariat daerah yang selanjutnya disebut Bagian organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;

t 4

- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

**BAB III
SISTEMATIKA**

Pasal 5

IKU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
- BAB III PENUTUP

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

BUPATI KONAWA UTARA, 

RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022


4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA 
KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2022 NOMOR : 467

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

† †

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan PD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta bertanggung jawabkan kerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KONAWA UTARA, 
RUKSAMIN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR

: 49

TANGGAL

: 3 FEBRUARI 2022

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296	
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah seluruh tahun Pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikali seratus	9,404	9,598	9,792	9,986	10,180	10,374	
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah penduduk yang bersekolah tahun n dibagi jumlah penduduk usia sekolah	13,066	13,302	13,358	13,774	14,01	14,246	
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	IPM perempuan dibagi IPM laki-laki	86,413	86,656	86,90	87,14	87,38	87,63	
		Kota Layak Anak (Kategori)	Hasil perhitungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak indonesia atas pemenuhan dan perlindungan anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Jumlah penduduk usia kerja dibagi jumlah penduduk keseluruhan kabupaten dikali seratus	75,14	75,84	76,54	77,23	77,93	78,63	
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor PPH kabupaten dibagi skor PPH ideal dikali 100	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	

14

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	Jumlah penduduk miskin pada tahun n dikurangi jumlah penduduk miskin pada tahun n-1 dibagi penduduk miskin pada tahun n-1 dikali 100	12,87	12,21	11,55	10,89	10,23	9,57	
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah (Persen)	Jumlah ruas jalan/jalur pelayaran yang menghubungkan antar kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikalikan seratus	85,84	86,53	87,22	87,91	88,6	89,29	
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	Panjang jalan dan jembatan kondisi mantap dibagi Panjang jalan kabupaten dikalikan seratus	84,80	85,58	86,35	87,13	87,90	88,68	
		Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi (Persen)	Luas Daerah irigasi yang terlayani dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikalikan seratus	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	
2.2.8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	Jumlah luas Kawasan yang tidak kumuh dibagi luas wilayah permukiman dikalikan seratus	46,00	49,75	53,50	57,25	61,00	64,75	
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	Jumlah rumah tangga yang pengguna air minum layak dibagi rumah tangga keseluruhan kabupaten dikali seratus	56,86	59,20	61,54	63,88	66,22	68,79	
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak dibagi jumlah rumah tinggal kabupaten dikalikan seratus	39,28	54,28	56,62	58,96	61,3	63,64	
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	Jumlah kecamatan yang terlayani pengelolaan sampah dibagi total kecamatan dikali seratus	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	

14

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Pertambahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu pada suatu daerah	4,9	5,238	5,576	5,914	6,252	6,59	
		PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	Jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk	61,178	61,5082	61,839	62,169	62,500	62,831	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali seratus	3,747	3,70	3,661	3,618	3,575	3,532	
		Indeks Gini (Indeks)	Ketimpangan pendapatan secara keseluruhan	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	
		Tingkat Kemiskinan (Persen)	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali seratus	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n dikurangi PDRB tahun n-1 dibagi PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n-1 dikali seratus	39,888	40,026	40,164	40,302	40,440	40,578	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n dikurangi PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n-1 dibagi PDRB pertambangan dan penggalian tahun n-1 dikali seratus	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi PDRB sektor perdagangan tahun n-1 dibagi PDRB perdagangan tahun n-1 dikali seratus	11,802	11,824	11,846	11,868	11,890	11,912	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	PDRB sektor industri pengolahan tahun n dikurangi PDRB sektor	1,138	1,146	1,154	1,162	1,17	1,178	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengolahan (Persen)	industri pengolahan tahun n-1 dibagi PDRB industri pengolahan tahun n-1 dikali seratus							
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata tahun n dibagi jumlah keseluruhan PAD kabupaten dikali seratus	0,043	0,0534	0,063	0,073	0,083	0,093	
		Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	Jumlah keseluruhan penerimaan dari sektor koperasi kabupaten	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun n dikurangi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dibagi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dikali seratus	13,488	15,116	16,744	18,372	20	21,628	
4.4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	50,242	50,404	50,566	50,728	50,89	51,052	
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	B	B	B	B	B	B	
		Opini BPK (Kategori)	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern	1	2	3	3	3	3	
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Indeks)	Hasil penilaian dari Kementrian Komunikasi dan Informasi atas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	1,38	1,46	1,54	1,62	1,7	1,78	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Jumlah perangkat daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dibagi total perangkat daerah secara keseluruhan dikali seratus	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System (Indeks)	Hasil penilaian dari Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) atas penerapan system merit dalam kebijakan dan manajemen ASN instansi Pemerintah	177	192	207	222	237	252	
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	Indeks status kemajuan dan kemandirian desa hasil penilaian kementerian desa, PDT dan transmigrasi	0,5945	0,6037	0,6127	0,6218	0,6309	0,64	
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Hasil perhitungan dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kab. Konawe Utara dibagi luas total wilayah keseluruhan RTRW Kab. Konawe Utara dikali seratus	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	
5.5.16	Menurunnya tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	Hasil pengujian kualitas air ditambah pengujian kualitas udara	93,316	94,0576	94,798	95,539	96,28	97,02	
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Hasil penilaian Badan Penanggulangan Bencana Nasional atas resiko bencana daerah	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	Jumlah Lembaga adat yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah Lembaga adat	100	100	100	100	100	100	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			keseluruhan kabupaten dikali seraus							
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	Banyaknya festival dan budaya yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu	1	2	3	4	5	5	
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	Hasil survey penilaian Kementerian Agama atas penilaian kerukunan umat beragama	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14	
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	Jumlah kasus konflik yang tertangani dibagi jumlah total keseluruhan kasus dikali seratus	100	100	100	100	100	100	



BUPATI KONAWE UTARA,



RUKSAMIN

LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

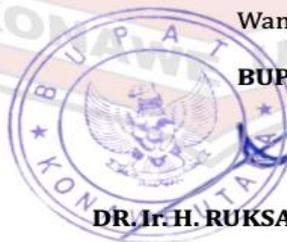
Nama : DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU ASEAN Eng.
Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Wanggudu, 02 Januari 2024

BUPATI KONAWE UTARA



DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU ASEAN Eng.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,484
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,986
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,774
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,84
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87,14
		Kota Layak Anak (Kategori)	Madya
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (Persen)	77,23
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	83,56
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	10,89
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan/ Konektivitas Wilayah (Persen)	87,91
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	87,13
		Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang terlayani jaringan irigasi (Persen)	69,47
2.2.8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	90,99
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	63,88
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	58,96
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	28,38

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,914
		PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	62,169
		Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,618
		Indeks Gini (Indeks)	0,372
		Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,01
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	40,302
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	21,44
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	11,868
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	1,162
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	0,073
		Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	850.223
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	18,372
4.4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	50,728
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	BB
		Opini BPK (Kategori)	WTP
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	3
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektornik) (Indeks)	1,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,62

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System	222
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	0,6218
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	62,16
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	81,96
5.5.16	Menurunkan Tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	95,53
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	165,64
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	100
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	4
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	75,4
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	84,01%	831.463.330
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	58%	12.977.463.180
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100%	1.047.439.500
4.	Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	13.096 unit	1.104.975.100
5.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	76,92%	3.909.999.408
6.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan	75,96%	5.366.916.178
		Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	81,15%	
7.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	80 orang	1.076.245.740
8.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	2 hari	751.735.500
9.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	4 situs	809.296.679
10.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	11,775 orang	2.924.139.150
11.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	100%	11.728.600
12.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	100%	379.409.400
13.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	82,06%	2.381.290.450
		Cakupan PUS Unmeetneed	0,05%	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
14.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	77,70%	191.953.400
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	100%	2.284.869.000
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa Siaga Aktif	116 desa	738.788.075
		Jumlah posyandu aktif	165 unit	
		Persentase Rumah Tangga ber PHBS	93%	
		Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	100%	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	66%	2.286.952.030
18.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan	56,52%	2.754.578.364
19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru	0,77%	2.723.014.749
20.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)	95%	423.885.150
21.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	100%	242.291.900
22.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif	11,957 Orang	3.471.798.135
23.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	58,13	1.726.129.800
24.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	73%	602.867.200
25.		Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	1,18	121.236.329.534

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	131	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,2%	
		Prevalensi kasus Stunting	10,4%	
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000	0,32	
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk	131	
		Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	23	
		Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat	6-5 hari	
		Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	75%	
26.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	64 unit	44.247.005.080
		Nilai EKPPD	baik	
27.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	408.045.600
28.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	100%	250.574.400
		Persentase penanganan kerawanan pangan	100%	
29.	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	9 desa	10.123.864.617
30.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase isian aplikasi SI-BPB	64%	110.376.715.900
31.	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	100%	17.063.471.916
32.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten	100%	10.000
33.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	100%	349.289.300

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
34.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah WMK	71,2%	512.897.750
35.	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	100%	428.638.210
36.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	81,08%	713.646.490
37.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	40%	1.788.819.400
38.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	367 orang	676.706.000
39.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase MHA yang Terakui	100%	8.985.150
40.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik	8,05%	141.146.450
41.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	37,95%	437.293.860
42.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.928 Kkl/Kapita/Hari 76,85 Gr/Kapita/Hari	224.100.850
43.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	60%	49.900.000
44.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE	5 aplikasi	9.866.599.940
45.	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	27,31%	660.028.100
46.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset pemda yang terinventarisir	90%	6.409.354.450

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
47.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	9.563 KK	3.082.493.200
48.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	45,77 %	3.614.000.000
49.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	18.976 unit	14.420.632.820
50.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	442 izin	116.636.050
		Survey kepuasan masyarakat	79,21%	
51.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	9 OPD	508.297.450
52.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	69%	1.801.760.850
53.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	78,04%	42.220.279.775
54.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu	275.899.240.887
		Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	4,53%	
55.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	100%	5.301.751.162
56.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	35%	806.978.625
57.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM	89%	192.107.091.604
		APK SD	105,79	
		APK SMP	84,13	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
		APM SD	99,07	
		APM SMP	80,45	
		Persentase SD Terakreditasi Minimal B	20,19%	
		Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	47,22%	
58.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas perikanan budidaya	9.060,89	10.433.634.450
		Persentase kelompok pembudidaya yang dibina	80%	
59.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan	80%	5.986.968.298
		Produktivitas perikanan tangkap	15.419 ton	
60.	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	15,38%	4.556.842.335
61.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Base kependudukan terupdate	1 database	14.385.000
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	2.737,81 Ha	17.544.123.841
63.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	12,58%	815.137.470
64.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif	50%	2.068.189.659
65.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi	4 perbup	23.246.700
66.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	8 cabor	8.004.663.015
67.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	13 organisasi	2.513.357.350

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
68.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	100%	6.808.799.244
69.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan	62%	10.570.424.200
70.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam	5%	66.077.650
71.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	85,74%	662.375.400
72.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	100%	717.854.550
73.	Program Pengembangan Umkm	Jumlah UMKM yang dibina	50 UMKM	277.771.450
74.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	75%	39.455.900
75.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT	14%	22.213.266.696
		Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	100%	
76.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak	65%	432.000.000
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	100%	569.981.000
78.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	2,30 91,57	1.336.893.440
79.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	7,76%	1.218.698.450
80.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan	15,06%	340.480.600

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
81.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	90%	10.026.300
82.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	65%	1.164.121.600
83.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	79,24%	1.416.739.350
84.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	19%	319.946.260
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	3 Hari	2.795.685.092
86.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan	10,60%	5.096.285.688
87.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	60,16	4.450.567.469
		Rasio perawat / 100.000 penduduk	165,44	
		rasio bidan / 100.0000 penduduk	235,17	
		Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit	80%	
88.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa Berkembang	79 Desa	1.500.000.000
89.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	20 kasus	2.390.513.224
90.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	100%	914.316.950
91.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	100%	341.948.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
92.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	90%	10.412.300
93.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	93,64%	42.600.086.050
94.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum	100%	6.365.275.994
95.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat	76,47%	1.439.817.457
		Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	88,24%	
96.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	100%	758.181.808.822
97.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan	2.335 ton	32.732.465.776
		Jumlah Produksi tanaman Hortikultura	166.356 ton	
		Jumlah Produksi tanaman pangan	108.159 ton	
		Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)	265,856 Kg	
98.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan	2.335 ton	10.273.217.015
		Produktivitas tanaman pangan	523,58 Kw/Ha	
99.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	609,88 Km	329.668.866.589

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
100.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	38,78%	905.772.045
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	88,50%	
101.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	54,78%	258.153.398
102.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	81,96%	4.365.997.000
103.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	80,62%	4.933.185.350
104.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	55%	491.715.800
105.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%	15.747.450
106.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	100%	24.643.272.550
107.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	100%	2.982.561.267
108.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	95%	2.454.696.492
109.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian	52,12%	663.292.350
110.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi	100%	388.201.510
111.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	100%	25.082.150

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
112.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja	100%	33.570.000
113.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan	95,63%	2.754.385.150
		Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	100%	
		Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	22,27%	
114.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	30%	48.955.000
115.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	36,01%	549.496.200
116.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	28,41%	116.540.550
117.	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti	1 orang	630.473.750
118.	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan/ditangani	1 orang	828.452.600
119.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	76,83 Ha	3.000.102.000
120.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	2.015.148.950
121.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp. 232,32 Milyar	181.094.000
122.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	40%	2.177.900.235
123.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien	10 sertifikat	106.416.000
		Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat	15 rekomendasi	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
		Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit	80%	
124.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi jenis barang penting	50%	2.120.106.742
125.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	52,12%	342.752.450



Lampiran 4 Tabel Rincian Sasaran, Program, Kegiatan, Realisasi Anggaran Dan Kinerja Tahun 2024

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Daya Saing dan Sumber Daya Manusia

Tujuan /Sasaran/Program		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	OPD
T1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	181.671.634.491,22	172.673.333.462,00	95%	31,74	31,68	97,57	Dinas P dan K
SS 1	Meningkatnya Akses pendidikan							
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.671.634.491,22	172.673.333.462,00	95%	100	100	100	
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan							
	<i>Perensetase Pengelolaan Pendidikan</i>							
	Pengelolaan pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	19.023.826.936,00	16.600.791.053,00	87,26	100	100	100,00%	
	Tterlaksananya Pengelolaan pendidikan Anak Usia dini (PAUD)							
	Persentase Pengelolaan pendidikan Anak Usia dini (PAUD)							
	Pengelolaan Pendidkan Sekolah dasar	94.936.567.553,42	91.293.402.207,00	96%	100	100	100,00%	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidkan Sekolah dasar							
	Persentase Pengelolaan Pendidkan Sekolah dasar							
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	86.735.066.937,80	81.379.931.255,00	93,82	100	100	100,00%	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
	Persentase pelaksanaan pengelolan pendidikan sekolah menengah pertama							
SS 2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	137.818.289.141,57	130.987.145.005,00	95,04	71,84	69.78	97,13	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup							
	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup							
	Persentase Prevalensi Gizi Buruk							
	Persentase Prevalensi Stunting Pada Balita							
	Prevalensi TB Paru per 100.000 Penduduk							
	Angka Rasio Puskesmas Per 1.000 Penduduk							
	Angka Rasio dokter per 100.000 penduduk							

	Angka Rasio Perawat per 100.000 penduduk				165,44 Rasio	596 Rasio	100%	
	Angka Rasio Bidan per 100.000 penduduk				235,17 Rasio	574 Rasio	100%	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	124.661.657.314,57	118.422.008.358,00	95%	131 Angka Kelahiran Hidup	77,58 Angka Kelahiran Hidup	100%	
	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup				1,18 Angka Kelahiran Hidup	4,65 Angka Kelahiran Hidup	25%	
	Prevalensi Gizi Buruk				0,20%	0,16%	100%	
	Prevalensi Stunting pada Balita				10,40%	5,37%	100%	
	Prevalensi TB Paru per 100.000 Penduduk				131 per 100.000 Penduduk	253 per 100.000 Penduduk	52%	
	Rasio Puskesmas per 1000 Penduduk				0,32 Rasio	0,32 Rasio	100%	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Baik Secara Kuantitas Maupun Kualitas	60.073.450.373,49	58.552.215.626,00	97%				
	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Standar	64.588.206.941,08	59.690.743.832,00	90%				
	Persentase Layanan Kesehatan UKM & UKP							
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	211.238.900,00	179.048.900,00	85%	100%	100%	100%	
	Persentase Kegiatan SIK Terintegrasi							
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.984.789.869,00	1.650.012.148,00	83%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk				60,16 Rasio	67,72 Rasio	100%	
	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk				164,44 Rasio	596 Rasio	100%	

	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk				235,17 Rasio	574 Rasio	100%		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	236.061.000,00	236.061.000,00	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		
	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	297.622.000,00	257.364.400,00	86%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya Perencanaan, Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM								
	Persentase SDM di Puskesmas								
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.451.106.869,00	952.430.748,00	66%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)								
	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan SDM								
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	204.508.000,00	204.156.000,00	100%	10 Sertifikat	2 Sertifikat	20%	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kuantitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman								
	Jumlah Sertifikat Laik Higiene								
	Jumlah Rekomendasi Izin Apotik/Toko Obat								
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	204.508.000,00	204.156.000,00	100%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan								
	Persentase Usaha yang Mendapatkan Rekomendasi Izin								
4	PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	943.778.347,00	791.931.750,00		165 Posyandu	171 Posyandu	100%		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
	Jumlah Posyandu Aktif								
	Persentase Rumah Tangga ber PHBS								
					93%	57%	61,29%		

	Jumlah Desa Siaga Aktif				116 Desa	40 Desa	34%	
	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	302.808.672,00	256.525.100,00	85%	95%	85%	89%	
	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat Kesehatan</i>							
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif	166.398.600,00	66.312.750,00	40%	95%	100%	100%	
	Persentase Upaya Promotif dan Preventif							
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	474.571.075,00	469.093.900,00	99%	10 Kegiatan	22 Kegiatan	100%	
	Jumlah Kegiatan UKBM							
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							RSUD
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.023.555.611,00	9.919.036.749,00	98,96				
	Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Perhari				23 Orang	40 Orang	173.91	
	Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat Penggunaan Tempat Tidur				75%	49.10%	65:46:00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Baik Secara Kuantitas Maupun Kualitas	6.533.167.611,00	6.514.857.129,00	99,72	100	90	90	
	Persentase Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP				100%	50%	50	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							RSUD
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Standar	3.121.188.000,00	3.034.979.620,00	97,24	100	100	100	
	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP							

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	369.200.000,00	369.200.000,00	100,00	100	100	100	
	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
	Length Of Stay (LOS) / rata rata lama hari dirawat (dibandingkan dengan standar nasional)	2.804.000.000,00	2.804.000.000,00		6 - 5 Hari	5-4 Hari	125	RSUD
	Emergency Respon time rate kurang dari 5 Menit				80%	100%	125	
	Kecepatan Pelayanan resep obat jadi kurang dari 30 menit				80%	100%	125	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.804.000.000,00	2.804.000.000,00	100,00	100	100	100	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
	Length Of Stay (LOS) / rata rata lama hari dirawat (dibandingkan dengan standar nasional)							
	Emergency Respon time rate kurang dari 5 Menit							
	Kecepatan Pelayanan resep obat jadi kurang dari 30 menit							
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.804.000.000,00	2.804.000.000,00	100,00	100	100	100	RSUD
	Terpenuhinya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
	Persentase Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM							
SS 3	Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan hak anak	14.591.124.185,00	14.385.098.280,00	98,59	87,14	87,24	100,11	DPPPA
	Persentase Perempuan yang bekerja di bidang Pemerintahan Politik dan Ekonomi	584.420.200,00	577.062.400,00	98,74	45,62	15	32,88%	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	235.114.400,00	235.114.400,00	100	100	100	100	
	Meningkatnya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							
	Persentase Meningkatnya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							

	Meningkatnya Perlindungan perempuan	1.022.763.700,00	1.021.963.700,00	99,93	100	99,93	99,93	
	<i>Persentase meningkatnya perlindungan perempuan</i>							
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	408.386.350,00	407.586.350,00	99,80	100	99,80	99,80	
	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300.233.450,00	300.233.450,00	100	100	100	100	DPPPA
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	<i>Persentase Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.143.900,00	314.143.900,00	100	100	100	100	
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	469.979.050,00	439.999.730,00	93,63	100	93,63	93,63	DPPPA
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak							
	Persentase Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak							
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerint							

	Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	133.070.900,00	133.070.900,00	100	100	100	100	
	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	336.908.150,00	306.928.830,00	91,11	100	91,11	91,11	
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	725.006.750,00	725.006.750,00	100	100	100	100	DPPPA
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak'							
	Persentase Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak'							
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	523.958.700,00	523.958.700,00	100	100	100	100	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.048.050,00	201.048.050,00	100	100	100	100	
	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

	Persentase penduduk tumbuh kembang	11.788.954.485,00	11.621.065.700,00	98,58				
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							PP dan KB
	Meningkatnya Penduduk tumbuh seimbang	1.983.360.700,00	1.927.737.000,00	97,20%	1,41	1,57	113,47	
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk							
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.140.151.750,00	1.084.860.000,00	95,15%	100	100	100	
	Persentase Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah							
	Meningkatkan Perkiraan Pengendalian Penduduk	843.208.950,00	842.877.000,00	100%	100	100	100	
	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk							
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							PP dan KB
	Meningkatnya Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.797.731.185,00	5.757.520.500,00	99%	70,25	70,89	100,91	
	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif							
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.226.315.050,00	1.226.163.500,00	99,99%	100	100	100	
	Persentase capaian Advokasi dan KIE							
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							PP dan KB
	Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.564.439.050,00	1.563.845.000,00	99,96	100	100	100	
	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							PP dan KB

	Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.573.474.485,00	2.534.010.000,00	98,47%	99,99	99,99	99,99	
	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi							
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							PP dan KB
	Ditetapkannya harga minimum pangan pokok lokal oleh pemerintah	433.502.600,00	433.502.000,00	100%	100	100	100	
	Persentase Peran serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							PP dan KB
	Meningkatnya Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4.007.862.600,00	3.935.808.200,00	93,63	83,2	83,98	100,93	
	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera							
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.198.671.650,00	3.141.603.000,00	98,22%	100	100	100	
	Persentase Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan Keluarga							
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	809.190.950,00	794.205.200,00	91,11	100	91,11	91,11	PP dan KB
	Persentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Keluarga							
SS 4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	3.868.897.141,63	3.867.423.280,00	99,96	77,24	78,17	108,21	Trans Naker

	Persentase penyerapan Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	1.218.528.000,00	1.217.738.360,00	99,99%	85,00%	90,25%	106,17	
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
	Terselenggaranya Perencanaan Tenaga Kerja	105.678.000,00	105.678.000,00	100	100 %	100%	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersedia							
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	105.678.000,00	105.678.000,00	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang terlaksana							
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							Trans Naker
	Meningkatnya Besaran Pencari Kerja yang di tempatkan	1.112.850.000,00	1.112.060.360,00	99,93	367 Orang	176 orang	47,96	
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan							
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							
	Tersedianya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	48.970.000,00	48.970.000,00	100	80 Persen	61 Persen	76,25	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	1.063.880.000,00	1.063.090.360,00	99,93	12 Laporan	12 Laporan	100	
	Jumlah Data Bursa Kerja / Pencari kerja yang Tersedia							
	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.270.951.740,00	1.270.269.740,00	99,92	25%	16,85%	67,40	Trans Naker
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
	Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.270.951.740,00	1.270.269.740,00	99,92	80 Orang	80 Orang	100	
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kompetensi							
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	118.703.340,00	118.700.000,00	99,99	75 Orang	80 Orang	106,66	
	Jumlah Peserta Pelatihan							
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.152.248.400,00	1.151.569.740,00	99,92	3 Dokumen	3 Dokumen	100	

	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang terlaksana							
	Meningkatnya Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.379.417.401,63	1.379.415.180,00	99,99	75%	58,33%	77,77	Trans Naker
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak							
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.379.417.401,63	1.379.415.180,00	99,99	5 Kasus	5 Kasus	100	
	Terselenggaranya Hubungan Industrial Yang Baik							
	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	850.148.901,63	850.146.680,00	99,99	5 Perusahaan	4 Perusahaan	80	
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola kerja yang Layak							
	Persentase Kelengkapan Dokumen Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan							
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	529.268.500,00	529.268.500,00	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial							
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditindaklanjuti							
SS 5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8.605.866.238,00	8.561.704.670,00	99,48	83,56	80,2	95,96%	Dinas Ketahan Pangan
	Tercapainya konsumsi energi perkapita 2200 kkal/hati dan protein perkapita 63 Gram /hari	8.605.866.238,00	8.561.704.670,00	99,48	2200	2120	96,36%	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.016.263.450,00	1.001.020.000,00	98,50	100%	120%	120%	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur							
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan							
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.016.263.450,00	1.001.020.000,00	99%	15 Unit	7 Unit	73%	Dinas Ketahan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah							
	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan pemerintah yang tersedia							

2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.338.411.968,00	5.327.819.550,00	100%	81,93%	81,93%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
	Skor Pola Pangan Harapan							
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	727.928.050,00	718.147.850,00	99%	100%	100%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan							
	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia							
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.433.633.914,00	1.432.870.500,00	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan.							
	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang diadakan							
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	11.348.600,00	11.348.600,00	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Ditetapkannya harga minimum pangan pokok lokal oleh pemerintah							
	Persentase harga minimum pangan pokok lokal oleh pemerintah							
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3.165.501.404,00	3.165.452.600,00	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.069.750.720,00	2.051.425.020,00	99,11%	100%	100%	100%	Dinas Ketahan Pangan
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Presentase Penanganan Kerawanan Pangan							

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
	Terlaksananya kegiatan penyusunan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	33.565.050,00	33.565.050,00	100%	100%	100%	100%	
	Memutakhirkan peta kerentanan dan ketahanan pangan							
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							Dinas Ketahan Pangan
	Terlaksananya kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.036.185.670,00	2.017.859.970,00	99,09%	100%	100%	100%	
	Persenatse Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	181.440.100,00	181.440.100,00	100%	100%	100%	100%	
	<i>Presentase Pengawasan Keamanan Pangan</i>							
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Ketahan Pangan
	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	181.440.100,00	181.440.100,00	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
SS 6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin/rentan	6.140.610.019	6.101.829.650	99,37	10,23	9,58%	98,60	Dinas Sosial
	Persentase penurunan Warga miskin (DTKS/Data terpadu kesejahteraan sosial)	6.140.610.019	6.101.829.650	99,37	10,89	0,00%	0,00	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
	Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin/ Rentan	3.492.300.764,00	3.457.676.250,00	99,01%	57%	51%	57%	
	Percentase pemberdayaan sosial masyarakat							
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.492.300.764,00	3.457.676.250,00	99,01%	100%	100%	100%	
	Percentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							

2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	2.368.103.155,00	2.364.949.400,00	99,87%	100%	73%	73%	
	<i>Percentase Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya</i>							
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	367.512.850,00	366.606.000,00	99,75%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>							
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.000.590.305,00	1.998.343.400,00	99,89%	1000 Orang	1000 Orang	100%	Dinas Sosial
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	280.206.100,00	279.204.000,00	99,64%	55%	45%	83,15	
	<i>Persentase perlindungan dan jaminan sosial masyarakat</i>							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	280.206.100,00	279.204.000,00	99,64%	55%	45%	83,15	
	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							

Misi 2 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

T 2	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah							100,00%	Dinas PUPR
SS 7	Meningkatnya Kapasitas infrastruktur wilayah	359.735.455.214	325.371.975.458	90,45	81,5	81,5			
	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap				87,13	0			
	Persentase Daerah irigasi (DI) yang terlayani jaringan irigasi	358.950.330.914	324.586.851.158		69,47	0			
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
	Daerah irigasi dalam kondisi baik	17.599.752.839	17.463.502.904	99,22	69,47				
	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik								
	Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman Pantai pad awilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota								
	Terselenggaranya pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman Pantai pada wilayah Sungai (S) dala 1 (satu) Daerah Kab/kota	10.336.439.943	10.245.230.904	99,31%	100	100	100%		
	Persentase pengelolaan SDA dan Bangunan pengamanan Panati pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kab/kota								
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Dinas PUPR
	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.263.312.896	7.218.272.000	99,37%	100	100	100%		
	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								Dinas PUPR
	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	9.703.000.000	9.661.955.000	99,57	35,32				
	Proporsi Panjang Drainase Dalam Kondisi Mantap								
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.703.000.000	9.661.955.000	96,51%			100%		

	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							Dinas PUPR
	Terselenggaranya Penataan Bangunan gedung	87.077.394.900	65.750.895.160	75,5	80%			
	Persentase Program Penataan Bangunan Gedung							
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	87.077.394.900	65.750.895.160	75,51%			88%	
	Jumlah IMB dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							Dinas PUPR
	Persentase Penataan Ruang	3.900.000.000	3.875.571.250	99,37%				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.900.000.000	3.875.571.250	99,37%				
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
	Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	244.570.183.175	231.710.498.094		87,13			
	Presentasi Jalan dalam kondisi mantap							
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							
	Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	244.570.183.175	231.710.498.094	95,88%			100%	
	Presentasi Jalan dalam kondisi mantap							
	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah							PERHUBUNGAN
	Persentase kendaraan angkutan orang dan barang yang layak jalan	785.124.300	785.124.300	100	0	0	0	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
	Menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas	785.124.300,00	785.124.300,00	100,00	0	0	0	
	Persentase angka keselamatan dan disiplin angkutan jalan							

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota							
	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten Kota	339.189.600,00	339.189.600,00	100%	100	100	100,00%	
	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas							
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26.072.000,00	26.072.000,00	100%	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Jumlah Laporan Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan							
	Terlaksananya Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	49.701.450,00	49.701.450,00	100%	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Jumlah laporan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan							
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	122.758.650,00	122.758.650,00	100%	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
	Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	247.402.600,00	247.402.600,00	100%	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Jumlah Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							
7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							PERHUBUNGAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas (Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran)	6.901.751.162,00	3.515.559.852,00	50,94				
	<i>Persentase Pelabuhan Rakyat /Dermaga Rakyat yang berfungsi Baik</i>							
	Pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal							

	Meningkatnya pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	6.599.980.310,00	3.213.789.000,00	49%				
	Persentase sarana prasarana dan fasilitas pembangunan							
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP							
	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP	47.748.600,00	47.748.600,00	100				
	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP							
	Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal							
	Terlaksananya Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	33.144.300,00	33.144.300,00	100				
	Jumlah Laporan Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal							
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal							
	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	152.430.652,00	152.430.652,00	100	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal							
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.447.300,00	68.447.300,00	100	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	Jumlah laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
SS 8	Terpenuhinya Sarana prasarana Kawasan permukiman	38.931.377.547,00	38.704.149.560,00	99,42	50,4	45,89	84,08	Dinas PUPR
	Rasio Akses Air Minum Layak	29.596.026.020,00	29.376.499.500,00	99,26	63,88	63,88	100	
	Rasio Akses Sanitasi Layak				58,96	58,96	100	

	Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	40.534.219,00	66.077.650,00	100	100	100	100	Perumahan
	Persentase Pengembangan Perumahan							
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana							
	Meningkatnya Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	40.508.650,00	40.508.650,00	100	70 Dokumen /300 unit rumah	70 Dokumen /300 unit rumah	100	
	Persentase Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana							
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							
	Meningkatnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.569,00	25.569.000,00	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							Perumahan
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.105.008.350,00	1.102.120.000,00	99,73	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman							
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha							
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha	1.105.008.350,00	1.102.120.000,00	99,73	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Persentase Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha							
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							Perumahan
	Meningkatnya jumlah dan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	8.189.808.958,00	8.159.452.410,00	100	88	88	100	
	Persentase Perumahan dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU yang berfungsi baik							
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							
	Meningkatnya Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.189.808.958,00	8.159.452.410,00	100	100	100	100	
	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan							

Misi 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai tambah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam guna meningkatkan Daya Saing Ekonomi

T3	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Anggaran	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	OPD
----	---	----------	-----------	---------	--------	-----------	---------	-----

SS 9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	98.178.273.006,01	94.138.811.408,00	95,89	88,17	52,73	79,97	Perikanan
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	49.544.022.950,00	49.423.143.564,00	99,76	40,30	39,7	98,51	
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.771.861.650,00	24.771.861.651,00	99,65%	15.149	15.463,33	100,29%	
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)				9.060	9.859,73	108,83%	
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)				1.433	1.599,47	111,63%	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.873.785.600,00	6.846.349.388,00	99,60	15.149	15.463,33	100,29%	
	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap							
	Jumlah produksi perikanan tangkap							
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelengan Ikan (TPI)	4.256.350,00	-	0,00%				
	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawadan Gangguan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab. Konawe Utara							
	Jumlah sarana perikanan tangkap yang disediakan							
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota	3.253.025.000,00	3.242.019.500,00	99,66%	80%	80%	100%	
	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota							
	Presentasi kelompok nelayan kecil yang dibina							
	Pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, dan genagan air lainnya	3.616.504.250,00	3.604.329.888,00	100,00	1 TPI	1 TPI	100%	
	Terlaksananya Pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, dan genagan air lainnya							
	Jumlah TPI Pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, dan genagan air lainnya							
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	16.484.354.100,00	16.394.443.925,00	99,53%	15.149	15.463,33	100,29%	Perikanan
	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya							
	Jumlah produksi perikanan tangkap							
	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	16.334.350.000,00	16.244.439.825,00	99,45%	50 Unit	50 Unit	100%	
	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							
	Jumlah Sarana dan Prasana Pembudidayaan ikan yang disediakan							
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	150.004.100,00	150.004.100,00	100 %	100 Orang	100 Orang	100%	
	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil							

	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan							
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							Perikanan
	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	49.900.000,00	49.900.000,00	100%	70 %	70%	100%	
	Presentase Pokmaswas yang dibina							
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							Perikanan
	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	49.900.000,00	49.900.000,00	100%	60%	60%	100%	
	Presentase Pokmaswas yang dibina							
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							Perikanan
	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.364.121.600,00	1.360.588.600,00	99,74%	1.433	1.599,47	111,63%	
	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan							
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.800.000,00	99.800.000,00	100%	25 Unit	25 Unit	100%	
	Jumlah Unit Usaha Pengolah dan Pemasar Ikan yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							
	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	49.980.000,00	49.980.000,00	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan							
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.214.341.600,00	1.210.808.600,00	99,71%	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100%	
	Jumlah Fasilitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan Skala Mikro dan Kecil yang disediakan							

	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	22.211.990.528,00	22.130.610.800,00	99,63				Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	4.752.092.850,00	4.734.343.500,00	99,63	11.775 orang	39.910 Orang	338,94	
	Lama Menginap Wisatawan	3.120.076.765,00	3.099.369.750,00	99,34	3 hari	3 hari	100	
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	3.233.825.649,00	3.231.592.150,00	99,93	0,07%	0,07%	100	
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.120.076.765,00	3.099.369.750,00	99,34	3 hari	3 hari	100	
	Lama Menginap							
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	84.983.700,00	84.717.600,00	99,69	85%	83%	97,64	
	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang menunjang urusan destinasi pariwisata							
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	955.790.100,00	955.615.100,00	99,98	56 kawasan	6 kawasan	10,71	
	Jumlah Kawasan Strategis pariwisata yang ditetapkan							
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2.079.302.965,00	2.059.037.050,00	91,05	80%	78%	97,50	
	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam menunjang urusan pariwisata							
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA							Pariwisata
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	4.752.092.850,00	4.734.343.500,00	99,63	11.775	39.910	338,94	
	Jumlah Kunjungan Wisata							
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.752.092.850,00	4.734.343.500,00	99,63	6 event	4 event	66,67	
	Jumlah event yang dilaksanakan dalam menunjang promosi pariwisata							

7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							Pariwisata
	Berkembangnya Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.318.189.659,00	2.316.636.550,00	99,93	50%	45%	90,00	
	Persentase Pengembangan Prasarana Ekonomi Kreatif							
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							
	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	2.318.189.659,00	2.316.636.550,00		100%	90%	90,00	
	Persentase pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							Pariwisata
	Berkembangnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	915.635.990,00	914.955.600,00	99,93	100%	90%	90,00	
	Persentase Pembinaan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisata							
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	780.361.450,00	779.681.800,00		100%	95%	95,00	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam urusan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif							
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							
	Berkembangnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	135.274.540,00	135.273.800,00	100,00	40 Pelaku	20 Pelaku	50,00	
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif							
	Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil							Dinas Perkebunan
	Persentase Nilai Produksi dan Produktifitas Mutu Perkebunan							
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
	Terlaksana Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.801.318.038,00	30.787.712.542,00	99,95	95%	99,79%	105,04	
	Persentase Terlaksana Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana							
	Pembangunan Prasarana Pertanian							
	Terlaksana Pembangunan Prasarana Pertanian	30.801.318,06	30.787.712.542,00	100	100	100	100	

	Persentase Terlaksana Pembangunan Prasarana Pertanian							
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Peternakan	7.847.965.636,00	7.776.831.836,00	99,09				Pangan dan Peternakan
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)							
	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan(Kw/Ha)							
	Jumlah Produksi Peternakan (Kg)							
	Jumlah Populasi Peternakan (ekor)							
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
	Meningkatnya ketersediaan Sarana Pertanian							
	Jumlah ketersediaan sarana Pertanian							
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
	Meningkatnya Pengawasan terhadap Penggunaan prasarana Pertanian	8.897.678.876,00	8.889.533.942,00	99,91%	100%	88,88%	88,88%	
	Jumlah kegiatan Pengawasan dan pendampingan Penggunaan prasarana pendukung Pertanian							
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.244.704.739,00	1.244.044.373,00	99,95%	6 dokumen	4 dokumen	66,67%	
	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme berkualitas yang dikembangkan							
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							
	Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.423.089.976,00	3.269.824.700,00	95,52%	13000 ekor	13000 ekor	100%	
	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten							
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							Pangan dan Peternakan
	Meningkatnya ketersediaan Prasarana Pertanian							
	Jumlah ketersediaan prasarana Pertanian							
	Pembangunan Prasarana Pertanian							

	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	36.927.058.573,00	36.608.747.280,00		100 %	85,75 %	85,75 %	
	Jumlah Prasarana pendukung Pertanian yang dibangun							
12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							Pangan dan Peternakan
	Meningkatnya pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	732.000.000,00	732.000.000,00	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah tindakan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	732.000.000,00	732.000.000,00	100%	12 wilayah	12 wilayah	100%	
	Jumlah penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
13	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							Pangan dan Peternakan
	Meningkatnya luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.865.024.165,00	3.793.982.617,00	98,16%	100%	100%	100%	
	Jumlah luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.865.024.165,00	3.793.982.617,00	98,16%	3000 ha	3000 ha	100%	
	Jumlah Luasan penanganan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							Pangan dan Peternakan
	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.250.941.471,00	3.250.849.219,00	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan							
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.250.941.471,00	3.250.849.219,00	100%	12 unit	12 unit	100%	
	Jumlah Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan							
	Meningkatnya Perdagangan Yang Berdaya Saing							

	Kontribusi Sektor Perdagangan				15,06	15,63	103,78	
	Jumlah Omset Yang Dihasilkan Dari Usaha Sektor Perdagangan	4.101.395.476,00	4.080.991.000,00	99,50	52,12	77,68	149,04	
	<i>Persentase Pasar Sehat</i>				76,47	66,6	87,09	
	<i>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan</i>				88,24	79,9	90,5	
15	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Meningkatnya Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	48.955.000,00	48.839.000,00	99,76				
	<i>Persentase Pengajuan SKA yang Diproses dan Ditindaklanjuti</i>							
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							
	Terlaksananya kegiatan penertiban Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.935.000,00	4.863.000,00	98,54	12 Dokumen	10 Dokumen	83,3	Dinas Perindag
	Jumlah Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang Dikeluarkan							
	Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							
	Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	44.020.000,00	43.976.000,00	99,90	35%	0	0	
	Persentase Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pengecer Langsung Minum Ditempat Yang Dikeluarkan							
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							Dinas Perindag
	<i>Persentase Pasar Sehat</i>	1.844.076.596,00	1.841.223.000,00	99,85				
	<i>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan</i>							
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.558.892.996,00	1.556.293.000,00	99,83	100,00%	100	100	
	<i>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Pasar</i>							
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	285.183.600,00	284.930.000,00	99,91	56,25%	56,25	100	
	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Mengikuti Pembinaan							
17	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							Dinas Perindag
	Meningkatkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	1.620.281.330,00	1.603.156.000,00	98,94				
	Persentase Stabilisasi Jenis Barang Penting							

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.571.000,00	191.528.000,00	99,98	100%	100	100	
	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pokok Barang Penting							
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.428.710.330,00	1.411.628.000,00	98,80	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100	
	Jumlah Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok							
18	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	344.018.450,00	343.769.000,00	99,93				
	<i>Jumlah Omset Yang Dihasilkan Dari Usaha Sektor Perdagangan</i>							
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan							
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengukuran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang Ditera dan Tera Ulang	344.018.450,00	343.769.000,00	99,93	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	Dinas Perindag
	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pengukuran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang Ditera dan Tera Ulang							
19	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							Dinas Perindag
	Kontribusi Sektor Perdagangan	244.064.100,00	244.004.000,00	99,98				
	Persentase Kontribusi sektor perdagangan							
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
	Terlaksananya kegiatan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	244.064.100,00	244.004.000,00	99,98	100%	100%	100	
	Persentase Barang yang Dipromosikan							
	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah Yang Berdaya Saing							
	Jumlah Omset yang Dihasilkan Dari Usaha Sektor Perindustrian	764.373.750,00	736.866.500,00	96,40				
	Persentase IUI dan IUKI Efektif							

	Terlaksana Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	713.256.060,00	713.256.060,00	100	45 Koperasi	45 Koperasi	100,00	
	Jumlah Pemeriksaan Koperasi							
24	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							Koperasi
	Meningkatnya Jumlah Ksp/Usk Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	316.792.960,00	316.792.960,00	100	100	100	100	
	Persentase Koperasi Sehat							
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	316,792,960	316,792,960	100	40 Koperasi	18 Koperasi	45	
	Jumlah KSP/USP sehat							
	Nilai Omset Usaha Koperasi	1.112.442.090,00	1.112.442.090,00	100	850223	897000,000	105,50%	Koperasi
25	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	808.417.740,00	808.417.740,00	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Koperasi yang Mengikuti Pelatihan							
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota							
	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota	808.417.740,00	808.417.740,00		100 Orang	100 Orang	100,00	
	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan							
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							Koperasi
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	304.024.350,00	304.024.350,00	100	77,7		100	
	Persentase Koperasi aktif yang dibina							
	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	304.024.350,00	304.024.350,00		125 Koperasi	125 Koperasi	100	
	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Koperasi Aktif							
	Jumlah UMKM yang dibina				50	50	100	Koperasi

	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	183.441.700,00	183.441.700,00	100%	2.243 Milyar	1.163 Milyar	51,85%	
	Nilai Realisasi Investasi							
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Adanya Strategi dan Media Publikasi Promosi Potensi Daerah	183.441.700,00	183.441.700,00	100%	2 Media Promosi	2 Media Promosi	100	
	<i>Jumlah Promosi Potensi Daerah dan Kegiatan Promosi</i>							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan							PM PTSP
	Persentase aduan masyarakat atas pelayanan perizinan yang terselesaikan	751.735.500,00	749.285.425,00	99,67	100	100	100	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	751.735.500,00	749.285.425,00	99,67%	89,05 Sangat Baik	93,62 (sangat baik)	105,13%	
	<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</i>							
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	751.735.500,00	749.285.425,00	99,67%	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
	<i>Jumlah Sektor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>							
	Meningkatnya jumlah laporan kegiatan penanaman modal baik PMDN dan PMA							PM PTSP
	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	736.617.050,00	657.461.475,00	89,25				
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Investasi, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	569.981.000,00	492.093.475,00	86,34%	100	100	100	
	<i>Persentase aduan masyarakat atas pelayanan perizinan yang terselesaikan</i>							
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	569.981.000,00	492.093.475,00	86,34%	65 kegiatan	65 kegiatan	100	
	<i>Jumlah kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>							
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							PM PTSP
	Tersedianya Koordinasi dan Perbantuan Pelaporan LKPM	166.636.050,00	165.368.000,00	99,24%	1 Media	1 Media	100	
	<i>Jumlah Media Penyebarluasan Informasi</i>							

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.636.050,00	165.368.000,00	99,24%	4 Kegiatan Klinik LKPM	4 Kegiatan Klinik LKPM	100	
	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal							
	<i>Jumlah Kegiatan Perbantuan Klinik LKPM</i>							

MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Prima

T4	Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	69.804.579.127,00	64.409.079.698,00	92,27	18,37	15,56	101	Bapperida, Setda , BKAD, Bapenda, Inspektorat
SS 11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	62.580.976.417,00	57.304.599.661,00	91,57	51,24	51,24	101	Bapperida
	Nilai SAKIP				BB	B	B	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	554.662.700,00	554.543.000,00	98,18%	55	65	118,18%	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
	<i>Persentase Ssitem data dan statistik yang terintegrasi</i>							
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten /Kota	554.662.700,00	544.543.000,00	98,18%	5	5	100%	
	Meningkatnya penyelenggaraan Statistyk sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Konawe Utara							
	<i>Jumlah Dokumen Statistik sektoral yang dihasilkan</i>							
2	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	45.410.102.500,00	40.333.156.024,00	88,82	64	62	96,87	Bagain Kesra
	Presentase Pelaksanaan kebijakan Kesejahteran Rakyat							
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
	Terlaksana Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	45.410.102.500,00	40.333.156.024,00	88,81	64	62	96,87	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kegamaan yang dibangun / rehabilitasi</i>							
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	541.444.640,00	508.760.519,00	93,96				Bagian Pembangunan
	Terlaksana penyusunan dokumen kegiatan Perekonomian dan Pembangunan							
	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi pembangunan</i>							

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							
	Terlaksananya pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	541.444.640,00	508.760.519,00	93,96	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
	<i>Jumlah Dokumen pegendalian dan evaluasi program pembangunan</i>							
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							Bapperida
	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.825.898.500,00	2.753.397.650,00	97,43%				
	<i>Persentase Konsistensi pelaksanaan perencanaan</i>				95,63	100	104,56%	
	<i>Persentase keterukuran indikator perencanaan</i>				100	100	100%	
	<i>Persentase tingkat partisipatif perencanaan</i>				22,27	24,13	108,35%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
	Tersusunnya perencanaan dan pendanaan	1.924.542.150,00	1.880.797.650,00	97,73%	100	100	100	
	<i>Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan di daerah</i>							
	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22.153.950,00	-	-	1	1	100,00%	
	<i>Jumlah Dokumen yang dihasilkan bidang perencanaan pembangunan daerah</i>							
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	679.825.400,00	652.718.000,00	96%	2	2	100%	
	<i>Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</i>							
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.110.076.878,00	9.025.045.468,00	99,07%				Bapperida
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				75,96	80,42	105,87%	
	Persentase OPD yang Mencapai kinerja sesuai target				81,15	87,25	107,52%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.861.199.050,00	1.859.924.000,00	99,93%	2	2	100%	

	<i>Jumlah Dokumen kordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</i>							
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA	364.339.700,00	320.612.000,00	88,00%	2	2	100%	
	<i>Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan bidang perekoinomian dan SDA</i>							
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah							
	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	6.884.538.128,00	6.844.509.468,00	99,42%	4	4	100%	
	<i>Jumlah Dokumen yang dihasilkan bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>							
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							Bapperida
	Meningkatnya Inovasi Daerah	4.138.791.199,00	4.129.697.000,00	99,78%	1	1	100%	
	Jumlah Inovasi Penelitian yang dilaksanakan							
	Penelitaian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	475.104.600,00	473.295.000,00	99,62%%	2	2	100%	
	<i>Jumlah dokumen yang dihasilkan bidang penelian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan</i>							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.663.686.599,00	3.656.402.000,00	99,80%	3	3	100%	
	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah							BKAD

	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkualitas	285,555,420,663.00	144,395,786,775.00	50.57%	100%	97%	97%	
	<i>Opini BPK</i>			WTP	WTP	WTP		
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			89,51%	100%	100%	100	
	Tingkat kemandirian keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	285.555.420.663,00	261.585.363.463,00	99,99	4,53	3,48	76,82	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.192.107.050,00	4.661.925.048,00	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	4.269.791.230,00	3.514.432.776,00		100	100	100	
	Persentase pengelolaan perbaharan daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	7.869.031.350,00	5.499.561.080,00		100%	92%	92%	
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah							
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Cakupan Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	268.224.491.033,00	247.909.444.559,00	48,74%	100	100	100	
	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah							
8	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							BKAD
	Peningkatan pengelolaan barang milik daerah	8.234.619.800,00	7.371.198.972,00	89,51%	90%	100%	111%	
	<i>Persentase Aset Pemda yang terinventarisir</i>							
	Pengelolaan Barang Milik Daerah							
	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.234.619.800,00	7.371.198.972,00					
	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah							

9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			89,51%	100%	100%	100	Bapenda
	Tingkat kemandirian keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	8.234.619.800,00	7.371.198.972,00	99,99	4,53	3,48	76,82	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
	Rasio kemandirian keuangan daerah	154.050.000,00	154.050.000,00	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	319.840.200,00	319.774.174,00	99,97	1 dokumen	1 dokumen	100	
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							Bapenda
	Peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah	1.040.719.450,00	1.040.719.250,00	100	35	25,22	72,06	
	Persentase kenaikan pendapatan daerah							
	Pengelolaan Pendapatan Daerah							
	Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal	1.040.719.450,00	1.040.719.250,00	99,99	4,53	3,48	76,82	
	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan Daerah)							
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.223.602.710,00	7.104.480.037,00	98,35	100	100	100%	Inspektorat daerah
	Kualitas Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)				3	3	102%	
	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai di Tindaklanjuti				80,62	82,09		
	Persentase SKPD yang Telah Ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM				55.56	55.56	109%	
	Meningkatnya Leveling Maturitas SPIP				3	3,26		
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							Inspektorat daerah
	Meningkatnya progres Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Temuan	4.875.878.150,00	4.791.310.202,00	98%	100%	100%	100%	
	Persentase Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan							

	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
	Terpenuhinya Target Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Internal	3.843.498.100,00	3.827.066.152,00	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu							
	Terpenuhinya Target pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada pelayanan penanganan Pengaduan	1.032.380.050,00	964.244.050,00	93%	100	100	100	
	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
12	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							Inspektorat daerah
	Meningkatnya cakupan pengendalian intern pemerintah	2.225.065.950,00	2.204.349.835,00	99%	100%	100%	100%	
	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
	Terpenuhinya target perumusan kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan	314.032.150,00	314.032.007,00	100%	100%	100%	100%	
	<i>Persentase perumusan kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>							
	Pendampingan dan Asistensi							
	Terpenuhinya Pelayanan Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1.911.033.800,00	1.890.317.828,00	99%	100%	100%	100%	
	<i>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</i>							
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							Kecamatan
	Persentase Pelayanan	122.658.610,00	108.820.000,00	88,72				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.658.610,00	108.820.000,00	88,72	2 Laporan	2 Laporan	100%	
	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan							Kecamatan
	Kualitas Pelayanan							

14	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	Meningkatkan kualitas pelayanan	15.030.300,00	9.500.000,00	63,21				
	Persentase Pelayanan							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.030.300,00	9.500.000,00	63,21				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							Kecamatan
	Meningktkan Pemberdayaanaan Masyarakat	2.297.575.829,00	2.250.893.400,00	97,96				
	Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa							
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	22.674.300,00	22.580.000,00	99,58				
	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa							
	Pemberdayaan Kelurahan							
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.274.901.529,00	2.228.313.400,00	98,00				
	Jumlah laporan pembangunan sarana prasarana Pemberdayaan Kelurahan							
SS 12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya	43.915.558.241,68	43.427.218.872,00	98,89	2,62	3,16	125,31	Dukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.294.485.904,00	1.257.772.322,00	97,16	3,62	2,62	100	
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							Dukcapil
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan berbasis elektronik	436.382.104,00	442.284.422,00	100	100	100	100	
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berbasis elektronik							
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	108.760.000,00	107.727.000,00	99%	1100	100	100	
	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk							
	Penataan Pendaftaran Penduduk							

	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	114.531.060,00	114.272.272,00	100%	20%	20%	100	
	<i>Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk</i>							
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	101.085.150,00	101.085.150,00	100%	100	100	100	
	<i>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	119.262.000,00	119.200.000,00	100%	4	4	100	
	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>							
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							Dukcapil
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil berbasis elektronik	349.289.300,00	330.034.300,00	94	100	100	100	
	<i>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil berbasis elektronik</i>							
	Pelayanan Pencatatan Sipil							
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	39.565.000,00	28.884.000,00	73	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil							
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39.565.000,00	39.565.000,00	100	13	13	100	
	Jumlah Kecamatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	270.159.300,00	261.585.300,00	97	1	1	100	
	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>							
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							Dukcapil
	Meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	483.464.500,00	471.153.600,00	97	1	1	100	
	<i>Persentase Penyajian dan Pengeolaan datanformasi administrasi kependudukan</i>							

	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							
	Meningkatnya Pemanfaatan dan Penyajian database kependudukan	16.426.500,00	15.020.000,00	91	100	100	100	
	Persentase Pemanfaatan dan Penyajian database kependudukan							
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	430.388.000,00	423.803.600,00	98,47	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	36.650.000,00	32.330.000,00	88	8	8	100	
	Persentase pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							Dukcapil
	Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan	14.385.000,00	14.300.000,00	99,4	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan							
	Penyusunan Profil Kependudukan							
	Meningkatnya Persentase Profil Kependudukan	14.385.000,00	14.300.000,00	99,4				
	Persentase Profil Kependudukan							
	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	10.965.000,00	10.965.000,00	100,00	91%	91%	100%	
	<i>Persentase meningkatnya penyelenggaraan layanan SPBE</i>							
5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	Meningkatnya pengelolaan layanan Pemerintahan berbasis aplikasi	10.965.000,00	10.965.000,00	100%	100%	100%	100%	
	<i>Persentase meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemerintahan berbasis Aplikasi</i>							
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Kominfo
	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Domain / Sub Domain Pemda	10.965.000,00	10.965.000,00	100%				

	<i>Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan Pengawasan domain dan sub domain pemda</i>							
	Pengelolaan E- Government dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota							
	Tersedianya Dokumen RITIK Pemda	10.010.712.210,00	9.986.152.963,00	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen RITIK Pemda yang tersedia							
	Terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terintegrasi	10.010.712.210,00	9.986.152.963,00	99,75	85%	85%	100%	Dukcapil
	Persentase Meningkatnya Infrastruktur SPBE							
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemerintahan berbasis aplikasi	10.010.712.210,00	9.986.152.963,00	99,75	85%	85%	100%	
	Persentase meningkatnya Infrastruktur TIK mendukung penyelenggaraan SPBE							
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah							
	Terlaksananya Pengembangan TIK Pemda	10.010.712.210,00	9.986.152.963,00	100%	24 Paket	24 Paket	100%	
	Tersedianya Laporan Pengembangan TIK Pemda							
	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik	4.729.778.420,00	4.728.856.730,00	99,98	94%	94%	100%	
	Persentase meningkatnya Pengelolaan Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2.010.496.100,00	2.010.035.255,00	100%	93%	93%	100%	
	Persentase meningkatnya pengelolaan pengaduan berbasis on line (lapor-Span)	354.393.110,00	354.393.110,00	100%	93%	93%	100%	
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							Dukcapil
	Meningkatnya Publikasi dan Pengelolaan Pengaduan berbasis online	2.364.889.210,00	2.364.428.365,00	99,98	100%	100%	10000%	
	Persentase meningkatnya publikasi dan pengelolaan pengaduan berbasis on line							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Terkelolanya Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2.364.889.210,00	2.364.428.365,00	100%				

	Laporan Pengelolaan Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah							
	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.316.259.077,68	11.135.026.222,00	98,40	13	30		Dispora
	<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina</i>							
	<i>Jumlah cabang olahraga berprestasi</i>				8	35		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.313.357.350,00	2.293.814.200,00	99,00	100%	99%	99%	
	Berkembang kapasitas daya saing kepemudaan							
	<i>Persentase terlaksananya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</i>							
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.187.420.150,00	2.168.044.000,00	99,11	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	125.937.200,00	125.770.200,00	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.002.901.727,68	8.841.212.022,00	98,20				Dispora
	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							
	Persentase terlaksananya program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan							

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.002.901.727,68	8.841.212.022,00	98%	100%	100%	100	
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan							
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	641.120.800,00	639.422.350,00	100				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan	16.553.357.630,00	16.308.445.635,00	98,52				Perpustakaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat				3,62	3	82,87	
	Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Daerah				42,45	42	98,94	
	Meningkatnya Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang diarsipkan							
	Persentase Arsip Statis dan dinamis yang diarsipkan				44,77	44	98,28	
10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
	Meningkatnya pembinaan Perpustakaan	1.957.645.800,00	1.957.421.600,00	99,99	42,45	42	98,94	
	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan							
	Pengelolaan perpustakaan tingka daerah Kab/Kota							
	<i>Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.388.197.800,00	1.387.973.600,00	99,98	100	100	100	

	<i>Persentase Pertumbuhan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	<i>Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	569.448.000,00	569.448.000,00	100	100	100	100	
	<i>Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							
11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							Perpustakaan
	<i>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	870.436.100,00	870.225.950,00	99,98	100	100	100	
	<i>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	25.382.200,00	25.382.200,00	100	100	100	100	
	Persentase Pertumbuhan yang sudah Mengelola Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	27.831.150,00	27.831.150,00	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Jumlah dokumen Pertumbuhan Perpustakaan yang sudah Mengelola Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	817.222.750,00	817.012.600,00	99,97	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	
	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							Perpustakaan
	<i>Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</i>	116.540.550,00	116.439.000,00	99,91	34,22	34	99	
	<i>Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</i>							
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota							

	<i>Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	116.540.550,00	116.439.000,00	100	100	100	100	
	<i>Persentase Arsip yang di lindungi Akibat Bencana</i>							
13	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.608.735.180,00	13.364.359.085,00	98,20				DPRD
	Meningkatkan Tugas DPRD							
	Fasilitasi Tuga DPRD							
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.392.498.000,00	5.356.065.585,00	99,32				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							
	Pembahasan Kerja Sama Daerah							
	Terlaksananya penyusunan bahan Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.400.000.000,00	4.289.440.000,00	97,84				
	Persentase penyusunan bahan komunikasi dan publikasi Kerja Sama Daerah							
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	335.857.500,00	335.857.500,00	100				
	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibentuk							
	Peningkatan Kapasitas DPRD							
	Terlaksananya peningkatan tugas DPRD	1.572.307.680,00	1.484.812.000,00					
	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD							
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.908.072.000,00	1.898.184.000,00					
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
S13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	5.490.503.808,00	5.247.626.673,00	95,58	222	225	101,35	BKPSDM
	Indesk Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian	4.828.128.408,00	4.591.626.673,00	95,10				
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
	Terlaksananya program kepegawaian daerah	4.828.128.408,00	4.591.626.673,00	95%	100%	87%	87	
	<i>Persentase terlaksananya program kepegawaian daerah</i>							

	Pengadaan, pemberhentian dan informasi Kepegawiaan							
	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawiaan ASN	4.521.497.511,00	4.306.893.224,00	95%	100%	95%	95	
	<i>Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawiaan ASN</i>							
	Mutasi dan Promosi ASN							
	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	59.618.700,00	58.988.548,00	99%	100%	99	99	
	<i>Persentase terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN</i>							
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
	Terlaksananya penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	247.012.197,00	225.744.901,00	91%	100%	91%	91	
	<i>Persentase terlaksananya penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>							
	Pendidikan dan Pelatihan							BPKSDM
	Terlaksananya program pendidikan dan pelatihan	662.375.400,00	656.000.000,00	99,04				
	<i>Persentase terlaksananya program pendidikan dan pelatihan</i>							
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	Terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia	662.375.400,00	656.000.000,00	99%	100%	99%	99	
	<i>Persentase pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia</i>							
	Pengembangan Kompetensi teknis							
	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	662.375.400,00	656.000.000,00	99%	100%	100%	100	
	<i>Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi teknis</i>							
S14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa yang Baik	21.108.994.846,00	20.724.639.400,00	98,18				
	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	17.124.169.246,00	16.780.480.050,00	97,99	0,6128	0,6128	100	
1	PROGRAM PENATAAN DESA							
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	16.673.751.146,00	16.371.080.000,00	98.18	100	260	260	DPMD
	<i>Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa</i>							
	Penyelenggaraan Penataan Desa							
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	16.673.751.146,00	16.371.080.000,00	98.18	100	260	260	
	<i>Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa</i>							

2	PROGRAM ADMINISTARSI PEMERINTAHAN DESA							DPMD
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	450.418.100,00	409.400.050,00	99,43	100	99,43	99,43	DPMD
	<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</i>							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	831.463.330,00	787.434.750,00	94,7	100	99,43	99,43	DPMD
	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>							
	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100				DPMD
	<i>Persentase 1 (satu) Bumdes dalam 1 (satu) desa yang aktif</i>							
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							DPMD
	Meningkatnya Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100	100	99,93	99,93	
	<i>Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa</i>							
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100	100	99,8	99,8	
	<i>Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Kabupaten</i>							
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa	2.484.825.600,00	2.444.159.350,00	98,36				DPMD
	<i>Persentase masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan padat karya tunai</i>	2.484.825.600,00	2.444.159.350,00					
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							DPMD
	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	2.484.825.600,00	2.444.159.350,00	99,21	100	99,43	99,43	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif							

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.484.825.600,00	2.444.159.350,00	98,36	100	99,43	99,43	
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta</i>							

Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

T5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							Dinas Lingkungan Hidup
SS 15	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	25.226.316.790,00	19.365.145.814,00	76,77	72,06	72,53	100,74	Dinas PUPR
	Persentase ketaatan terhadap perencanaan tata ruang	4.100.000.000,00	4.073.363.830,00	99,35				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	4.100.000.000,00	4.073.363.830,00	99,35%				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							
	Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	197.792.580,00	99,13%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.900.000.000,00	3.875.571.250,00	99,37%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	<i>Indikator Kinerja Subkegiatan : Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Meningkatkan pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang tata pemerintahan,	21.126.316.790,00	15.291.781.984,00	72,38				Tapem

	<i>Persentase Penatagunaan Tanah</i>							
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							
	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	21.126.316.790,00	15.291.781.984,00	72%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
	<i>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah</i>							
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah							
	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	21.126.316.790,00	15.291.781.984,00	72%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	
	Jumlah dokumen tentang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah							
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							Tapem
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	10,000.00	-	-	-	-	-	
	<i>Persentase Penatagunaan Tanah</i>							
	Penggunaan tanah yang hamparannya satu daerah Kabupaten/kota							
	Terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya satu daerah Kabupaten/kota	10.000,00	-					
	Jumlah lokasi penggunaan tanah yang hamparannya satu daerah Kabupaten/kota							
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							Tapem
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12,185,996,000.00	10,377,374,760.00	85%	35 Dokumen	31 Dokumen		
	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>							
	Administarsi Tata Pemerintahan							
	Terlaksananya Penataan Adminstrasi Pemerintahan	12.185.996.000,00	10.377.374.760,00	85%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>							
S16	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara	51.599.973.696,00	49.903.600.834,00	96,71	95,54	96,58	101,08	Dinas Lingkungan Hidup
	<i>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</i>							
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							

	Terlaksananya kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup	1.711.018.440,00	1.711.018.441,00					
	<i>Persentase Perencanaan Dokumen Lingkungan</i>							
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota							
	Pencegahan Pencemaran dn/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	1.105.914.950,00	1.105.897.650,00	99,98	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	<i>Persenatse Jumlah pencemaran</i>							
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau keryusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	538.365.490,00	538.345.740,00	99,99	2 Lokasi	2 Lokasi	100	
	<i>Jumlah titik pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota</i>							
	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	92.613.000,00	92.613.000,00	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	<i>Jumlah Dokumen Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>							
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya kegiatan pengelolaan keanekragaman Hayati	44.642.048.121,00	43.266.351.893,00	96,92				
	Indeks Tutupan Lahan							
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupate/kota	44.642.048.121,00	43.266.351.893,00	96,92				
	<i>Jumlah laporan pelaksanaan keanekaragaman hayati Kabupaten/kota</i>							
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)							Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya pegendalian berbahaya dan beracun 9B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	39.455.900,00	27.983.600,00	70,92				
	Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3							

	Penyimpanan Sementara Limbah B3							
	Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3	27.983.600,00	27.983.600,00	100	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	
	<i>Jumlah Laporan hasil kegiatan penyimpanan semnataru limbah B3</i>							
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Melaksanakan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.472.300,00	-					
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah							
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	328.485.150,00	328.205.150,00	99,91				
	<i>Persentase program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)</i>							
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	328.485.150,00	328.205.150,00	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	
	<i>Jumlah laporan hasil pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>							
5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase MHA yang terakui	8.985.150,00	8.985.150,00	100				
	Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH							
	Terlaksanya Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH	8.985.150,00	8.985.150,00	100				

	<i>Jumlah dokumen hasil Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH</i>							
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASTARAKAT							Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	210.412.300,00	10.412.300,00	4,95				
	<i>Persentase ASN yang tersertifikasi Penilaian AMDAL</i>							
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210.412.300,00	10.412.300,00	49,48	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
	<i>Jumlah dASN yang mengikuti sertifikasi AMDAL</i>							
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							Dinas Lingkungan Hidup
	<i>Persentase Kelompok Masyarakat Yang mendapat Penghargaan LH</i>	10.026.300,00	10.026.300,00	100				
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.026.300,00	10.026.300,00	100	1 entitas	1 entitas	100,00%	
	<i>Jumlah kelompok masyarakat yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>							
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan pengeloklaan persampahan	4.649.542.335,00	4.540.618.000,00	97,66				
	Persentase Program Pengelolaan Persampahan							
	Pengelolaan Sampah							
	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah	4.611.871.235,00	4.518.403.500,00	98%	0%			
	Persentase sampah yang terselesaikan							
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							

	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan	37.671.100,00	22.214.500,00	59%	100	100	100,00%	
	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah Pihak Swasta							
S17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	9.592.931.696,00	6.217.293.508,00	64,81	165,64	172,78	104,31	BPBD
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahan bencana							
	<i>Indeks Resiko Bencana</i>	8.608.644.246,00	5.233.123.308,00	88,32	100	88	88	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	8.608.644.246,00	5.233.123.308,00	85,95	100	86	86	
	<i>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</i>							
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	700.092.100,00	501.817.550,00	71,68	100	72	72	
	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
	Pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana							
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.756.461.500,00	1.750.591.650,00	99,64	100	100	100	
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	437.738.000,00	435.195.108,00	99,42	100	100	100	
	<i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>							
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5.714.352.646,00	2.545.519.000,00	44,55	100	100	100	
	<i>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>							
	PENANGGULANGAN BENCANA							Damkar
	<i>Persentase tingkat waktu tanggap (respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen (WMK)</i>	984.287.450,00	984.170.200,00	99,99				
2	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							

	Terwujudnya pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	984.287.450,00	984.170.200,00	99,99	100%	99,99%	99,99	
	<i>Jumlah dokumen pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</i>							
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Tercapainya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	587.124.850,00	587.121.600,00	99,999	100%	99,99%	99,99	
	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							
	Tercapainya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	136.995.000,00	136.995.000,00	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	<i>Jumlah Dokumen laporan hasil kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>							
	Investigasi Kejadian Kebakaran							
	Tercapainya Investigasi Kejadian Kebakaran	22.050.000,00	21.975.000,00	99,66	100%	99,66%	99,66	
	<i>Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran</i>							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	74.454.000,00	74.454.000,00	100	14 Desa	14 Desa	100	
	<i>Jumlah desa yang dibentuk dan dibina dalam Pencegahan kebakaran</i>							
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							
	Tercapainya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	163.663.600,00	163.624.600,00	99,98	1 Laporan	1 Laporan	100	
	<i>Jumlah laporan Pegawai yang mengikuti operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</i>							
	Meningkatnya Kondisi Keamanan dan Perlindungan Masyarakat				100	100	100	Satpol PP
	Persentase Angka Kriminalitas							

3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.217.723.004,00	2.216.600.674,00	99,95	100	100	100	
	<i>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>							
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Trantib)							
	Meningkatnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.836.779.304,00	1.835.656.974,00	100	100	100	100	
	<i>Persentase Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>							
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	205.653.700,00	205.653.700,00	100	100	100	100	
	<i>Persentase Kepatuhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>							
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya pembinaan penyidik Pegawai PNS Kabupaten/Kota	175.290.000,00	175.290.000,00	100	100	100	100	
	<i>Persentase pembinaan penyidik pegawai PNS Kabupaten/Kota</i>							
	Meningkatnya tata kelola dan manajemen bencana				100	100	100	Dinas Sosial
	<i>Indeks resiko bencana</i>							
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	Meningkatnya Penanganan Bencana	1.248.648.400,00	1.227.726.970,00	98,32%				
	Persentase penanganan bencana							
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabu							
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	934.487.400,00	913.565.970,00	97,76%	100%	100%	100%	

	Meningkatnya Capaian SasaranKkegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.393.461.000,00	191.461.000,00	13,74	100%	100%	100%	
	Persentase penduduk/etnis/suku/agama/ormas yang memahami nilai nilai kehidupan poltik dan berbangsa							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.393.461.000,00	191.461.000,00	13,74				
	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan	44.401.250.490,00	44.385.631.940,00	99,96				Badan Kesbangpol
	Persentase partisipasi politik pemilh pada pemilihan Umum							
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	Meningkatnya kesadaran dan Partisipasi politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan	379.409.400,00	379.194.200,00	100	25%	24,50%	98%	
	Penurunan potensi konflik tidak menjadi konflik							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	379.409.400,00	379.194.200,00	99,94	25%	24,50%	98%	
	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				25%	25%	100%	Badan Kesbangpol
	Penurunan potensi konflik tidak menjadi konflik							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	290.191.900,00	290.191.900,00	100	25%	25%	100	

	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	43.064.661.540,00	43.059.361.540,00	99,99	93,64%	93,19%	99,52%	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya kesadaran dan Partisipasi politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan							
	Persentase partisipasi politik pemilih pada pemilihan umum							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	43.064.661.540,00	43.059.361.540,00	99,98	93,64%	93,19%	99,52%	Badan Kesbangpol
	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantau Politikan pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya							
	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantau Politikan pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya							
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	957.179.550,00	947.076.200,00	98,94	100%	97%	97%	Badan Kesbangpol
	Penurunan Potensi Konflik tidak menjadi konflik							
	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	957.179.550,00	947.076.200,00	98,94	100%	97%	97%	Badan Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							



